

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN (RPJMK)
PIDIE JAYA TAHUN 2014 - 2019
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2014**

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN (RPJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,**

Menimbang : a.

bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;

b.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya melalui penjabaran visi, misi, serta program Bupati Pidie Jaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional;

c.

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa ...




- d. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-~~18~~

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan... 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
29. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

Dengan.../k

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PIDIE
JAYA TAHUN 2014-2019 DI KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya;
6. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau diharapkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPK Tahun 2014-2019 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang mengacu pada RPJMK Pidie Jaya;
13. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bappeda Pidie Jaya adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pidie Jaya melalui Sekretaris Daerah;
15. Kepala Bappeda Pidie Jaya adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

RPJMK memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2013, serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2014 sampai tahun 2019.

Pasal 3

Sistematika RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Serta Kerangka Pendanaan;
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Pidie Jaya;
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan
Pendanaan;
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- BAB X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; dan
- BAB XI : Penutup.

Pasal 4

RPJMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya; dan
- b. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2014-2019.

Pasal 6

RPJMK dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya lingkup Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) RPJMK dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.
- (2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.
- (3) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 9

- (1) Dokumen Perencanaan pembangunan Pidie Jaya yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMK menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2019, dan dapat dijadikan sebagai RPJMK transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2019, sebelum ditetapkannya RPJMK Tahun 2019-2024 yang memuat visi dan misi Bupati periode selanjutnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Pidie Jaya ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 22 September 2014 M
27 Dzulkaidah 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 22 September 2014 M
27 Dzulkaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

dto

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR ...7

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN
(RPJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2014 - 2019
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

I. UMUM

RPJMK merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMK merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);.

RPJMK tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kabupaten Pidie Jaya, serta memuat prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMK Pidie Jaya memiliki kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPK Tahun 2015;
- b. RKPK Tahun 2016;
- c. RPKK Tahun 2017;
- d. RKPK Tahun 2018; dan
- e. RKPK Tahun 2019.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMK, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan di Pidie Jaya. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2014. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBK melalui mekanisme perubahan APBK (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RPJMK mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam:

- a. penyusunan RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, dan perencanaan anggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

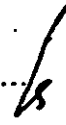
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9...

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR ...6



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019". Penyusunan Rancangan RPJMK Pidie Jaya ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 ini disusun dengan tujuan untuk membawa arah pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun ke depan, disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) semua SKPK. Selanjutnya Pasal 76 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Di samping itu dokumen RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 berfungsi guna mewujudkan sinergisitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah (SKPK), serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program-program yang dituangkan dalam RPJMK merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga sebuah perencanaan lazimnya selalu diikuti dengan proses penganggaran. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa

perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 yang disusun merupakan bagian integral dan komprehensif untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara luas.

RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 disusun melalui berbagai proses tahapan seperti Pelaksanaan Musrenbang RPJMK tingkat kecamatan dan Musrenbang RPJMK tingkat kabupaten. Dalam proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala SKPK, Perwakilan Masyarakat, Tokoh, Ulama, Pemuda, Tenaga Ahli, Wartawan, LSM, dan Anggota DPRK Pidie Jaya yang seluruhnya memberikan kontribusi dan pendapat untuk kesempurnaan RPJMK ini.

Kami berharap kepada semua pihak agar RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 ini dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan Pidie Jaya selama kepemimpinan kami.

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

AIYUB ABBAS

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBA	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
IKK	:	Indek Kemahalan Konstruksi
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IPM	:	Indek Pembangunan Manusia
IP	:	Indek Penanaman
Inkesra	:	Indek Kesejahteraan Rakyat
IKM	:	Indek Kepuasan Masyarakat
KAT	:	Komonitas Adat Terpencil
KBR	:	Kebun Bibit Rakyat
KU-APBK	:	Kebijakan Umum – APBK
LAKIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Musrenbang	:	Musyawaharah Rencana Pembangunan
Otsus	:	Otonomi Khusus
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PATEN	:	Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PP	:	Peraaturan Pemerintah
Perbup	:	Peraturan Bupati
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto

PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PMKS	:	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial
PKA	:	Pekan Kebudayaan Aceh
PKPJ	:	Pekan Kebudayaan Pidie Jaya
POPDA	:	Pekan Olah Pelajar Daerah
PORDA	:	Pekan Olah Raga Daerah
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPI	:	Pangkalan Pendaratan Ikan
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPA	:	Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RKPK	:	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPK	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	:	Rencana Detil Tata Ruang
RKT	:	Rencana Kinerja Tahunan
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Satpol PP/WH	:	Satuan Polisi Pamong Praja / Wiyatul Hisbah
SILPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPA	:	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

SPM	:	Standar Pelayanan Minimum
THL	:	Tenaga Harian Lepas
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintah Aceh
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
TPA	:	Tempat Pengajian Alquran
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi
TDBH Migas	:	Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN dan AKRONIM	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Sistematika Dokumen RPJMK	I-7
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-4
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-6
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-6
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-12
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	II-14
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-17
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib.....	II-17
2.3.1.1 Pendidikan.....	II-17
2.3.1.2 Pendidikan Dayah.....	II-20
2.3.1.3 Kesehatan.....	II-23
2.3.1.4 Infrastruktur.....	II-27
2.3.1.5 Perhubungan.....	II-34
2.3.1.6 Administrasi Kependudukan....	II-36
2.3.1.7 KB dan Keluarga Sejahtera	II-37
2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan	II-38
2.3.1.9 Koperasi dan UMKM.....	II-39
2.3.1.10 Pengelolaan Aset Daerah.....	II-41
2.3.1.11 Kepegawaian.....	II-43
2.3.1.12 Ketenagakerjaan.....	II-45
2.3.1.13 Syariat Islam.....	II-45
2.3.1.14 Komunikasi dan Informatika....	II-50
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-52
2.3.2.1 Pertanian dan Peternakan.....	II-52
2.3.2.2 Perkebunan dan Kehutanan.....	II-59
2.3.2.3 Kelautan dan Perikanan.....	II-63
2.3.2.4 Pariwisata.....	II-66
2.3.2.5 Perdagangan dan Industri.....	II-66
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-70
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-70
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-73
2.4.3 Fokus Iklim Investasi.....	II-75
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-77

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBK.....	III-2
3.1.2	Neraca Keuangan Kabupaten Pidie Jaya...	III-6
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-10
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-11
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-12
3.3	Kerangka Pendanaan	III-13
3.3.1	Analisis Pengeluaran Priodik Wajib dan Mengikat serta Perioritas Utama.....	III-14
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-15
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2	Isu Strategis.....	IV-2
4.2.1	Analisis SWOT.....	IV-2
4.2.2	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019.....	IV-4
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	Visi	V-2
5.2	Misi.....	V-4
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-5
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN...	VI-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.1.1	Kekuatan-Peluang (S-O).....	VI-2
6.1.2	Kekuatan-Ancaman (S-T).....	VI-3
6.1.3	Kelemahan-Ancaman (W-T).....	VI-4
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-4
6.3	Rumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019.....	VI-8
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA.....	VII-1
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	IX-1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1	Pedoman Transisi	X-1
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI	PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Pidie Jaya	II-1
Tabel 2.2	Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya.....	II-3
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2009 s.d 2013.....	II-5
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-5
Tabel 2.5	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya.....	II-6
Tabel 2.6	Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya.....	II-7
Tabel 2.7	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kab. Pidie Jaya....	II-8
Tabel 2.8	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Th. 2009 s.d 2012 Kab. Pidie Jaya	II-9
Tabel 2.9	Jumlah KK Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-11
Tabel 2.10	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2009 s.d 2013 Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Pidie Jaya.....	II-12
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya.....	II-13
Tabel 2.12	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya.....	II-14
Tabel 2.13	Jumlah Sanggar Seni Budaya dalam Kab. Pidie Jaya	II-15
Tabel 2.14	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya.....	II-18
Tabel 2.15	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya	II-19
Tabel 2.16	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya...	II-19

Tabel 2.17	Nilai Rata-Rata dan Angka Kelulusan Ujian Nasional Menurut Tk. Pendidikan.....	II-20
Tabel 2.18	Jumlah Dayah, Guru, dari Santri dalam Kab. Pidie Jaya Tahun 2012.....	II-21
Tabel 2.19	Jumlah Balai Pengajian, Guru, dan Santri Kab. Pidie Jaya Tahun 2012.....	II-22
Tabel 2.20	Nama-Nama Dayah yang Terakreditasi dalam Kab. Pidie Jaya Tahun 2012.....	II-22
Tabel 2.21	Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya...	II-24
Tabel 2.22	Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun Tahun 20010 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya	II-24
Tabel 2.23	Distribusi SDM Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.....	II-25
Tabel 2.24	Distribusi Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.....	II-26
Tabel 2.25	Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dalam Kepemilikan di Kab. Pidie Jaya Th. 2013.....	II-26
Tabel 2.26	Kondisi Jaringan Jalan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten di Kab. Pidie Jaya Th. 2013..	II-27
Tabel 2.27	Kondisi Jalan Kabupaten Pidie Jaya Th. 2013	II-27
Tabel 2.28	Jumlah dan Panjang Jembatan (Plat Beton) Dalam Kabupaten Pidie Jaya.....	II-28
Tabel 2.29	Kondisi Jalan Pedesaan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun.....	II-29
Tabel 2.30	Kondisi Sarana dan Prasarana Irigasi Kabupaten Pidie Jaya.....	II-30
Tabel 2.31	Daftar Embung dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-32
Tabel 2.32	Indikator Infrastruktur Tahun 2013 Kab. Pidie Jaya.....	II-33
Tabel 2.33	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya.....	II-35
Tabel 2.34	Jumlah Volume Kendaraan Kab. Pidie Jaya...	II-35
Tabel 2.35	Keadaan Demografi dan Dokumen Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya.....	II-37

Tabel 2.36	Jenis Pekerjaan/Mata Pencarian Penduduk Perkecamatan Kab. Pidie Jaya Th. 2013.....	II-37
Tabel 2.37	Aseptor KB Kabupaten Pidie Jaya Th. 2013...	II-38
Tabel 2.38	Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.....	II-39
Tabel 2.39	Jenis Koperasi dan Klasifikasi Koperasi Dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.....	II-40
Tabel 2.40	Rekapitulasi UMKM Perkecamatan Th. 2010 s.d 2013 Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.....	II-41
Tabel 2.41	Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Tanah.....	II-42
Tabel 2.42	Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Alat Angkut/Kendaraan.....	II-42
Tabel 2.43	Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Bangunan Gedung.....	II-42
Tabel 2.44	Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Jalan/Jembatan.....	II-43
Tabel 2.45	Jumlah PNS dalam Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	II-43
Tabel 2.46	Jumlah Penjabat Struktural Kab. Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-44
Tabel 2.47	Jumlah Pegawai Pemerintah Kab. Pidie Jaya Berdasarkan Golongan.....	II-44
Tabel 2.48	Indikator Ketenaga Kerjaan Kab. Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013.....	II-45
Tabel 2.49	Nama-Nama Mesjid Kecamatan Th. 2013 ...	II-46
Tabel 2.50	Jumlah TPA Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.....	II-48
Tabel 2.51	Jumlah Majelis Taklim Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya.....	II-48
Tabel 2.52	Kasus Pelanggaran Syariat di Kab. Pidie Jaya Th. 2011 s.d 2013.....	II-48
Tabel 2.53	Jumlah Fakir Miskin Penerima Zakat Tahun Th. 2010 s.d 2013.....	II-49
Tabel 2.54	Jumlah bantuan Rumah Dhuafa.....	II-49
Tabel 2.55	Sebaran BTS Telekomunikasi di Kabupaten Pidie Jaya.....	II-51

Tabel 2.56	Luas Baku Sawah yang Diairi dengan Sistem Irigasi Menurut Kecamatan.....	II-53
Tabel 2.57	Indikator Penting Bidang Pertanian Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya.....	II-54
Tabel 2.58	Luas Areal Tanaman Pangan dan Jumlah Produksi serta Produktifitas Pidie Jaya.....	II-54
Tabel 2.59	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar Kabupaten Pidie Jaya Th. 3013.....	II-56
Tabel 2.60	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil Kabupaten Pidie Jaya Th. 3013.....	II-57
Tabel 2.61	Populasi Lahan Hijauan Ternak (HMT) dan Padang Gembalaan Pidie Jaya Tahun 2013..	II-57
Tabel 2.62	Jumlah Populasi Ternak Unggas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-58
Tabel 2.63	Perkembangan Luasan Komoditi Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Th 2009 s.d 2013.....	II-59
Tabel 2.64	Prosentase Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013.....	II-60
Tabel 2.65	Luas Areal Tanaman dan Produksi Kakao Kab. Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-61
Tabel 2.66	Perkembangan Areal Hutan Rakyat Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya	II-62
Tabel 2.67	Jumlah Pembuatan Bibit pada Kegiatan KBR Kab. Pidie Jaya	II-62
Tabel 2.68	Kebutuhan dan Hasil Pembangunan Bidang Kehutanan 2009 s.d 2013.....	II-63
Tabel 2.69	Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013.....	II-64
Tabel 2.70	Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Nelayan Kab. Pidie Jaya Th. 2013.....	II-65
Tabel 2.71	Jumlah Armada Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013.....	II-65
Tabel 2.72	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013.....	II-65
Tabel 2.73	Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya	II-66
Tabel 2.74	Data Sektor Perdagangan Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Th. 2013.....	II-67

Tabel 2.75	Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah Kab.Pidie Jaya Th. 2009 s.d 2013	II-68
Tabel 2.76	Jenis Komoditi Kab. Pidie Jaya Tn. 2012.....	II-69
Tabel 2.77	Angka Konsumsi RT Perkapita Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya.....	II-71
Tabel 2.78	Indikator Penting Bidang Ketahanan Pangan Th. 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya.....	II-72
Tabel 2.79	Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Tahun 2014 Kab. Pidie Jaya.....	II-74
Tabel 3.1	Realisasi dan Target PAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2003.....	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya.....	III-4
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kab. Pidie Jaya Tahun 2009 s.d Th. 2013.....	III-5
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kab. Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2012.....	III-7
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013.....	III-12
Tabel 3.6	Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013.....	III-13
Tabel 3.7	Pengeluaran Priodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kab. Pidie Jaya.....	III-14
Tabel 3.8	Proyeksi tentang Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Pidie Jaya.....	III-15
Tabel 3.9	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kab. Pidie Jaya.....	III-16
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-9
Tabel 7.1	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Pencapaian Sasaran...	VII-3
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VIII-2
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	IX-3

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	2.1	Prosentase Pola Pemanfatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya	II-3
Grafik	2.2	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pidie Jaya	II-8
Grafik	2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) 2000, Kab. Pidie Jaya Tahun 2008 s.d 2012.....	II-9
Grafik	2.4	Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Provinsi dan Nasional.....	II-10
Grafik	2.5	Prosentase Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-11
Grafik	2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.....	II-13
Grafik	2.7	Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Pidie Jaya	II-14
Grafik	2.8	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.....	II-77

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar	2.1 Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya	II-2
Gambar	2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kab. Pidie Jaya	II-73
Gambar	2.3 Peta Kawasan Hutan Kab. Pidie Jaya.....	II-74
Gambar	2.4 Peta Pertambangan Kab. Pidie Jaya.....	II-75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan (*Sustainable*) maka perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dapat dilaksanakan, realistis dan memiliki batas waktu. Untuk mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas hendaklah mengacu pada sistem perencanaan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memerintahkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Secara teori dijelaskan bahwa perencanaan merupakan salah satu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan teori tersebut serta diperkuat dengan penjelasan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta dokumen perencanaan pendukung lainnya yang saling berkaitan antar satu dan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 76 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu daerah yang Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik pada tanggal 3

Februari 2014 berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) periode 2014-2019 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJMK tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yang memuat rencana strategis dan kebijakan SKPK sebagai penjabaran teknis dari Visi dan Misi Bupati terpilih selama 5 (lima) Tahun dengan menentukan program dan kegiatan pembangunan skala prioritas daerah.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program pembangunan lintas SKPK, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 ini merupakan dokumen publik, maka dalam penyusunannya harus bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) sehingga melahirkan dokumen perencanaan daerah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang lebih merata, berkeadilan, berkelanjutan, aspiratif dan menyentuh kebutuhan rakyat. Dokumen perencanaan tersebut, disusun dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah berdasarkan permasalahan-permasalahan dan rencana serta kebijakan strategis yang ditempuh sebagai solusi dalam menjawab permasalahan tersebut.

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa penyusunan RPJMK Pidie Jaya Periode 2014-2019 diawali dengan perumusan rancangan awal seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi ekonomi dan keuangan daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pemerintah sebelumnya. Disamping itu dengan mengelaborasi hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan Pemerintah Aceh, penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), perumusan permasalahan pembangunan, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, pelaksanaan forum konsultasi publik atau Musyawarah perencanaan pembangunan

a
a
9
(musrenbang), penyalarsan rencana program prioritas kabupaten dan
penetapan pagu indikatif, maka dokumen perencanaan daerah yang
dihasilkan akan lebih berkualitas.

a
a
t
a
n
n
1
1
1
1
1
Kerangka pembangunan yang tertuang dalam RPJMK merupakan hasil
telaahan dan analisis sehingga menjadi isu-isu strategis pembangunan yang
harus diimplementasikan secara teknis pada Rencana Strategis (Renstra)
SKPK, dan dilaksanakan melalui penentuan program dan kegiatan 5 (lima)
tahunan dengan skala prioritasnya. Selanjutnya Renstra SKPK dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK untuk periode pembangunan 1 (satu)
tahun yang direlevansikan dengan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah
Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya. Keseluruhan dokumen tersebut menjadi acuan
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (KU-APBK) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang
selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie Jaya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan

- Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
26. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
 27. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
 28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

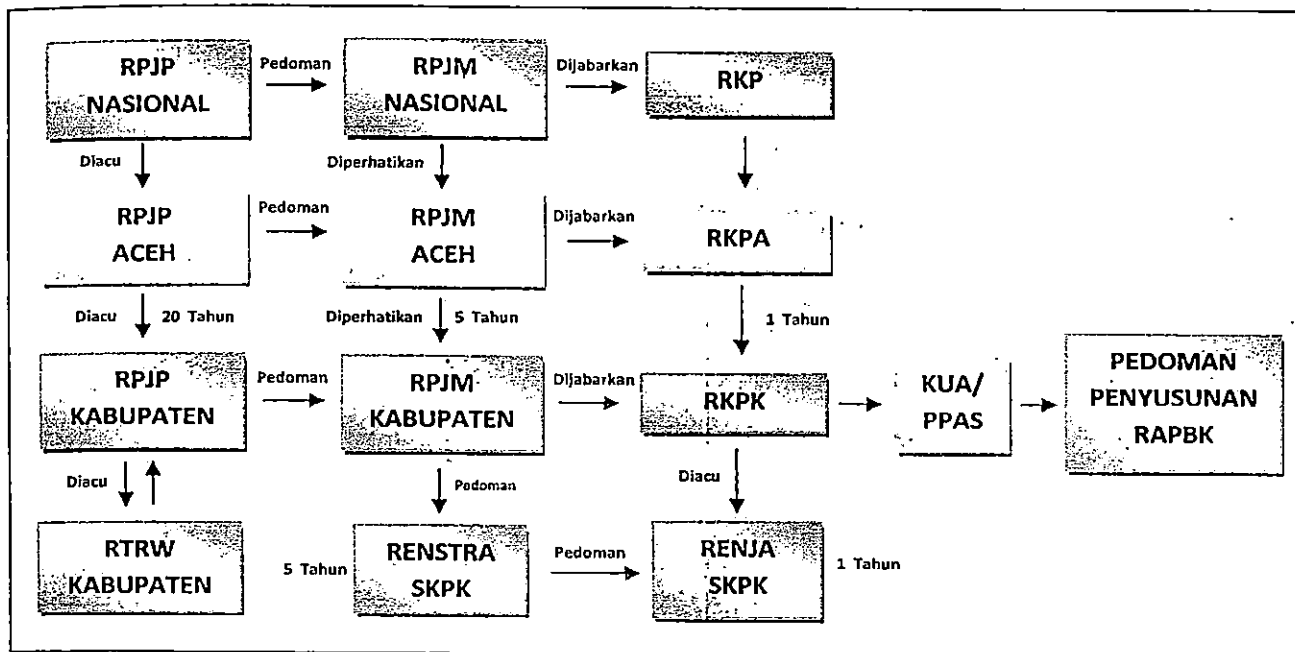
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pemerintah memiliki keterkaitan antar satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksud agar semua perencanaan yang telah disusun dapat saling berkaitan atau bersinergi antara satu dengan yang lainnya khususnya lintas sektoral baik perencanaan di Kabupaten, Provinsi, ataupun Pusat. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPK;
2. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPK, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya keterkaitan perencanaan tersebut diharapkan dapat terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujud pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Bappeda Kab.Pidie Jaya Tahun 2014

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RPJMK

Dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RPJMK, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan dokumen RPJMK, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMK, proses penyusunan RPJMK, kedudukan dokumen RPJMK, keterkaitan antar dokumen RPJMK dengan RKPK, Renstra SKPK, dan Renja SKPK.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkasan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMK, baik skala nasional, provinsi maupun kabupaten, Peraturan Daerah tentang perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RPJMK

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMK serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMK dan sasaran penyusunan dokumen RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi yang disajikan adalah yang relevan dengan isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi.

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menjelaskan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu yang diawali dengan pengantar analisis dan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

- 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK
- 3.1.2. Neraca Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang diawali dengan analisis pembiayaan yang mencakup:

- 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
- 3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

Bagian ini menjelaskan kerangka pendanaan yang diawali dengan analisis kerangka pendanaan yang mencakup:

- 3.3.1. Analisis Pengeluaran Priodik
- 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu
- 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab analisis isu-isu strategis merupakan analisis terpenting dokumen RPJMK karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya dijelaskan butir-butir penting dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi, Penjelasan Visi harus memiliki keterkaitan antara dokumen RPJPK Pidie Jaya, RPJP Aceh dan RPJP Nasional.

5.2. Misi, Rumusan Misi harus dapat menjelaskan poin penting dalam mencapai Visi.

5.2. Tujuan dan Sasaran, Dapat dijelaskan keterkaitan dengan elemen-elemen perencanaan dalam bentuk tabel.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini harus dapat dijelaskan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang penetapan kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Visi dan Misi Bupati pada periode masa jabatannya.

BAB IX INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bagian ini menjelaskan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPK terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPK serta penjelasan ketercapaian target indikator kinerja.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMK menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK dan RAPBK oleh kepala daerah pada periode berikutnya.

Sedangkan keidah pelaksanaan adalah RPJMK merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi kepala SKPK dalam menyusun Renstra SKPK.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara umum;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis pada setiap SKPK, acuan RKPK, dan arah pengembangan usaha bagi pelaku usaha serta harapan bagi setiap warga masyarakat Pidie Jaya.

B. Tujuan

Tujuan RPJMK Pidie Jaya 2014-2019 adalah :

1. Mendorong terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
3. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai target indikator utama daerah; dan
4. Tersedianya instrumen dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten hasil pemekaran yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, dengan didasari Surat Bakosurtanal Nomor SV.03.01/596E-PD/V/2008 perihal koreksi luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya, bahwa total luas wilayah Pidie Jaya adalah 1.162,84 km² yang terdiri dari luas wilayah darat 952,0 km² (95.210,99 Ha berdasarkan data GIS) dan luas wilayah laut 210,84 km². Terdiri dari 8 kecamatan, 34 kemukiman, dan 222 gampong (desa). Batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dirincikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie

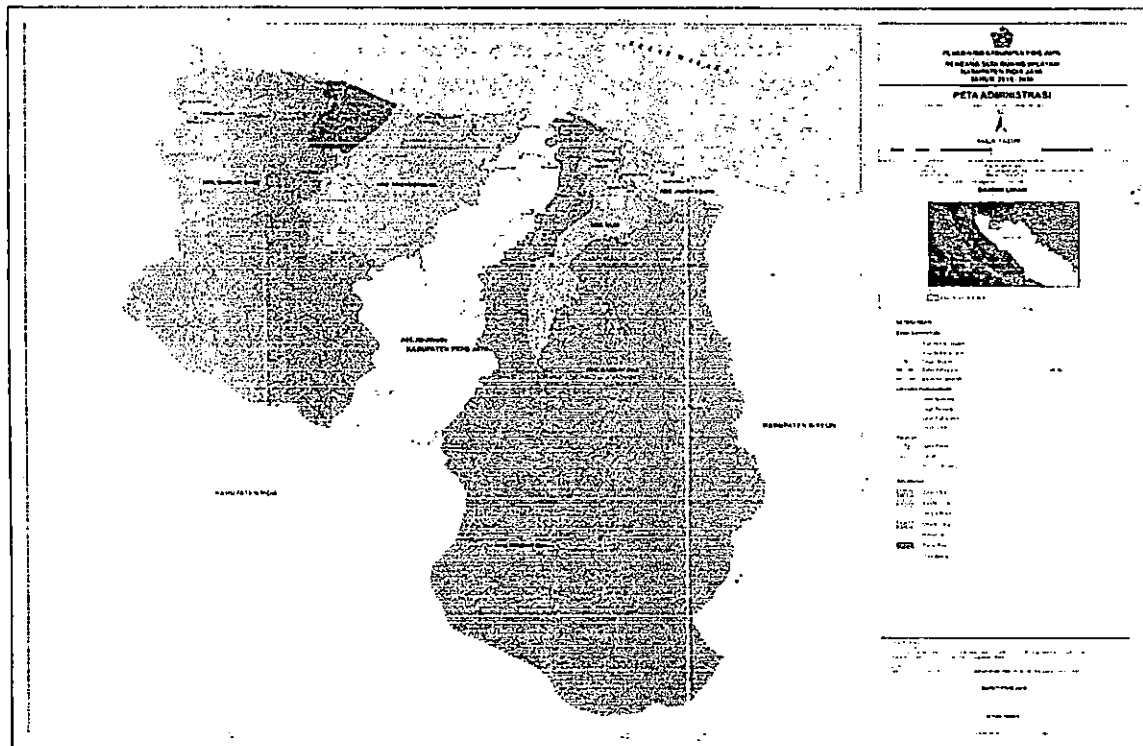
Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
			Gampong (desa)	Kemukiman
1	Bandar Baru	281,24	43	8
2	Panteraja	40,04	10	2
3	Trienggadeng	128,00	27	5
4	Meureudu	156,74	30	4
5	Meurah Dua	292,20	19	3
6	Ulim	60,73	30	5
7	Jangka Buya	29,63	18	2
8	Bandar Dua	174,26	45	5
	Jumlah	1.162,84	222	34

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Posisi Kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya sangat strategis karena berada pada lintas jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh – Medan. Hal ini memudahkan akses terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kecamatan tersebut. Kota Meureudu ditunjuk sebagai Ibu Kota Kabupaten yang posisi berada di tengah-tengah kecamatan lainnya.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya



Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

Pidie Jaya terletak pada posisi koordinat $04^{\circ} 06' - 04^{\circ} 07'$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 52' - 96^{\circ} 30'$ Bujur Timur. Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas 3 (tiga) karakteristik kawasan yang berbeda yaitu kawasan pantai, kawasan daratan, dan kawasan pegunungan. Kawasan pantai dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya air payau dan perikanan tangkap. Kawasan daratan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan air tawar, dan peternakan. Kawasan pegunungan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan tanaman perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

Adapun peruntukan untuk wilayah laut yang luasnya sebesar 210,84 km melalui pengembangan budidaya perikanan tangkap, tripang, pengembangan rumput laut dan potensi laut lainnya. Berdasarkan ketentuan penggunaan wilayah laut untuk kabupaten/kota berjarak 4 mil dari tepi pantai. Pengembangan sektor kelautan sangat memberikan harapan dan menjanjikan jika dikelola secara baik.

Pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 dapat terlihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya

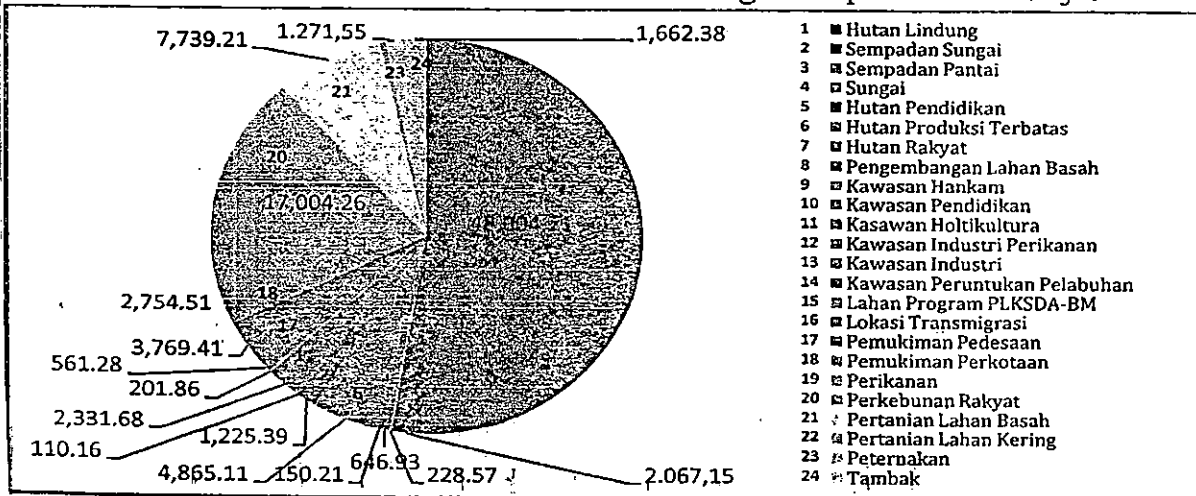
No	Peruntukan	Luas (Ha)	Prosentase
	Kawasan Lindung	50.946,86	53,51%
1	Hutan Lindung	48.004,21	50,42%
2	Sempadan Sungai	2.067,15	2,17%
3	Sempadan Pantai	228,57	0,24%
4	Sungai	646,93	0,68%
	Kawasan Budidaya	44.264,10	46,49%
5	Hutan Pendidikan	150,21	0,16%
6	Hutan Produksi Terbatas	4.865,11	5,11%
7	Hutan Rakyat	1.225,39	1,29%
8	Pengembangan Lahan Basah	75,30	0,08%
9	Kawasan Hankam	19,94	0,02%
10	Kawasan Pendidikan	110,16	0,12%
11	Kawasan Holtikultura	2.331,68	2,45%
12	Kawasan Industri Perikanan	19,63	0,02%
13	Kawasan Industri	91,27	0,10%
14	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	21,05	0,02%
15	Lahan Program PLKSDA-BM	201,86	0,21%
16	Lokasi Transmigrasi	561,28	0,59%
17	Pemukiman Pedesaan	3.769,41	3,96%
18	Pemukiman Perkotaan	2.754,51	2,89%
19	Perikanan	24,34	0,03%
20	Perkebunan Rakyat	17.004,26	17,86%
21	Pertanian Lahan Basah	7.739,21	8,13%
22	Pertanian Lahan Kering	365,56	0,38%
23	Peternakan	1.271,55	1,34%
24	Tambak	1.662,38	1,75%
	Total	95.210,96	100,00

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034.

Lebih jelas prosentase pembangian pola pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam grafik 2.1 sebagai berikut:

Grafik 2.1

Prosentase Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya



Grafik 2.1 menjelaskan bahwa pola pemanfaatan ruang Kabupaten Pidie Jaya yang pertama didominasi oleh kawasan lindung seluas 53,51% atau 50.946,86 hektar sesuai dengan tata ruang nasional yang tidak dapat diganggu keberadaannya. Selanjutnya diikuti oleh kawasan budidaya seluas 46,49% atau 44.264,10 hektar.

2.1.1.1 Kondisi Hidrologi dan Curah Hujan

Kabupaten Pidie Jaya beriklim tropis basah dengan temperatur berkisar 19° – 35°C . Berdasarkan data curah hujan SMPK BPN Meureudu, wilayah Pidie Jaya memiliki curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari sedangkan curah hujan normal terjadi pada bulan Oktober sampai Desember. Tingginya curah hujan terkadang mengakibatkan terjadinya banjir, sehingga Kabupaten Pidie Jaya menetapkan beberapa tempat sebagai daerah rawan bencana seperti Krueng Lueng Putu Bandar Baru, Krueng Ulim, Krueng Pantan Tringgadeng, Krueng Meureudu dan Krueng Jeulanga Bandar Dua.

Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya yang mengacu kepada Permen PU No. 11 A/PRT/M/2006 tentang Pembagian Wilayah Sungai di Indoensia maka terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, meliputi Sungai atau Krueng Babah Awi, Krueng Bubon, dan Krueng Peusangan. Namun demikian, Masyarakat Pidie Jaya lebih mengenal 3 (tiga) sungai besar yang melintas dalam wilayahnya seperti Krueng Meureudu, Krueng Ulim, dan Krueng Beuracan.

Hidrologi Kabupaten Pidie Jaya memiliki konservasi air yang cukup luas. Hal tersebut karena terdapat di areal hutan lindung atau hutan produksi yang berada pada sisi selatan atau pegunungan Bukit Barisan. Areal pertanian tanaman pangan atau persawahan terletak pada bagian lembah sebelah utara dimana daerah yang bertopografi datar. Areal perkebunan terletak di kawasan perbukitan baik di dataran rendah atau dataran tinggi. Dalam hal ini peran hutan menjadi sangat sentral untuk memberikan sumber air bagi wilayah pemukiman dan pertanian.

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2013, jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 sebesar 157.383 jiwa dengan total keluarga sebanyak 42.491 KK. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,46% dengan tingkat kepadatan 135 jiwa/km². Jumlah penduduk perempuan

mencapai 79.278 jiwa atau 50,6% dan penduduk laki-laki 78.105 jiwa atau 49,4%. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya
dari Tahun 2009 s.d 2013

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa/tahun)					Kepadatan (jiwa/km ²) Th 2013
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Bandar Baru	34.188	34.747	35.088	35.612	36.480	129,82
2	Panteraja	7.886	8.177	8.544	8.898	9.063	226,58
3	Trienggadeng	21.785	22.548	23.082	23.418	24.049	187,88
4	Meureudu	21.402	22.196	22.468	22.710	23.117	148,19
5	Meurah Dua	11.146	11.371	11.733	11.694	12.043	41,24
6	Ulim	14.443	14.859	15.475	15.542	15.969	266,15
7	Jangka Buya	4.242	9.456	4.417	9.585	9.845	339,48
8	Bandar Dua	25.360	25.776	25.572	26.124	26.817	154,12
	Jumlah	140.452	149.217	151.379	153.583	157.383	135,44

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.

Penduduk Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh suku Aceh yaitu mencapai 97% dan selebihnya adalah suku lain seperti Jawa, Batak, Sunda dan lain-lain. Mayoritas penduduk Kabupaten Pidie Jaya memeluk agama Islam (Muslim). Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan akademi/tinggi berjumlah 110.325 orang atau 70,10%. Sedangkan jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau belum bersekolah mencapai 47.098 orang atau 29,90% dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya.

Berikut Tabel 2.4 adalah jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktor/S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S2	96	47	143
3	Sarjana/S1	2.204	2.495	4.699
4	Diploma 3	885	1.533	2.418
5	Diploma 2 /Diploma 1	544	1.467	2011
6	SMU / SMK / Aliyah	20.051	15.642	35.693
7	SMP / Tsanawiyah	16.749	16.182	32.931
8	SD / Ibtidaiyah	14.527	17.903	32.430
9	Tidak Tamat SD	10.130	10.422	20.552
10	Belum / Tidak Sekolah	12.919	13.587	26.506
	Total	78.105	79.278	157.383

Sumber: Disdukcapil Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada sektor pertanian dan perkebunan, kemudian diikuti dengan wiraswasta,

perdagangan dan nelayan serta sektor lainnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menempati porsi yang lumayan besar yaitu 9,12% atau sekitar 6.372 jiwa. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013, jumlah penduduk Pidie Jaya yang berkerja mencapai 54.586 jiwa atau 35,54%, dan sekitar 14.727 jiwa merupakan pekerja tidak tetap.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Berbagai indikator penting guna melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan.

a. Pertumbuhan PDRB

Sejalan dengan pertambahan usia Kabupaten Pidie Jaya yang telah memasuki tahun ke-7, perkembangan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat terlihat dalam pertumbuhan PDRB kabupaten setiap tahunnya, baik dihitung berdasarkan Harga Konstan (Hk) ataupun dengan Harga Berlaku (Hb). Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	351.173,59	56,7	359.200,54	55,1	367.350,02	53,8	375.791,00	52,2
2	Pertambangan & Penggalian	4.263,49	0,7	4.508,16	0,7	4.719,03	0,7	4.806,34	0,7
3	Industri Pengolahan	25.223,34	4,1	25.374,78	3,9	25.660,98	3,8	26.118,39	3,6
4	Listrik, Gas & Air Bersih	2.628,61	0,4	2.998,73	0,5	3.379,46	0,5	3.790,65	0,5
5	Konstruksi	23.991,63	3,9	26.856,74	4,1	29.138,90	4,3	32.045,45	4,5
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	70.816,55	11,4	81.782,02	12,5	90.524,39	13,3	99.844,11	13,9
7	Pengangkutan & Komunikasi	22.880,28	3,7	24.837,66	3,8	26.051,57	3,8	27.770,29	3,9
8	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	7.356,05	1,2	7.732,12	1,2	8.190,25	1,2	8.711,09	1,2
9	Jasa-Jasa	110.692,08	17,9	119.030,39	18,3	127.383,74	18,7	137.699,87	19,2
	PDRB	619.025,61	100	652.325,14	100	682.398,35	100	716.577,19	100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2013.

PDRB Kabupaten Pidie Jaya menurut lapangan usaha tahun 2012 yang dihitung dengan Harga Konstan (PDRB Rill) tahun 2000 mencapai 716.577,19 (juta). Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,01% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar 682.398,35 (juta). Bila dilihat per sektor maka penyumbang terbesar PDRB kabupaten ada pada

mentara itu, tingginya sektor pertanian yang menjadi keunggulan daerah yaitu sebesar 375.791,00 atau sebesar 9,12% dari total PDRB tahun 2012. Urutan kedua diikuti sektor jasa-jasa sebesar 137.699,87 atau 19,2% dan pada urutan ketiga sektor perdagangan, hotel, & restoran sebesar 99.844,11 (juta) atau 13,9%.

Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan PDRB tertinggi pada sektor Listrik Gas & Air Bersih yaitu sebesar 12,17%. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran menempati urutan kedua yaitu 10,30%. Urutan ketiga yaitu sektor Konstruksi yaitu 9,97%. Sedangkan pada sektor-sektor lain rata-rata pertumbuhannya berkisar antara 1,5 – 8%.

Lebih lanjut PDRB Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 yang dihitung berdasarkan harga berlaku (PDRB Nominal) dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

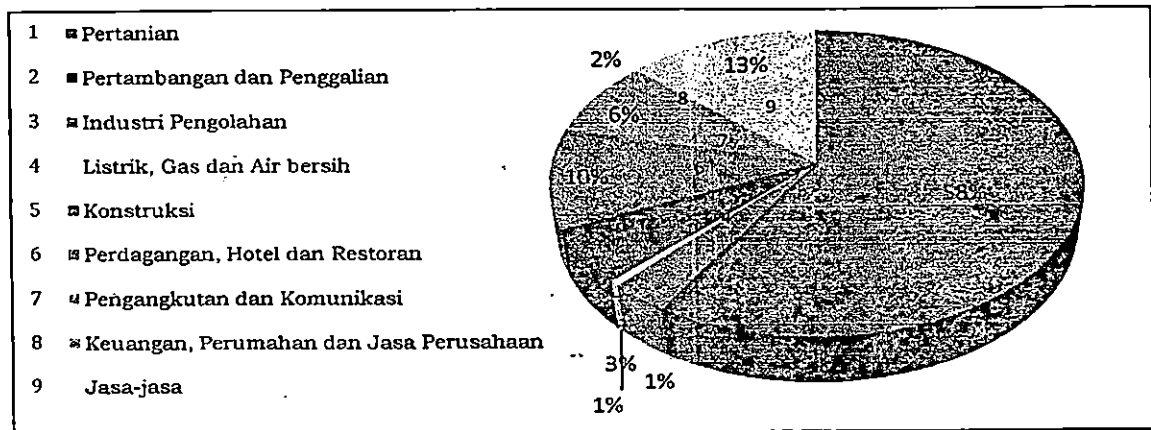
Tabel 2.6
Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Sektor	2009		2010		2011		2012	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pertanian	688.982,86	61,6	744.722,83	60,2	819.439,32	59,2	896.568,44	58,1
Pertambangan & Penggalian	7.570,88	0,7	8.068,83	0,7	8.959,85	0,7	9.634,27	0,6
Industri Pengolahan	41.860,71	3,7	43.675,63	3,5	46.632,45	3,4	49.933,30	3,2
Listrik, Gas & Air Bersih	4.570,28	0,4	5.433,33	0,4	6.551,12	0,5	7.818,98	0,5
Konstruksi	52.354,36	4,7	63.352,72	5,1	74.910,69	5,4	89.166,59	5,8
Perdagangan, Hotel, & Restoran	105.209,44	9,4	122.596,73	10,0	141.531,14	10,2	162.209,04	10,5
Pengangkutan & Komunikasi	57.955,45	5,2	71.034,04	5,7	82.937,90	6,0	97.476,04	1,8
Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	18.039,15	1,6	20.335,77	1,6	23.385,20	1,7	27.233,85	1,8
Jasa-Jasa	142.462,56	12,7	157.680,54	12,8	179.015,51	12,9	204.255,09	13,2
PDRB	1.119.005,68	100	1.236.900,41	100	1.383.363,18	100	1.544.295,61	100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2013.

PDRB Kabupaten Pidie Jaya yang dihitung berdasarkan Harga Berlaku (PDRB Nominal) tahun 2012 dimana jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 1.544.295,61 (juta) atau meningkat sebesar 11,6% dari tahun 2011 yang berjumlah 1.383.363,18 (juta). Sektor yang paling menonjol kontribusinya terhadap PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang berjumlah 896.568,44 (juta) atau 58,1% dari total PDRB kabupaten tahun 2012. Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel, & restoran dimana masing-masing memberi kontribusi 13,2% dan 10,5%. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Grafik 2.2 sebagai berikut:

Grafik 2.2
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012



Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2012 kombinasi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Pidie Jaya

No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	61,6	56,7	60,2	55,1	59,2	53,8	58,1	52,2
2	Pertambangan & Penggalian	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7
3	Industri Pengolahan	3,7	4,1	3,5	3,9	3,4	3,8	3,2	3,6
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Konstruksi	4,7	3,9	5,1	4,1	5,4	4,3	5,8	4,5
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	9,4	11,4	10,0	12,5	10,2	13,3	10,5	13,9
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,2	3,7	5,7	3,8	6,0	3,8	1,8	3,9
8	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	1,6	1,2	1,6	1,2	1,7	1,2	1,8	1,2
9	Jasa-Jasa	12,7	17,9	12,8	18,3	12,9	18,7	13,2	19,2
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

erlaku (ADHB)
1 2012

Tabel 2.8

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2009 s.d 2012

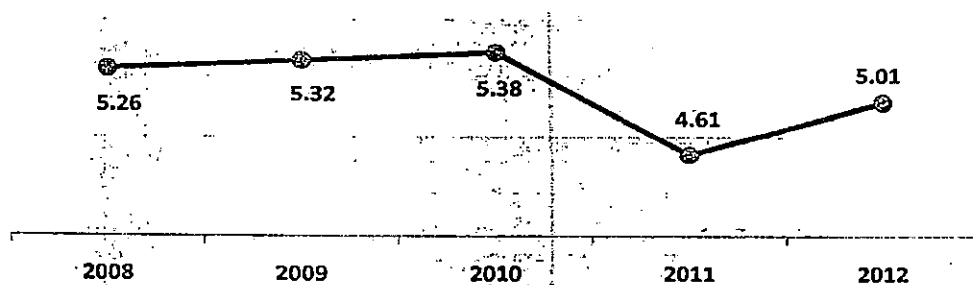
Sektor	Pertumbuhan	
	Hb	Hk
	%	%
Pertanian	-3,5	-4,5
Pertambangan & Penggalian	-0,1	0
Industri Pengolahan	-0,5	-0,5
Listrik, Gas & Air Bersih	0,1	0,1
Konstruksi	1,1	0,6
Perdagangan, Hotel, & Restoran	1,1	2,5
Pengangkutan & Komunikasi	-3,4	0,2
Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	0,2	0
Jasa-Jasa	0,5	1,3
PDRB	-4,5	-0,3

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan, secara umum pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang positif dan meningkat sebesar 5,01%. Pada tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah 4,61%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 s.d 2012 dalam prosentase dapat dilihat Grafik 2.3 sebagai berikut:

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008- 2012 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

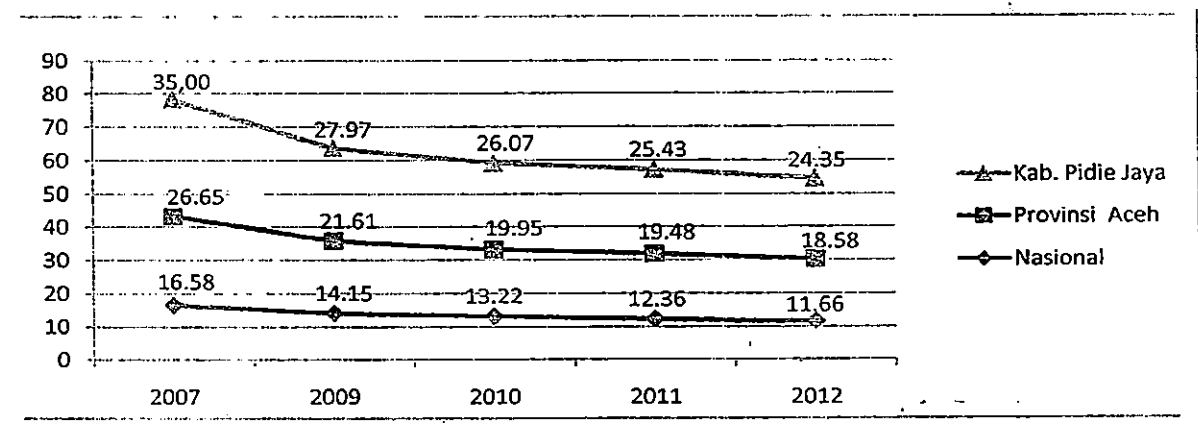
Indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi lainnya dapat ditunjukkan dengan perkiraan Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya yang sebesar 0,3 pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong rendah karena berada di bawah 0,5.

Kabupaten Pidie Jaya termasuk salah satu kategori daerah tertinggal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kemiskinan dan fasilitas infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Ada beberapa indikator utama yang menjadi dasar penilaian tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya oleh BPS diantaranya adalah pendapatan masyarakat yang masih rendah (*< Rp 10.000 per hari*), banyaknya rumah yang tidak layak huni, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih minim.

Berdasarkan data BPS melalui pengolahan dari Tim TNP2K Tahun 2009, Indikator kinerja kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya berada pada 27,97%. Pada Tahun 2012 angka kemiskinan turun menjadi 24,35%. Meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun Angka kemiskinan Pidie Jaya masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 18,58% dan Nasional sebesar 11,66%.

Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya secara umum relevan dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tingkat Propinsi Aceh dan Nasional. Grafik relevansi tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Propinsi Aceh dan Nasional seperti terlihat pada Grafik 2.4 sebagai berikut:

Grafik 2.4
Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Propinsi dan Nasional



Sumber: TKPK Pidie Jaya Tahun 2013

Berdasarkan data kemiskinan kecamatan yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013, kecamatan yang penduduknya paling miskin terdapat dikecamatan Bandar Baru, Bandar Dua dan Trienggadeng. Tabel 2.9 merupakan jumlah KK Miskin Pidie Jaya per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah KK Miskin Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

No.	Uraian	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1.	Bandar Baru	4.948	24,67
2.	Panteraja	854	4,26
3.	Trienggadeng	2.246	11,20
4.	Meureudu	2.646	13,19
5.	Meurah Dua	1.623	8,09
6.	Ulim	2.356	11,75
7.	Jangka Buya	1.769	8,82
8.	Bandar Dua	3.614	18,02
	Jumlah	20.056	100,00

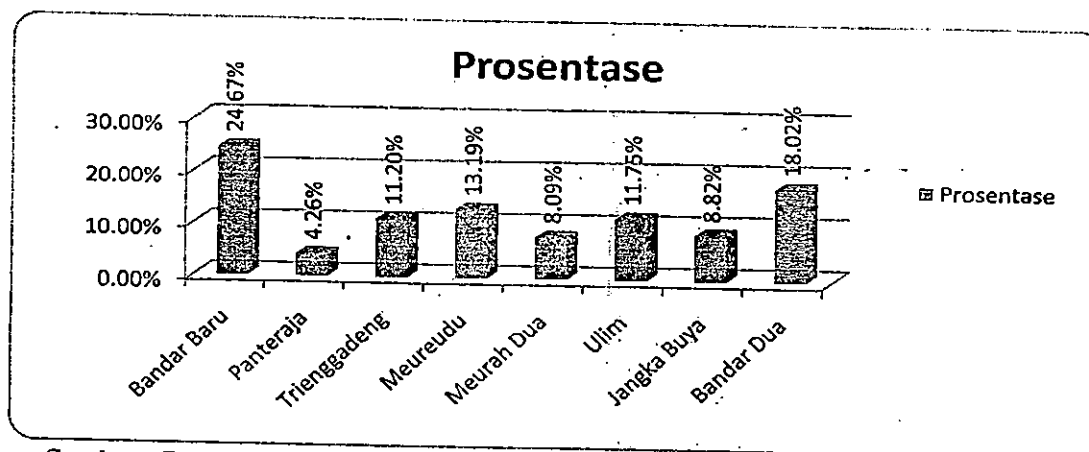
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sebagai daerah yang penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Pidie Jaya, Bandar Baru memiliki penduduk 36.480 jiwa yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Rata-rata penghasilan masyarakat 200 ribu s.d 1 juta per bulan. KK miskin rata-rata berusia masih produktif yakni berkisar antara 20-40 tahun dengan tanggungan dalam keluarga 3-6 orang.

Begitu juga dengan Kecamatan Bandar Dua yang tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah penduduk kecamatan Bandar Baru 26.817 jiwa, mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian yang mencapai 58,28%. Rata-rata pendapatan berkisar antara 240 ribu s.d 1 juta per bulan. Tingkat pendidikan KK miskin rata-rata hanya menempuh pendidikan dasar (SD).

Grafik prosentase penduduk miskin per kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Grafik 2.5 sebagai berikut:

Grafik 2.5
Prosentase Penduduk Miskin
Per Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013



Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya 2014

b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya saat ini mengikuti laju inflasi kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe. Prediksi laju inflasi Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan berkisar 3,49% (antara 2,89-4,31) pada tahun 2013. Secara umum penyebab utama inflasi Aceh berada pada kelompok bahan makanan dan diikuti oleh kelompok kesehatan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik dan kelompok bahan bakar. Tabel 2.10 berikut merupakan laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe yang menjadi acuan inflasi Kabupaten Pidie Jaya adalah:

Tabel 2.10
Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2009 s.d 2013
Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rerata Pertumbuhan
Kota Banda Aceh	3,50	4,64	3,32	2,17	6,39	2,89
Kota Lhokseumawe	3,96	7,19	3,55	3,37	8,27	4,31
Kabupaten Pidie Jaya*	3,73	5,92	3,44	3,01	7,22	3,49

Sumber: BPS Aceh dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2013. (Data diolah)

*Angka prediksi antara

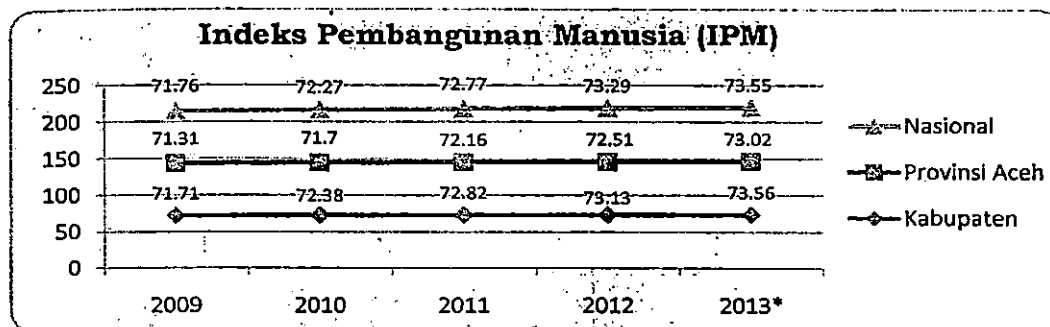
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Capaian pembangunan yang menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat sangat tergantung pada indikator-indikator seperti Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan Yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan, dan Rasio Penduduk yang Bekerja.

Berdasarkan capaian kinerja yang harus terfokus terhadap pembangunan kesejahteraan sosial maka Kabupaten Pidie Jaya telah berupaya menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari indikator capaian pada tahun 2012 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya mencapai 73,13 dan diperkirakan akan meningkat hingga 73,56 pada tahun 2013. Pada Tahun 2012, Angka Melek Huruf 95,48 dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8,69 tahun. Angka Usia Harapan Hidup 69,36 tahun dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi 98,55.

Grafik 2.6 merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional adalah sebagai berikut:

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh



Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2013
*Angka perkiraan sementara

Grafik 2.6 menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013 sudah baik yaitu berada di atas rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional.

a. Angka Melek Huruf

Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya diukur dengan tingkat capaian IPM. Tiga indikator utama yang harus dilihat yaitu kesehatan, pendidikan, daya beli atau pendapatan masyarakat. Capaian di bidang pendidikan dapat diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sejauh mana peran pemerintah membuka akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, membangun sarana dan prasarana pendidikan dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan capaian indikator utama di bidang pendidikan. Tabel 2.11 merupakan perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	83.701	84.047	84.570	85.162	85.532
2	Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas	88.826	88.986	89.198	89.215	89.819
3	Angka Melek Huruf	94,23	94,45	95,48	95,48	95,49

Sumber: Bappeda dan Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tahun 2013.
* Angka perkiraan sementara

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 dimana penduduk menghabiskan waktu untuk bersekolah berkisar 8,69 tahun, lebih baik dari tahun 2011 yaitu 8,68 tahun. Angka tahun 2012 tersebut masih dibawah RLS Provinsi Aceh yaitu 8,93 tahun. Sedangkan untuk RLS Nasional berada pada 8,36 tahun. Pada tahun 2013 diperkirakan RLS Pidie Jaya terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 8,72 tahun.

Tabel 2.12 merupakan perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya

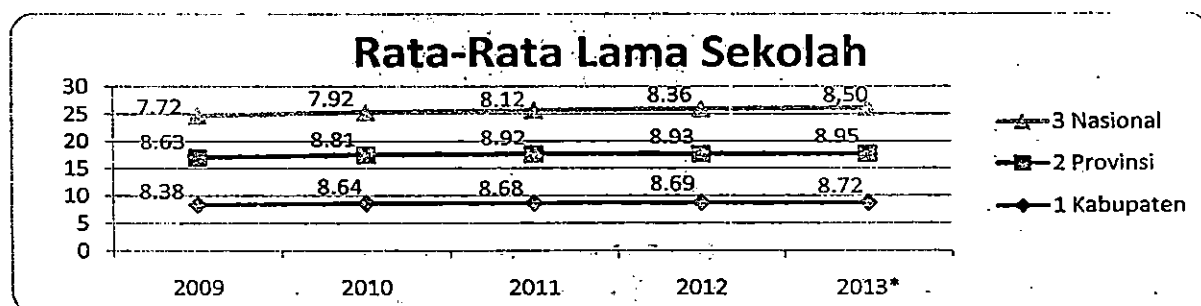
No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Kabupaten	8,38	8,64	8,68	8,69	8,72
2	Provinsi Aceh	8,63	8,81	8,92	8,93	8,95
3	Nasional	7,72	7,92	8,12	8,36	8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013.

* Angka perkiraan sementara

Secara Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten, rata-rata lama sekolah sejak 4 (empat) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.7 sebagai berikut:

Grafik 2.7
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2009 s.d 2013
Kabupaten Pidie Jaya



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni budaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama ini bertujuan untuk memelihara budaya warisan leluhur yang begitu kaya, disamping itu untuk memberikan wawasan budaya kepada generasi muda. Derasnya arus informasi yang berdampak negatif

akibat budaya global, yang sedikit demi sedikit akan merusak tatanan budaya masyarakat yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki keragaman budaya dari berbagai etnik penduduk yang mendiaminya. Namun sampai saat ini potensi tersebut relatif belum dapat dikembangkan secara maksimal sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Tantangan kedepan diperlukan kegiatan yang bisa mensinergikan antara potensi keragaman budaya tersebut dengan keberadaan Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu tempat tujuan wisata. Momentum sebagai jalur perdagangan dan daerah transit harus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni dan keragaman budaya tersebut. Selain itu, perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan budaya dan kesenian, diperlukan dukungan yang kuat melalui berbagai promosi. Sedangkan pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan agar lebih bisa menonjolkan ciri dan Landmark Pidie Jaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Terkait pengembangan aspek pelayanan umum di bidang budaya tersebut, Kabupaten Pidie Jaya juga tercatat pernah menjadi juara harapan pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-V Tahun 2009 yang lalu. Pengembangan seni dan budaya juga tidak terlepas dari keberadaan sanggar-sanggar (grup) kesenian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Jenis kegiatan yang dikembangkan oleh sanggar-sanggar kesenian tersebut juga terbagi pada jenis kegiatan Tradisional (TR) dan Kreasi Baru (KB). Jumlah sanggar seni budaya per kecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Sanggar Seni Budaya dalam Kabupaten Pidie Jaya

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kesenian
1.	Bandar Baru	4	Seudati, Saman, Gayo, Likok Pulo, dan Tarian Kreasi.
2.	Panteraja	3	Rebana dan Tarian Kreasi
3.	Trienggadeng	9	Tari Bubei, Jeu-ei, Uram Trieng, Seudati, Rabbana, Drama Operet, Geudeu-Geudeu, dan Kreasi Baru.
4.	Meureudu	7	Rebana, Seudati, Rapa' ie, Biola Aceh, Rapa' ie, Bala Bari, Geudeu-Geudeu, dan Tarian Kreasi Baru.
5.	Meurah Dua	4	Rapa' ie Geleng, Likok Pulo, Meureukon, Seudati, Saman, Laweut, dan Kreasi Baru.
6.	Ulim	5	Rapa' ie, Rapa' ie Dadoh, Rebana, dan Kreasi Baru.
7.	Jangka Buya	1	Rebana
8.	Bandar Dua	5	Rapa' ie, Rebana, Meureukon, Rabani Wahid, dan Tarian Kreasi.

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Jenis kesenian budaya yang paling digemari masyarakat Pidie Jaya adalah kesenian Rapa' ie, Rebana, dan Meureukon disamping kesenian-kesenian lain yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat seperti tarian Seudati dan Geudeu-Geudeu. Kesenian Geudeu-Geudeu merupakan kesenian warisan asli masyarakat Pidie Jaya. Biasanya kesenian adu fisik ini dilakukan pemuda setelah panen padi. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selalu memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk beratraksi menampilkan kesenian Geudeu-Geudeu pada kegiatan-kegiatan besar kebudayaan di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Pidie Jaya dengan menggalakkan program-program lain seperti penganugrahan/penghargaan kepada pelaku Seni Budaya Daerah, Festival Pidie Jaya, Pembinaan Gampong Budaya, dan Program Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah. Pelaksanaan kegiatan budaya tersebut diatas juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisata baik dari dalam daerah ataupun luar daerah Pidie Jaya.

Disamping kegiatan seni dan budaya, pengembangan keolahragaan juga sangat diperlukan dalam mengikat persaudaraan dan kebersamaan bagi pemuda. Pengembangan ini dilakukan melalui pembinaan terhadap generasi muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olah raga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Lebih dari 24 (dua puluh empat) cabang olahraga telah dilakukan pembinaan sesuai dengan tanggungjawab KONI Kabupaten Pidie Jaya untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten. Namun demikian banyak cabang olah raga yang masih minim fasilitas dan sarana pendukung sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan olah raga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan agar persepakbolaan Kabupaten Pidie Jaya lebih berprestasi baik antar Kabupaten ataupun pada tingkat Nasional.

Kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2009 s.d 2010 masih tergolong minim. Hal tersebut terlihat dari jumlah fasilitas olahraga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Sejak tahun 2010 s.d 2013, pemerintah telah membangun 44 lapangan bola volly di 8 (delapan) kecamatan dan 2 (dua) lapangan bola kaki yang berada di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Jangka Buya.

Adapun prestasi olahraga yang sudah diraih pada tahun 2010 adalah menduduki peringkat 17 dari 23 kabupaten/kota pada Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA) ke-XI yang berlangsung di Aceh Tamiang dengan raihan medali 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Pada POPDA ke-XII Tahun 2012 yang berlangsung di Kota Banda Aceh, prestasi yang diraih oleh Kabupaten Pidie Jaya meningkat dengan menduduki peringkat 9 dengan perolehan medali 2 emas, 3 perak, dan 7 perunggu.

Pada kegiatan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) ke XI Tahun 2010 yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen, bagi Kabupaten Pidie Jaya merupakan keikutsertaan yang pertama kali. Kontingen Kabupaten Pidie Jaya menduduki peringkat 11 (sebelas) dari 23 kabupaten/kota, dengan mengirimkan 22 cabang olahraga dengan raihan medali 14 emas, 14 perak, dan 16 perunggu.

Dalam pembinaan generasi muda yang berakhlakulkarimah serta jauh dari Narkoba, pemerintah daerah memberikan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan Narkoba dan penguatan pemahaman keagamaan serta pembentukan akhlak kepada generasi muda. Hal tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah, tempat peribadatan dan melalui organisasi kepemudaan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupten Pidie Jaya, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari layanan urusan wajib pembangunan guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, berkreasi, sehat dan berprestasi. Beberapa indikator yang dapat mengukur sejauh mana pembangunan pada layanan urusan wajib dapat dilihat sebagai berikut:

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS), indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkungan pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah

penduduk usia pendidikan dasar. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	<i>SD/MI</i>					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	16.231	16.411	16.667	16.803	16.803
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.672	16.872	17.092	17.155	17.155
1.3	APS SD/MI (%)	97,35	97,28	97,53	97,65	97,65
2	<i>SMP/MTs</i>					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	6.891	7.008	7.092	7.112	7.112
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.152	8.292	8.315	8.390	8.390
2.3	APS SMP/MTs (%)	84,53	84,51	85,29	90,66	90,66
3	<i>SMA/SMK</i>					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	5.721	5.819	6.045	6.423	6.441
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.743	7.851	7.942	8.290	8.263
3.3	APS SMA/SMK (%)	73,89	74,12	76,11	77,48	77,95

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014.

Tabel 2.13 dapat dijelaskana bahwa APS Kabupaten Pidie Jaya pada kelompok usia pendidikan dasar dan menengah (*SD/MI dan SMP/MTs*) tahun 2012 rata-rata 97,65% untuk tingkat SD/MI dan 90,66% untuk tingkat SMP/MTs. Untuk APM SD/MI rata-rata 90,22% dan APK sebesar 104,28%. Sedangkan untuk APM SMP/MTs rata-rata 72,73% dan APK sebesar 99,46%. Pada tingkat pendidikan menengah atas (*SMA/SMK*), APM tahun 2012 yaitu 58,34% sedangkan APK 79,51%.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, indikator ini menunjukkan bahwa bagaimana rasio jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini dimaksud untuk mengidentifikasi kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013*
1	<i>SD/MI</i>					
1.1	Jumlah sekolah	114	114	114	114	114
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.672	16.872	17.092	17.155	17.155
1.3	Rasio	1 : 146	1 : 148	1 : 150	1 : 150	1 : 150
2	<i>SMP/MTs</i>					
2.1	Jumlah sekolah	33	33	33	33	33
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.152	8.292	8.315	8.390	8.390
2.3	Rasio	1 : 247	1 : 251	1 : 252	1 : 254	1 : 254
2	<i>SMA/MA/SMK</i>					
2.1	Jumlah sekolah	16	18	18	20	21
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.743	7.851	7.942	8.290	8.263
2.3	Rasio	1:478	1:436	1:441	1 : 488	1 : 393

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid, indikator ini menjelaskan bahwa jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk 1 (satu) guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013*
1	<i>SD/MI</i>					
1.1	Jumlah guru	1.210	1.210	1.223	1.223	1.223
1.2	Jumlah murid	17.001	17.111	19.671	19.850	19.850
1.3	Rasio	1 : 14	1 : 14	1 : 16	1 : 16	1 : 16
2	<i>SMP/MTs</i>					
2.1	Jumlah guru	769	769	772	772	772
2.2	Jumlah murid	7.991	8.152	12.352	13.421	13.421
2.3	Rasio	1 : 10	1 : 11	1 : 10	1 : 10	1 : 11

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014.

* Angka perkiraan sementara

Jumlah guru yang (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) hingga tahun 2012 berjumlah 4.797 guru. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.394 guru atau 70,75 persen memiliki kualifikasi S1, sedangkan guru PNS yang sudah bersertifikasi sebanyak 1.603 guru atau 34,54 persen.

d. Hasil Ujian Nasional

Berdasarkan perkembangan keberhasilan siswa jika dilihat dari tingkat kelulusan menunjukkan adanya perbedaan dari tahun ketahun. Untuk tingkat SD/MI rata-rata kelulusan tertinggi terjadi tahun 2012 mencapai 7.89 dengan angka kelulusan tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 99,46 persen. Untuk tingkat SMP/MTs nilai-rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2009 hingga mencapai 8,06 dengan tingkat kelulusan tertinggi terjadi pada tahun 2012 hingga mencapai 99,55 persen. Adapun pada tingkat SMA/MA nilai rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2012 hingga mencapai 7,77, sedangkan angka kelulusan tertinggi juga terjadi pada tahun 2012 dengan capaian sebesar 99,29 persen. Secara umum tingkat kelulusan dan rata-rata kelulusan dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17
Nilai rata-rata dan Angka Kelulusan Ujian Nasional Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013 Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenjang Pendidikan	Unsur penilaian	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	Nilai Rata-rata	7,71	7,16	6,97	7,89	7,34
		Angka Kelulusan	98,99	99,06	99,46	99,34	99,27
2	SMP/MTs	Nilai Rata-rata	8,06	7,72	7,34	7,45	6,39
		Angka Kelulusan	98,79	94,34	99,01	99,55	94,61
3	SMA/MA	Nilai Rata-rata	7,16	7,27	7,28	7,77	7,34
		Angka Kelulusan	99,14	80,60	97,86	99,29	94,68
4	SMK	Nilai Rata-rata	-	-	4,14	6,45	6,58
		Angka Kelulusan	-	-	82,76	92,00	97,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya 2014

2.3.1.2. Pendidikan Dayah

Seiring dengan peningkatan kualitas umat dan kualitas penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, maka lembaga pendidikan dayah terus berkembang menjadi sistem pendidikan alternatif bagi generasi muda. Banyak lembaga pendidikan dayah yang terus berbenah dalam rangka menjamin mutu lulusannya di hampir semua kecamatan. Ada beberapa lembaga pendidikan dayah sudah eksis sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dengan mutu berkualitas seperti Dayah Jeumala Amal di Kecamatan Bandar Baru dan Darul Munawarah Kuta Krueng di Bandar Dua. Umumnya lembaga pendidikan dayah di Kabupaten Pidie Jaya menganut model pembelajaran *Salafiyah* sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh.

Perkembangan lembaga pendidikan dayah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan diikuti dengan perbaikan mutu dan prasarannya.

Pada tahun 2013, Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki 35 Dayah yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, dengan akreditasi berbeda yaitu 6 dayah berakreditasi A, 11 dayah berakreditasi C, dan 18 dayah berakreditasi D sebagaimana pada Tabel 2.18. Sedangkan untuk dayah yang non akreditasi atau non tipe dikategorikan sebagai balai pengajian sebanyak 208 unit. Jumlah santri ngaji sebanyak 18.321 orang dan didukung oleh 1.516 guru pengajian. Sedangkan jumlah santri dayah seluruhnya adalah 8.438 orang yang terdiri dari 4.100 orang merupakan santri yang menetap di dayah dan 4.338 orang merupakan santri yang tidak menetap di dayah. Untuk mendukung penyelenggaraan dan efektifitas dayah dibantu oleh 830 orang Tungku/Staf Pengajar.

Jumlah dayah terbanyak berada di kecamatan Bandar Dua sebanyak 13 unit dayah dengan jumlah santri 3.372 orang. Adapun untuk balai pengajian terbanyak berada di kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Bandar Dua masing-masing 50 unit balai pengajian dengan jumlah santri ngaji terbanyak berada di kecamatan Bandar Dua berjumlah 4.444 orang diikuti oleh Kecamatan Bandar Baru sebanyak 4.426 orang.

Tabel 2.18 merupakan Jumlah Dayah, Guru dan Santri dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Dayah, Guru dan Santri dalam
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Dayah	Jumlah Guru			Jumlah Santri		
			Menetap	Tidak menetap	Total	Menetap	Tidak Menetap	Total
1	Bandar Dua	13	336	32	368	1.981	1.391	3.372
2	Jangka Buya	3	60	-	60	229	639	868
3	Ulim	6	94	4	98	351	390	741
4	Meurah Dua	1	5	5	10	35	92	127
5	Meureudu	-	-	-	-	-	-	-
6	Trienggadeng	3	43	13	56	215	187	402
7	Panteraja	3	27	4	31	87	319	406
8	Bandar Baru	6	114	93	207	1.202	1.320	2.522
	Jumlah	35	679	151	830	4.100	4.338	8.438

Sumber: Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah balai pengajian, guru, dan santri dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.19 sebagai berikut:

Tabel 2.19
Jumlah Balai Pengajian, Guru, dan Santri dalam
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Balai Pengajian	Jumlah Guru			Jumlah Santri		
			Menetap	Tidak menetap	Total	Menetap	Tidak menetap	Total
1	Bandar Dua	50	226	117	343	381	4.063	4.444
2	Jangka Buya	12	65	4	69	121	539	660
3	Ulim	25	120	55	175	49	1.600	1.649
4	Meurah Dua	17	40	33	73	15	1.098	1.113
5	Meureudu	32	87	77	164	70	2.421	2.491
6	Trienggadeng	23	107	63	170	66	2.061	2.127
7	Panteraaja	16	75	66	141	90	1.321	1.411
8	Bandar Baru	51	218	163	381	102	4.324	4.426
	Jumlah	228	938	578	1.516	894	17.427	18.321

Sumber : Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah dayah yang terakreditasi berdasarkan tipe masing-masing dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 2.20
Nama-Nama Dayah Yang Terakreditasi
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

NO.	NAMA DAYAH	TAHUN BERDIRI	PIMPINAN	ALAMAT		JUMLAH NILAI	TIPE 2012	KET.
				DESA	KEC.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jeumala Amal	1987	Tgk. Anwar Yusuf, M.Si	Lueng Putu	Bandar Baru	3.265	A	Terpadu
2	Raudhatul Ulum	1984	Tgk. Abdullah Saleh	Ara	Bandar Baru	700	C	Salafiyah
3	YPI Darussa'adah	1995	Tgk. Musri M. Ali, S.Pd.I	Langien Gp. Sagoe	Bandar Baru	400	D	Salafiyah
4	Nurul Huda	1984	Tgk. Syamsul Bahri	Beurandeh	Bandar Baru	350	D	Salafiyah
5	Bustanul Ihsan	2008	Tgk. M. Ali Assabuni	Lancang Paru	Bandar Baru	445	D	Salafiyah
6	Darussa'adah Cb. Paru	1983	Tgk. Sanusi Hasan	Paru Keude	Bandar Baru	315	D	Salafiyah
7	Darul falah	1984	Tgk. Jamaluddin A. Latif	Ulee Glee	Bandar Dua	1.165	A	Salafiyah
8	Darul Munawwarah Putra	1964	Tgk.H. Usman Ali	Kuta krueng	Bandar Dua	1.695	A/ DPK	Ma'had Ali
9	Darul Munawwarah Putri	1964	Tgk. H. Anwar H. Usman	Kuta krueng	Bandar Dua	1.419	A	Salafiyah
10	Manbaul Ulum Putri	2000	Tgk. Muhammad A. Hamid	Ulee Glee	Bandar Dua	1.419	A	Salafiyah
11	Raudhatussa'adah	2005	Tgk. Syeh Marhaban	Blang Dalam	Bandar Dua	580	C	Salafiyah
12	Al Muta'alimin Al Aziziyah (Al Muna)	2002	Tgk. Jafaruddin	Ulee Gle Tunong	Bandar Dua	330	D	Salafiyah
13	Babul Ulum Diniyah Islamiyah	1931	Tgk. M. Azhari Abdullah	Drien Bungong	Bandar Dua	500	D	Salafiyah
14	Ulumul Qur'an	1988	Tgk. H Ibrahim Idris	Pulo	Bandar Dua	817	C	Salafiyah

15	Nurul Hidayah Al Aziziyah	1999	Tgk. Saifuddin Abd	Ulee Gle Tunong	Bandar Dua	480	D	Salafiyah
16	Babul Ilmi Kiran	1987	Tgk. Munir	Kiran	Jangka Buya	400	C	Salafiyah
17	Madrasah Ulumul Qur'an Pidie Jaya	2008	Tgk. Fauzi, SH	Kuta Pangwa	Trienggadeng	817	C	Salafiyah
18	Yys. Tgk. Chik Haji Di Garot	2004	Tgk. Muhammadiyah Yusuf	Mesjid	Trienggadeng	710	C	Salafiyah
19	Riyadhul Fata	2006	Tgk. Murtadha	Peulandok	Trienggadeng	300	D	Salafiyah
20	Istiqamatuddin Daruzzahidin	1995	Tgk. Syarifuddin Jalil	Bidok	Ulim	830	A	Salafiyah
21	Hadiqatul Ma'arif	2003	Tgk. Mhd. Nazar Nurdin	Nangrhoe Barat	Ulim	650	C	Salafiyah
22	Baburrahmah	2009	Tgk. Munirwan	Paya Pisang Klat	Bandar Dua	480	C	Salafiyah
23	Bustanul Muallimin	2010	Tgk. Zulkifli Harun	Pohroh	Bandar Dua	600	D	Salafiyah
24	Miftahul Ulum Al-Waliyah	1985	Tgk. H. Abdulllah Ibrahim	Meugit Sagoe	Bandar Dua	400	D	Salafiyah
25	Sirajul Huda	1984	Tgk. Ismail Bugis	Gp. Mesjid	Panteraja	400	D	Salafiyah
26	Darussa'adah Putri Panteraja	2006	Hj. Tgk. Muazzamah, S.Pd.I	Reudeup	Panteraja	400	D	Salafiyah
27	Babussalam Tgk. Syik di Tu	2001	Tgk. Mukhlis Yacob, S.Pdi.	Gp. Tu	Panteraja	600	D	Salafiyah
28	Al-Muhajirin Tgk. Syik di Langien	2002	Tgk. Abd. Hamid Usman	Taulada	Bandar Baru	600	D	Salafiyah
29	Darul Faizin	1991	Tgk. H. Imran Umar	Kiran Baroh	Jangka Buya	600	C	Salafiyah
30	Darul Mutaallimin	1970	Tgk. Ridwan, SH.	Mns. Mee	Bandar Dua	600	C	Salafiyah
31	Darul Istiqamah Al-Munawwarah	2008	Tgk. Bakhtiar	Tualada	Bandar Baru	400	D	Salafiyah
32	Fathul Ainiyah	2001	Ustazah Maryamah	Dayah Baroh	Ulim	600	C	Salafiyah
33	Bustanul Aitam	2003	Tgk. Ilyas Ibrahim, S.Ag.	Mns. Pupu	Ulim	500	D	Terpadu
34	Putri Raudhatun Jinan	1995	Tgk. Muniruddin M.Ali	Bidok	Ulim	820	D	Salafiyah
35	Al-Munawwarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah	1999	Tgk. Mustaqim, SE	Blang Cut	Meurah Dua	820	D	Salafiyah

Sumber: Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Kab. Pidie Jaya Tahun 2013

3.1.3. Kesehatan

Sebagai daerah yang sudah berumur 8 (delapan) tahun, Kabupaten Pidie Jaya sangat berkeinginan memiliki rumah sakit rujukan yang bertipe. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah telah membangun beberapa infrastruktur dasar sesuai dengan master plan pembangunan rumah sakit bertipe seperti ruang rawat inap, ruang radiologi, ruang operasi, IGD, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat Pidie Jaya tahun 2013 sudah mengalami peningkatan. Terdapat 11 Puskesmas dan

98 Poskesdes serta sebanyak 226 Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di pedesaan. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di RSUD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Poskesdes berjumlah 801 orang. Lebih jelas jumlah sarana dan tenaga kesehatan dapat di lihat pada Tabel 2.21 sebagai berikut:

Tabel 2.21
Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Quota Askeskin	Jumlah Balita	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Tenaga Kesehatan
1	Bandar Baru	2	44	20.693	2.214	797	111
2	Pante Raja	1	10	4.952	633	191	47
3	Trienggadeng	1	27	12.871	1.974	506	92
4	Meureudu	1	30	10.241	2.398	467	89
5	Meurah Dua	1	19	6.251	1.036	256	72
6	Ulim	1	30	8.047	1.516	339	56
7	Jangka Buya	1	18	4.386	929	221	43
8	Bandar Dua	3	48	14.680	2.461	601	122
9	RSU	-	-	-	-	-	111
10	Dinkes	-	-	-	-	-	58
	Jumlah	11	226	82.121	13.061	3.378	801

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan MDG's, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengalokasikan dana melalui berbagai sumber pendanaan. Kemajuan pembangunan bidang kesehatan dan pelayanan di Kabupaten Pidie Jaya dapat diukur dengan beberapa indikator kunci pada Tabel 2.22 sebagai berikut:

Tabel 2.22
Indikator Kesehatan Masyarakat
Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No	Indikator	2010	2011	2012	2013
1	Angka kelangsungan hidup bayi	98,55	98,21	98,55	98,56
2	Angka kematian bayi	1,25	1,05	2	2
3	Angka usia harapan hidup	69,24	69,25	69,35	69,36
4	Persentase balita gizi buruk (per 1.000)	22	15	13	13
5	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 8.779	1 : 8.150	1 : 5.907	1 : 5.921
6	Rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk	1 : 4.974	1 : 5.070	1 : 5.119	1 : 5.187
	SPM Kesehatan				
1	Kunjungan ibu hamil	-	97 %	100 %	91 %
2	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	-	100 %	100 %	27 %
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	-	80 %	95 %	99 %
4	Cakupan pelayanan ibu nifas	-	80 %	95 %	100 %
5	Cakupan neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	-	11 %	25 %	8,76 %
6	Cakupan kunjungan bayi	-	14 %	40 %	74 %
7	Cakupan desa/kelurahan Universitas Child Immunization (UCI)	-	45,49 %	55 %	51 %
8	Cakupan pelayanan anak balita	-	39 %	62 %	39 %
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	-	97 %	100 %	100 %
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	-	92 %	100 %	100 %
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan	-	64 %	83 %	86,8 %

setingkat				
Cakupan peserta KB aktif	-	83,62 %	94 %	51 %
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	-	100 %	100 %	100 %
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	-	66 %	76 %	86 %
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	1,1 %	5 %	3,7 %
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiologi <24 jam	-	100 %	100 %	100 %
Cakupan desa siaga aktif	-	11,69 %	30 %	11,69 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014.

Tabel 2.23
Distribusi SDM Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2013

Jumlah Tenaga Kesehatan	Puskesmas	Dinkes	RSU	Jumlah
Dokter Spesialis	-	-	2	2
Dokter Umum	18	-	7	25
Dokter Gigi	7	-	1	8
S2 Kesehatan	-	5	-	5
SKM	28	13	12	53
Bidan	197	7	12	216
Perawat	189	3	45	237
Gizi	21	2	2	25
Perawat Gigi	14	1	1	16
Sanitarian	78	9	3	90
Fisioterapis	-	-	4	4
Kefarmasian	16	2	4	22
Analisis kes	28	2	5	35
Apikes	2	-	2	4
Rontgen	1	-	7	8
Anastesi	-	-	1	1
Atem	-	-	2	2
Non Kesehatan	38	10	-	48
Jumlah	637	54	110	801

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 berjumlah 801 orang dimana proporsi tenaga kesehatan yang terbanyak adalah tenaga keperawatan dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Untuk sumber daya manusia kesehatan sampai dengan tahun 2013, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target, seperti untuk tenaga dokter umum 21 per 100.000 penduduk (target 30 per 100.000 penduduk), dokter gigi 6 per 100.000 penduduk (target 11 per 100.000 penduduk), sedangkan perawat 218 per 100.000 penduduk (target 158 per 100.000 penduduk) dan bidan sebesar 224 per 100.000 penduduk sudah melebihi dari target 75 per 100.000 penduduk. Untuk mendapat gambaran secara rinci tentang jenis dan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

2012	2013
8,55	98,56
2	2
3,35	69,36
13	13
5,907	1 : 5.921
1.119	1 : 5.187
%	91 %
%	27 %
%	99 %
%	100 %
%	8,76 %
%	74 %
%	51 %
%	39 %
%	100 %
%	100 %
%	86,8 %

Tabel 2.24
Distribusi Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan dalam
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

No	Puskesmas	Jenis Tenaga Kesehatan								
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Kemas	Kesling	Analisis
1	Meureudu	1	1	16	38	3	2	3	12	4
2	Trienggadeng	2	1	29	31	1	3	5	12	4
3	Jangka buya	-	1	12	7	2	2	-	6	2
4	Bandar baru	4	1	36	21	1	3	-	6	4
5	Meurah dua	-	1	20	27	-	3	-	8	3
6	Pante raja	1	1	14	12	3	3	2	7	2
7	Bandar dua	3	1	18	24	2	1	1	7	3
8	Kuta krueng	2	-	10	8	-	1	5	6	2
9	Blang kuta	-	-	5	8	-	1	2	2	2
10	Ulim	3	-	21	15	2	2	-	10	1
11	Cubo	-	-	3	6	-	-	-	2	1
12	RSU	9	1	45	12	5	2	12	3	5
13	Dinkes	-	-	4	7	3	2	13	9	2
Total		25	8	237	216	22	25	53	90	35

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan sudah mengalami peningkatan yang cukup berarti, seperti halnya distribusi tenaga medis dan kesehatan masyarakat terkonsentrasi di kecamatan tertentu.

Untuk fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu unsur utama dalam pelayanan kesehatan bersumberdaya masyarakat disebut Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang terdiri atas posyandu, polindes, poskesdes dan desa siaga. Fasilitas kesehatan yang berasal dari pemerintah terdiri atas puskesmas (puskesmas rawatan, puskesmas non-rawatan), puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah (RSUD). Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25
Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dan Kepemilikan
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jenis Sarana Kesehatan	Kepemilikan		Jumlah
	Pemerintah/ Masyarakat	Swasta	
RSU / RS Swasta	Pemerintah	-	1
Puskesmas	Pemerintah	-	11
Puskesmas Pembantu	Pemerintah	-	19
Puskesmas Keliling	Pemerintah	-	-
Balai Pengobatan/ Klinik	-	-	1
Rumah Bersalin	-	-	-
Apotik	-	-	6
Toko Obat Berijin	-	Swasta	14
Praktek Bersama	-	-	2
Praktek dr. Spesialis	-	-	4
Praktek dr. Umum	-	-	23
Poskesdes	Pemerintah	-	98

Pengobatan tradisional Posyandu	- Pemerintah	Swasta	- 226
Jumlah	-	-	405

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Obat-obatan yang esensial dan bahan habis pakai merupakan kunci utama dalam kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Tenaga farmasi dan asisten farmasi masih terbatas di beberapa puskesmas. Selain itu banyak kondisi alat kesehatan yang rusak.

2.3.1.4. Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pidie Jaya meningkat pesat sejak tahun 2009. Untuk Infrastruktur jalan berdasarkan perkembangannya menunjukkan telah terjadi perubahan terutama jalan Nasional dengan kondisi baik mencapai 90 persen, jalan provinsi dalam kondisi baik hanya sebesar 42 persen sedangkan jalan Kabupaten baru mencapai 49,92 persen. Jalan kondisi rusak berat tertinggi berada pada jalan Kabupaten hingga mencapai 24,74 persen. Kondisi jalan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, hal tersebut dapat dilihat pada Table di bawah ini:

Tabel 2.26
Kondisi Jaringan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten,
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO	STATUS JALAN	PANJANG (KM)	KONDISI		
			Baik (%)	Rusak Sedang (%)	Rusak Berat (%)
1	Jalan Nasional	34,41	90	10	0
2	Jalan Provinsi	83,95	42	25	33
3	Jalan Kabupaten	483,29	49,92	26,34	24,74

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel 2.27
Kondisi Jalan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

NO	NAMA KECAMATAN	Total Pjg (KM)	JENIS PERKERASAN (TAHUN 2013)				KONDISI TAHUN 2013 (KM)				Yg Belum di Aspal (KM) / Perlu Pnngnan (KM)	% (Kndisi Baik)
			Aspal (KM)	Tana h (KM)	Keribdi/ Klas C (KM)	Klas B (KM)	Baik <11% (KM)	Rusak Sedang 11- <16% (KM)	Rsak Ringn 16- <23% (KM)	Rsak Berat >23% (KM)		
1	Bandar Baru	97,26	57,44	3	36	2	57	29	1,5	2,70	40,26	59.05%
2	Pante Raja	37,73	15,22	-	16	3	15	18	-	-	22,51	40.33%
3	Trienggadeng	85,53	34,67	5,46	31,71	1,19	38	32,91	-	5,46	50,86	29.61%
4	Meureudu	76,45	37,49	22,03	19,97	0,161	33	25,05	1,5	22,03	38,96	28.66%
5	Meurah Dua	18,77	10,16	-	5,55	0,243	9	5,79	-	-	8,61	54.12%
6	Ulim	68,54	32,85	4,50	13,21	-	35	13,21	-	4,50	35,69	22.51%
7	Jangka Buya	9,67	6,74	-	-	-	6,7	-	-	-	2,92	65.00%
8	Bandar Dua	89,34	46,87	2,16	14,99	4,25	47	19,19	-	2,16	42,47	41.87%
JUMLAH		483,29	241,44	37,17	137,44	10,85	240,7	143,16	3	36,87	241,84	49.92%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Pembangunan jalan kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya meningkat pesat dengan total panjang mencapai 483,29 km pada tahun 2013. Kondisi jalan beraspal mencapai 50% dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya memiliki panjang total 320 km dengan kondisi beraspal hanya 30%. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sangat mendukung akses transportasi bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pada pemerintahan periode 2009 s.d 2014 telah dilakukan pembukaan jalan provinsi yaitu Meureudu, Mane, sampai dengan Geumpang, namun akibat kendala hutan lindung dan konsisi keuangan daerah maka jalan tersebut belum selesai.

Periode pemerintahan 2014 s.d 2019 diharapkan jalan tersebut dapat terealisasi dan segera dituntaskan agar dapat dipergunakan secepatnya oleh masyarakat di dua Kabupaten bertetangga yaitu Pidie Jaya dan Pidie. Dengan dibukanya jalan tersebut akan membuka keterisolasian Kecamatan Mane dan Geumpang yang mayoritas penduduk berpenghasilan dari sektor perkebunan dan pertanian. Dengan terbukanya akses jalan tersebut maka diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan dalam menjual hasil-hasil produksi perkebunan ke Kabupaten Pidie Jaya.

Disamping pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga memperhatikan kondisi jembatan yang memberikan kemudahan transportasi kepada masyarakat. Saat ini Pidie Jaya memiliki 122 unit jembatan baik kayu ataupun plat beton. Sebanyak 91 unit jembatan berkontruksi plat beton, 12 unit merupakan jembatan lantai kayu. Sedangkan sisanya sebanyak 19 unit merupakan jembatan gantung yang ada dipedesaan. Dari keseluruhan jembatan tersebut sebanyak 48 unit atau 40 persen dalam kondisi baik. Jembatan gantung dengan kondisi baik sebanyak 16 persen dan jembatan lantai kayu kondisi baik sebanyak 17 persen. Berikut adalah jumlah dan panjang jembatan plat beton dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Jumlah dan Panjang Jembatan (*plat beton/prestres*) dalam Wilayah
Kabupaten Pidie Jaya

No.	Nama Kecamatan	Jumlah (Unit)	Panjang (Meter)	Luas (M2)	Kondisi (Unit)				Panjang yg Rusak (Meter)
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Bangun Baru	
I.	BANDAR BARU	21	268,3	1.244,50	13	2	6	-	75
II.	PANTE RAJA	7	28,3	99,05	5	1	1	-	6
III.	TRIENGGADENG	8	28,27	98,95	1	4	2	-	23,4
IV.	MEUREUDU	13	353	1.124,00	5	3	2	3	108
V.	MEURAH DUA	5	78	256	2	2	1	-	71
VI.	ULIM	8	31,4	109,9	3	-	5	-	21,9

VII.	JANGKA BUYA	10	68,9	247,15	2	5	3	-	63,9
VIII.	BANDAR DUA	19	87	308	4	4	10	1	66
TOTAL		91	943,17	3.487,55	35	21	30	4	435,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Pembangunan infrastruktur di sektor jalan pedesaan dalam Kabupaten Pidie Jaya meningkat pesat dengan total Panjang mencapai 425 km seperti dalam Tabel 2.29 di bawah ini:

Tabel 2.29
Kondisi Jalan Pedesaan dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013

Kecamatan	Total Panjang (Km)	Kondisi Tahun 2013			Yang Belum Diaspal (Km)
		Baik (Km)	Rusak Sedang (Km)	Rusak Berat (Km)	
Bandar Baru	128,93	47,25	8,00	17,10	48,98
Panteraja	23,80	12,07	8,40	8,40	11,73
Trienggadeng	51,55	25,15	19,70	15,90	26,40
Meureudu	56,86	29,75	15,40	17,80	26,43
Meurah Dua	40,21	21,28	12,00	16,65	18,93
Ulim	38,90	17,54	11,10	6,60	21,30
Jangka Buya	13,80	5,00	5,30	5,50	8,80
Bandar Dua	71,22	26,95	15,00	19,10	44,20
Jumlah	425,27	184,99	94,91	107,05	206,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Peningkatan pembangunan jalan pedesaan dengan pengaspalan hampir mencapai 50 persen, hal tersebut sangat memberi pengaruh untuk membantu transportasi masyarakat Pidie Jaya dalam melakukan aktifitas sehari-hari terutama dalam bidang perekonomian seperti penjualan hasil perkebunan, pertanian dan perikanan ke pusat-pusat pasar di Kabupaten Pidie Jaya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui pembangunan unit Rumah Sehat Sederhana (RSS) untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 110 unit pertahun untuk seluruh Kabupaten Pidie Jaya bersumber dari APBK Pidie Jaya sejak tahun 2010, diharapkan pada periode pemerintahan yang baru akan mampu menambah jumlah RSS dari sebelumnya.

Terkait dengan infrastruktur air limbah pemukiman. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah pemukiman dalam meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan warga Pidie Jaya masih relatif rendah. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan jamban di Kabupaten Pidie Jaya adalah 69,5 persen dengan rincian 56,1 persen jamban pribadi dan MCK/WC Umum 13,4 persen. Untuk tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga

majoritas pembuangan adalah 69,5 persen pemilik kloset, sejumlah 54,5 persen terhubung ke tangki septik, sebanyak 1,0 persen ke pipa sewer, sebesar 2,1 persen cubluk/lobang tanah, sejumlah 0,7 persen langsung ke drainase 18,6 persen ke sungai/danau/pantai, 1,7 ke kolam/sawah, sejumlah 2,6 persen ke kebun/tanah lapang, dan 18,8 persen masih sembarang.

Adapun untuk pembangunan infrastruktur irigasi pada tahun 2013 panjang irigasi mencapai 138,2 km dengan luasan areal yang dialiri untuk persawahan sebesar 9.344,1 Ha. Sekitar 60 persen irigasi dalam kondisi baik dan sisanya senyak 40 persen harus direhabilitasi, melalui pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif. Ada beberapa irigasi yang menjadi kewenangan Nasional seperti Daerah Irigasi Baro Raya. Sedangkan yang menjadi kewenangan Provinsi seperti Daerah Irigasi Samalanga, Irigasi Meureudu, dan Irigasi Cubo. Berikut adalah nama daerah irigasi dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.30 di bawah ini:

Tabel 2.30
Kondisi Sarana dan Prasarana Irigasi Kabupaten Pidie Jaya

No	Nama Daerah Irigasi	Tingkat Jringan (T/ST)	L. Potensial (Ha)		Waduk		Bendung		Bendung Bangunan Bagi/Sadap		Pintu	
			Rawa	Irigasi	Unit	Kond	Unit	Kond	Unit	Kond	Unit	Kond
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	D.I Alue Sane	ST	0	200	0	-	1	RS	1	RB	2	RB
2	D.I Drien Bungong	ST	0	200	0	-	1	B	2	RB	1	B
3	D.I Lhok Ugop	ST	0	150	0	-	1	RB	2	R	3	RB
4	D.I Lueng Limeng	ST	0	200	0	-	1	RB	0	-	0	-
5	D.I Lueng paloh	ST	0	200	0	-	1	RB	0	-	1	RB
6	D.I Lueng Paya	ST	0	100	0	-	1	RB	4	R	8	R
7	D.I Meugit	ST	0	80	0	-	1	RB	3	RB	0	-
8	D.I Kuta Krueng	ST	0	300	0	-	1	B	0	-	2	B
9	D.I Pulo Perlak	ST	0	70	0	-	1	RB	2	B	0	-
10	D.I Ulee Glee	ST	0	596	0	-	1	R	0	-	0	-
11	D.I Uteun Bayu	ST	0	103	0	-	1		1	RR	1	RB
12	D.I Palong	ST	0	50	0	-	1	R	0	-	0	-
13	D.I Gaharu	ST	0	100	0	-	1	B	2	RS	1	B
14	D.I Kiran	ST	0	200	0	-	1	RR	3	RB	7	RB
15	D.I Ulim	T	0	424	0	-	1	RR	7	RS	5	R
16	D.I Lhok Pineung	SD	0	40	-	-	-	-	1	RB	-	-
17	D.I Lhok Bambui	SD	0	20	-	-	-	-	1	RB	-	-
18	D.I Blang Lubok	SD	0	44	0	-	1	RB	0	-	0	-
19	D.I Alue Demam	ST	0	80	0	-	1	B	3	B	5	B
20	D.I Pantan Limeng	ST	0	10	0	-	1	RB	0	-	0	-
21	D.I Pantan Pupu	ST	0	10	0	-	1	RB	0	-	0	-
22	D.I Teurace	ST	0	12	0	-	1	RS	0	-	0	-
23	D.I Blang Geulumpang	SD	0	60	1	RB	0	-	0	-	1	R
24	D.I Paya Trieng	SD	0	80	1	RB	0	-	0	-	0	-
25	D.I Alue Drien	SD	0	50	1	RB	0	-	3	B	1	B

5
ar
ie,
6
3,
ik
an
ng
an
asi
um

ond
13
RB
B
RB
B
RB
R
-
-
-
RB
-
B

26	D.I Blang Suwak	SD	0	10	-	-	1	RB	1	RB	1	B
27	D.I Lhok Pisang	SD	0	28	1	B	0	-	1	B	4	-
28	D.I Paya Reulet	SD	0	20	1	R	0	-	0	-	0	-
29	D.I Paya Pie Ujong Baroh	SD	0	20	1	RR	-	-	1	RR	1	RS
30	D.I Lhok Puuk	ST	0	10	1	B	0	-	0	-	1	-
31	D.I Muka Blang	ST	0	10	1	B	0	-	0	-	0	-
32	D.I Jrg. Beurangkat	SD	0	20	1	RS	0	-	1	RB	1	RB
33	D.I Pante Breuh	ST	0	125	0	-	1	RS	2	B	0	-
34	D.I Tgk. Chik Disintheu	ST	0	233	0	-	1	RB	2	RB	1	RS
35	D.I Blang Wew	ST	0	15	1	RB	0	-	2	RB	2	RR
36	D.I Paya Baro	ST	0	15	1	-	1	RR	2	-	1	B
37	D.I Tgk. Leman	ST	0	20	0	-	1	RB	2	RB	2	RR
38	D.I Waduk Alue	ST	0	25	1	-	1	RB	2	RB	2	RR
39	D.I Waduk Baro	ST	0	25	1	-	1	RB	2	RB	2	RR
40	D.I Padon Nga	SD	0	55	1	RR	-	-	1	B	2	B
41	D.I Py. Keumudee	SD	0	20	1	B	-	-	1	B	1	B
42	D.I Lhok Papeun	SD	0	25	1	RS	-	-	1	B	2	B
43	D.I Meuh	SD	0	10	1	B	-	-	1	RS	1	B
44	D.I Blang Biri	SD	0	16	1	B	-	-	1	RS	1	RS
45	D.I Cot Bayu	SD	0	10	1	B	-	-	1	RS	1	RB
46	D.I Meunigoe	SD	0	15	1	RR	-	-	1	RS	1	B
47	D.I Lhok Pie	SD	0	15	1	B	-	-	1	RS	2	B
48	D.I Blang Beunot	SD	0	30	1	RR	-	-	1	B	1	RS
49	D.I Tanah Mirah	SD	0	20	1	RS	-	-	1	RB	1	RB
50	D.I Ujong Leubat	ST	0	100	1	RS	1	RR	2	RB	3	RB
51	D.I Blang Bill	SD	0	25	1	RS	-	-	1	RB	1	
52	D.I Beuracan	T	0	863	0	-	1	RS	14	RR	32	B/2RR
53	D.I Lhok sandeng	ST	0	252	0	-	1	RB	4	R	7	R
RS	JUMLAH			5.411	25	-	38	-	84	-	112	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Selain melakukan perbaikan pada jaringan irigasi, waduk, saluran dan bendung juga dilakukan pemetaan terhadap embung – embung yang tersebar diseluruh Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan rehabilitasi dan perbaikan. Namun minimnya dana yang tersedia hanya mampu dilakukan pemetaan dari total embung yang terdata pada tahun 2008 hanya mencapai 15 embung. Pada tahun 2013 menjadi 51 embung dimana semua embung tersebut diharapkan dapat segera diperbaiki pada periode pemerintahan 2014 s.d 2019 dengan target minimal 50% dari jumlah tersebut. Tabel 2.31 merupakan daftar Embung dalam Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Daftar Embung Dalam Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013

No	Nama Daerah Irigasi (Embung)	Tingkat Jaringan (T/ST)	Waduk		Pintu		Kecamatan
			Unit	Kondisi	Unit	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Embung Lam Sundeng	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
2	Embung Blang Panjoe	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
3	Embung Graphik	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
4	Embung Paya Girek	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
5	Embung Blang Panton	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
6	Embung Paya Bungku	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
7	Embung Blang Thoe	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
8	Embung Paya Pie Dec	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
9	Embung Paya Nga	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
10	Embung Paya Ba	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
11	Embung Paya Bakong	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
12	Embung Paya Trieng	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
13	Embung Paya Blang Mamprei	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
14	Embung Paya Cruem	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
15	Embung Paloh Ara	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
16	Embung Paya Lhok Hagu Mee	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
17	Embung Paya Lhok Bada	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
18	Embung Paya Cibrek	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
19	Embung Abeuk Raya	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
20	Embung Paya Blang Poroh	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
21	Embung Panjou	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
22	Embung Paya Itek	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
23	Embung Lhok Ujeun	SD	1	R	1	-	Trienggadeng
24	Embung Gle Lawang	SD	1	R	-	-	Trienggadeng
25	Embung Paya Muka Blang	SD	1	R	-	-	Panteraja
26	Embung Gle Bruk	SD	1	R	1	-	Panteraja
27	Embung Uteun Pantang	SD	1	R	1	-	Panteraja
28	Embung Jurong Beurangkat	SD	1	B	1	-	Panteraja
29	Embung Paya Reudeub	SD	1	B	1	-	Panteraja
30	Embung Lhok Puuk	SD	1	B	1	-	Panteraja
31	Embung Lhok Thoe	SD	1	R	-	-	Bdr. Baru
32	Embung Paya Ceurih	SD	1	R	1	-	Bdr. Baru
33	Embung Lhok Badeuk	SD	1	R	-	-	Bdr. Baru
34	Embung Lhok Lawah Musa	SD	1	R	-	-	Bdr. Baru
35	Embung Lhok Papeun	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
36	Embung Paya Ceurih	SD	1	R	1	-	Bdr. Baru
37	Embung Lhok Weng	SD	1	R	-	-	Bdr. Baru
38	Embung Lhok Nga	SD	1	R	1	-	Bdr. Baru
39	Embung Alue	SD	1	R	1	-	Bdr. Baru
40	Waduk Baro	SD	1	R	1	-	Bdr. Baru
41	Embung Padon Nga	SD	1	B	2	-	Bdr. Baru

42	Embung Paya Keumudee	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
43	Embung Lhok Papeun	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
44	Embung Meuh	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
45	Embung Blang Biri	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
46	Embung Cot Bayu	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
47	Embung Meunigoe	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
48	Embung Lhok Pie	SD	1	B	2	-	Bdr. Baru
49	Embung Blang Beunot	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
50	Embung Paya Pie Ujong Baroh	SD	1	B	1	-	Bdr. Baru
51	Embung Ujong Leubat	SD	1	B	3	-	Bdr. Baru
52	Embung Blang Bili	SD	1	R	1	-	Bdr. Baru
JUMLAH			52	-	28	-	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Disamping itu pembangunan Infrastruktur pemukiman dan perumahan pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan sebanyak 157 unit rumah sehat sederhana untuk fakir miskin serta fasilitas air bersih di delapan kecamatan. Berikut ada beberapa indikator penting infrastruktur Pidie Jaya terlihat pada tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32
Indikator Infrastruktur
Tahun 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM
1.	Pekerjaan Umum		
1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Km	240,0
1.2	Rasio Jaringan Irigasi	%	40,00
1.3	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	%	-
1.4	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	56,10
1.5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	%	20,00
1.6	Rumah Layak Huni	Unit	15.820
1.7	Permukiman Layak Huni	%	47,57
1.8	Panjang Jalan	Km	483,29
1.9	Jumlah Jembatan	Unit	122
1.10	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui Roda 4)	%	54,81
1.11	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	Km	176,0
1.12	Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	58,00
1.13	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	60,00
1.14	Lingkungan Permukiman	%	12,50
2.	Perumahan		
2.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	16,94

	2.2	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,16
	3.3	Rumah Tangga Bersanitasi	%	56,10
	3.4	Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	985,92
	3.5	Rumah Layak Huni	%	55,73
3.		Penataan Ruang		
	3.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	Ha	95,20
	3.2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	152,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.5. Perhubungan

Dalam konteks ekonomi, kedudukan wilayah Kabupaten Pidie Jaya dalam peta Provinsi Aceh memiliki arti penting dan strategis. Terutama adalah memiliki akses transportasi/perhubungan bagi beberapa kabupaten lainnya di pesisir timur untuk menuju pusat pasar utama Pulau Sumatera yaitu Pidie Jaya. Dengan kedudukannya ini memudahkan bagi Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Bireun dan Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan salah satu pintu gerbang utama menuju Kabupaten Pidie, sehingga memberi peluang bagi pengusaha daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan barang dan jasa ke kabupaten sekitarnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang sudah ada, walaupun belum cukup memadai. Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat urgen dalam mengembangkan ekonomi dan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Pidie Jaya, sektor perhubungan terdiri dari subsektor angkutan darat, angkutan laut, sungai dan danau, angkutan udara serta sub sektor komunikasi. Mengingat begitu pentingnya peranan sektor pengangkutan dan transportasi ini dalam mengembangkan perekonomian daerah, kondisi ini telah direspon oleh pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tersebut. Pemerintah daerah juga menyadari masih terdapat beberapa permasalahan disektor perhubungan yang harus mendapat penanganan yang serius seperti masih kurangnya sarana transportasi ke daerah pedalaman dan terpecil serta penanganan beberapa ruas jalan negara dan jalan propinsi yang melintasi Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 2.33
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Kab. Pidie Jaya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Titik	Keterangan
1.	Warning Light	Kec. Bandar Dua	2	-
		Kec. Trienggadeng	1	-
		Kec. Ulim	1	Rusak
		Kec. Bandar Baru	2	-
		Kec. Jangka Buya	1	-
		Kec. Meureudu	1	Rusak
2.	Trafigh Ligth	Kec. Meurah Dua	1	Rusak
3.	Running Teks	Kec. Trienggadeng	1	-
4.	Halte	Kec. Bandar Baru	3	-
		Kec. Bandar Dua	1	-
		Kec. Panteraja	1	-
		Kec. Ulim	1	-
		Kec. Trienggadeng	1	BPD Aceh
5.	Cermin Tikung	Kec. Meurah Dua	30	-
		Kec. Badar Dua		
		Kec. Jangka Buya		
		Kec. Trienggadeng		

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Jumlah volume kendaraan sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Pidie Tahun 2014 untuk Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
Jumlah Volume Kendaraan Kabupaten Pidie Jaya (Unit)

No.	Uraian	Roda 2	Roda 3	Roda 4	Roda 6	Jumlah
1.	Kederaan Dalam Kab. Pidie Jaya	5.941	6	699	109	6.755

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Sampai dengan tahun 2014, kinerja pembangunan pada aspek pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan adanya peningkatan yang dilihat dari beberapa indikator antara lain seperti jumlah arus penumpang angkutan umum. Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan dari 3.230 penumpang tahun 2009 menjadi 6.100 penumpang pada tahun 2014. Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum tersebut mengindikasikan juga berkembangnya perekonomian daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan pula mobilitas penduduk baik antar kecamatan antar kabupaten maupun antar provinsi.

2.3.1.6. Adminstrasi Kependudukan

Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan undang undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan salah satu Program Pemerintah Kabupaten. Pidie Jaya untuk menjalankannya, dalam rangka memberikan Pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat agar setiap masyarakat yang telah tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Pidie Jaya Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai tempat domisilinya yaitu Pidie Jaya.

Program Pelayanan Gratis untuk semua bentuk Pelayanan Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan amanat undang undang tentang kependudukan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara optimal, dengan cara mengoptimalkan pelayanan dengan sifat mengayomi dan mengajak masyarakat untuk berkerja sama terutama dalam hal melaporkan peristiwa penting kependudukan dan memberikan data data yang sebenarnya. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan memberikan teguran tegas kepada petugas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil seandainya dalam memberi pelayanan diskriminatif terutama dalam memberikan Pelayanan KK, KTP, Pindah Datang dan Semua Pelayananan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan lain-lain).

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tahun 2013 dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil rasio penduduk ber KTP standar Nasional persatuan penduduk telah mencapai 73,02% atau 79.967 Jiwa dari Wajib KTP sejumlah 109.515 jiwa dan Rasio Penduduk yang telah memiliki KK Standar Nasional Sebanyak 65,1% atau 29.051 KK dari jumlah KK sebanyak 44.688 KK di Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan untuk rasio Penduduk terutama Bayi ber akta Kelahiran sebanyak 60% atau 94.444 dari jumlah Penduduk. Pemerintah kabupaten Pidie Jaya akan berupaya pencapaian ke tiga indikator kependudukan dan pencatatan sipil tersebut dapat mencapai 95% sesuai dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 2.35 merupakan kondisi demografi dan kepemilikan dokumen kependudukan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35
Keadaan demografi dan dokumen kependudukan Masyarakat
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	DOKUMEN KEPENDUDUKAN					
			Wajib KTP	Ber KTP	AKTA LAHIR	Jlh.KK	KK Nasional	
							ada	tidak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MEUREUDU	23.117	16.254	11.703	12.541	6.807	4.629	2.178
2	ULIM	15.969	10.821	8.008	8.502	4.369	2.752	1.617
3	JANGKA BUYA	9.845	6.670	5.003	5.213	2.638	1.820	818
4	BANDAR DUA	26.817	18.495	13.875	15.512	7.380	4.501	2.879
5	MEURAH DUA	12.043	8.301	6.226	7.301	3.424	2.054	1.370
6	BANDAR BARU	36.480	25.758	18.546	26.704	10.216	6.845	3.371
7	PANTERAJA	9.063	6.208	4.531	6.261	2.580	1.651	929
8	TRENGGADENG	24.049	17.008	12.075	12.410	7.272	4.799	2.473
TOTAL		157.383	109.515	79.967	94.444	44.686	29.051	15.635

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pidie Jaya Tahun 2014

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk secara umum, pada gambaran ini hanya dilihat pada mata pencaharian petani, pegawai, pedagang, pensiunan dan mahasiswa atau pelajar. Mata pencaharian sebagai petani masih mendominasi sebesar 31,06 persen, diikuti oleh pedagang/jasa-jasa sebesar 12,55 persen, kemudian nelayan mencapai 4,47 persen dan pegawai sebesar 2,64 persen. Secara detail jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.36
Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Perkecamatan
Kabupaten Pidie Jaya 2013

No.	KECAMATAN	JENIS PEKERJAAN / MATA PENCAHARIAN								Jumlah Penddk.	DLL
		TANI	NELAYAN	PNS	TNI	POLRI	PERDAGANGAN/JASA	PENSIUNAN	PLAJAR/MAHASISWA		
1	MEUREUDU	8.114	780	782	38	85	2.889	281	6.107	23.117	4.421
2	ULIM	4.874	670	362	19	31	2.045	89	3.971	15.969	4.178
3	JANGKA BUYA	2.110	656	154	11	11	1.077	53	2.705	9.845	3.424
4	BANDAR DUA	9.646	325	606	16	37	2.855	216	8.009	26.817	5.132
5	MEURAH DUA	2.879	750	448	10	30	1.672	119	3.311	12.043	3.074
6	BANDAR BARU	13.204	1.189	566	101	67	4.104	272	9.677	36.480	7.489
7	PANTERAJA	848	1.279	114	23	13	900	86	2.521	9.063	3.879
8	TRENGGADENG	7.204	1.379	540	38	60	4.207	291	6.665	24.049	4.044
JUMLAH		48.879	7.028	3.572	256	334	19.749	1.407	42.966	157.383	35.641

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Melalui program dan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat

Pidie Jaya. Demikian juga minat masyarakat Pidie Jaya terhadap program yang dilaksanakan oleh BKBPP sudah mulai menunjukkan peningkatan. Harapan dari lahirnya program tersebut, Sebanyak 37.671 KK dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat menjadi keluarga sejahtera. Salah satu kegiatan pendukung keluarga sejahtera adalah dengan program keluarga berencana yang harus digalakkan dalam kehidupan masyarakat.

Saat ini jumlah peserta atau aseptor KB Pidie Jaya hingga tahun 2013 meningkat mencapai 8.086 orang dari target semula yang hanya 5.075 orang. Berikut adalah jenis-jenis alat kontrasepsi yang sering digunakan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.37 dibawah ini:

Tabel 2.37
Aseptor KB Kabupaten Pidie Jaya hingga Tahun 2013

No.	Alat Kontrasepsi	Target	Capaian
1	IUD	57	94
2	MOP	1	0
3	MOW	2	14
4	Implant	104	71
5	Suntikan	1.712	4.305
6	Pil	2.714	2.785
7	Kondom	485	816
	Jumlah	5.075	8.086

Sumber: BKBPP kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Adapun strategi untuk menurunkan jumlah penduduk prasejahtera sehingga tercapai keluarga yang sejahtera dan berkualitas adalah dengan melakukan memperkuat pendampingan melalui kader desa dalam membantu keluarga sehingga mampu berkembang dan melakukan berbagai upaya mensejahterakan keluarga. Menciptakan masyarakat yang sadar akan keluarga sejahtera dan berkualitas melalui perencanaan hidup yang tepat disertai dengan penguatan pengetahuan tentang pola hidup sejahtera.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sampai saat ini masih marak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Pelanggaran hak asasi perempuan dan anak dalam rumah tangga masih sering terjadi di Aceh, terutama di daerah pedesaan. Fenomena tersebut erat kaitannya dengan tingkat pendidikan mereka yang rata-rata tingkat berpendidikan rendah. Demikian pula halnya dengan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, di dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan langsung antara laki-laki dan perempuan juga sering terjadinya saling pelecehan hak dan kewajiban yang bermuara pada sikap yang tidak bertanggungjawab dan tidak ada

keharmonisan di dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian. adapun perkembangan laporan kasus kekerasan dari Tahun 2013 s/d 2014 adala sebagai berikut:

Tabel 2.38
Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga dalam
Wilayah Pidie Jaya Tahun 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	Trienggadeng	3	
2	Bandar Baru	10	
3	Ulim	-	
4	Jangka Buya	2	
5	Meurah Dua	1	
6	Bandar Dua	-	
7	Pante Raja	5	
8	Meureudu	-	
JUMLAH		21	

Sumber: BKEPP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.9. Koperasi dan UMKM

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. Selama ini Koperasi dan UMKM belum mendapat perhatian yang lebih disebabkan karena masih lemahnya sumberdaya manusia yang memahami terhadap efektifitas percepatan pertumbuhan ekonomi sektor riil. Berdasarkan data, sektor riil telah berkembang cukup signifikan, akan tetapi sentuhan efektif pemerintah belum berjalan maksimal.

Perkembangan jumlah Koperasi dan UMKM dari tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 jumlahnya hanya 210 UMKM, bertambah menjadi 1.470 UMKM pada tahun 2013. Pertumbuhan terbesar terjadi di Kecamatan Bandar Baru, Meureudu, Kecamatan Ulim dan Bandar Dua yang merupakan sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan untuk Koperasi, pada tahun 2009 terdapat ±186 koperasi diseluruh Kabupaten Pidie Jaya. Namun pada akhir 2013 setelah dilakukan verifikasi hanya terdapat 168 Koperasi yang aktif dan 68 Koperasi tidak aktif dengan berbagai macam permasalahan.

Berdasarkan pertumbuhan tersebut, Pemerintah harus mampu mengambil layanan dan perannya untuk mengungkit peran serta Koperasi dan

UMKM dalam menumbuh kembangkan roda ekonomi daerah. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah seperti memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha UMKM dan meningkatkan mutu Koperasi melalui program pembinaan Koperasi dan UMKM. Meskipun masih kecil, hal tersebut dilakukan karena kedua jenis usaha tersebut telah member andil yang besar dalam mempengaruhi pertumbuhan Kabupaten.

Perkembangan Koperasi, yang bergerak diberbagai bidang sektor telah memberikan kontribusi tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi daerah, namun disisi lain masih ada koperasi yang tidak aktif lagi, hal itu terjadi mayoritasnya karena sistem pengelolaan yang kurang baik sehingga timbul sentimen negatif dari anggotanya disamping faktor-faktor penyebab lainnya. Adapun koperasi di kabupaten Pidie Jaya berjumlah 236 unit koperasi dengan 19.003 anggota. Sedangkan yang aktif hanya 61 koperasi atau 25,85 persen dan 175 koperasi yang tidak aktif atau 74,15 persen. Koperasi yang aktif didominasi oleh koperasi KSU dengan jumlah 13 unit dan KPN/KPRI dengan jumlah 12 unit. Sedangkan anggota koperasi terbanyak berasal dari KUD dengan jumlah anggota 6.225 orang, kemudian diikuti oleh KPN/KPRI dengan anggota sebanyak 4.570 orang.

Tabel 2.39
Jenis Koperasi dan Klasifikasi Koperasi
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO. URUT	JENIS KOPERASI	JUMLAH KOP.	JUMLAH ANGGOTA (ORG)	KLASIFIKASI KOPERASI	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	KUD	14	6.225	3	11
2	KOPERASI PRODUKSI	7	174	7	0
3	KOPERASI JASA	4	102	4	0
4	KPN/ KPRI	19	4.570	12	7
5	KSU	67	2.058	13	54
6	KOP. PASAR	5	140	-	5
7	KOP. WANITA	18	1.215	6	12
8	KOP. PEMUDA	3	101	2	1
9	KOPPONTREN	26	1.109	5	21
10	KOP. PERTANIAN	42	1.899	5	37
11	KOP. PERIKANAN	17	771	2	15
12	KOP. LAINNYA	14	639	2	12
	JUMLAH TOTAL	236	19.003	61	175

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sedangkan UMKM, umumnya yang ada di Kabupten Pidie Jaya bergerak pada kelompok usaha mikro seperti anyaman tikar, rotan, bordir, pandai besi, batu bata, kawat bronjong, serta usaha kuliner masakan khas Pidie Jaya.

UMKM per kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.40 berikut ini:

Tabel 2.40
Rekapitulasi UMKM Per Kecamatan Tahun 2010 s.d 2013

NO.	KECAMATAN	JUMLAH UMKM (UNIT)			
		2010	2011	2012	2013
1	Bandar Dua	83	102	140	144
2	Jangka Buya	44	44	44	49
3	Ulim	43	45	197	211
4	Meurah Dua	55	76	77	77
5	Meureudu	81	91	254	345
6	Trienggadeng	76	78	280	293
7	Panteraja	47	48	48	49
8	Bandar Baru	76	83	276	302
	JUMLAH	505	567	1.316	1.470

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.10. Pengelolaan Aset Daerah

Sistem pengelolaan aset (barang-barang) milik daerah merupakan bagian terpenting dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Buruknya sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah membuat daerah sering kali gagal untuk memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistem pencatatan aset adalah bagian yang tidak terlepas dari Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam PP. 71 Tahun 2010 dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai daerah yang masih tergolong baru, Kabupaten Pidie Jaya akan terus berbenah menyangkut sistem pengelolaan aset daerah. Ada beberapa kendala/permasalahan dalam sistem pengelolaan aset milik daerah Pidie Jaya selama ini, diantaranya adalah:

1. Sistem pencatatan dan pengkodean aset daerah masih dilakukan secara manual tanpa aplikasi, sehingga tingkat keakuratan data dan juga tingkat kesalahan (error) dalam pengelolaan sangat tinggi.
2. Sistem penghapusan aset belum pernah dilakukan, hal ini menyebabkan sebagian aset-aset yang ada pada laporan tidak dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya disebabkan karena waktu pembelian dan masa pemakaian yang sudah diluar masa manfaat.
3. Untuk barang-barang yang nilai harga pasarnya telah turun drastis seperti flashdisk, keyboard, mouse, maupun barang kecil lainnya perlu adanya sebuah kebijakan. Jenis barang sebutkan tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam wujud aset tetap karena masa manfaat, nilai dan wujudnya sudah tidak wajar.

4. Sistem pengakuan aset yang merupakan limpahan dari Kabupaten Pidie (Induk) belum bisa diakui dan diakuisisi ke dalam asset tetap. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya bahan-bahan pendukung yang diterima oleh Kabupaten Pidie Jaya seperti Sertifikat Tanah dan bangunan, bukti kepemilikan maupun BPKB kendaraan bermotor dll.

Berikut adalah jenis-jenis aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya seperti Tanah, Bangunan, Jalan, Jembatan, Serta Angkutan dapat dilihat dalam Tabel 2.41 di bawah ini:

Tabel 2.41.
Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Tanah

NO.	TAHUN	LUAS (M ²)	NILAI TANAH (Rp)	TOTAL	
				LUAS (M ²)	NILAI
1	2007	-	-	-	-
2	2008	47.428	1.533.896.000	47.428	1.533.896.000
3	2009	130.925	12.107.803.250	178.353	13.641.699.250
4	2010	361.975	11.264.530.000	540.328	24.906.229.250
5	2011	159.267	7.467.220.000	699.595	32.373.449.250
6	2012	124.307	5.810.936.000	823.902	38.184.385.250
7	2013	24.726	2.694.444.500	848.628	40.878.829.750

Tabel 2.42
Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Alat Angkutan/Kederaan

NO.	TAHUN	QUANTITAS (Unit)			NILAI TANAH (Rp)	TOTAL		
		RODA 2	RODA 3	RODA 4		RODA 2	RODA 4	NILAI
1	2007	8	-	4	625.574.000	8	4	625.574.000
2	2008	74	-	20	4.374.821.500	82	24	5.000.395.500
3	2009	345	-	26	10.962.256.650	427	50	15.962.652.150
4	2010	14	-	19	4.233.450.000	441	69	20.196.102.150
5	2011	333	-	29	8.322.589.000	774	98	28.518.691.150
6	2012	53	2	23	3.201.639.426	827	121	31.720.330.576
7	2013	6	-	-	298.466.000	833	121	32.018.796.576

Tabel 2.43
Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Bangunan Gedung

NO.	TAHUN	JUMLAH BANGUNAN	NILAI (Rp)	TOTAL	
				Jumlah Bangunan	NILAI
1	2007	-	-	-	-
2	2008	9	5.012.620.136	9	5.012.620.136
3	2009	87	16.123.450.400	96	21.136.070.536
4	2010	117	15.843.305.428	213	36.979.375.964
5	2011	165	25.561.616.621	378	62.540.992.585
6	2012	197	28.824.108.497	575	91.365.101.082
7	2013	157	24.725.795.322	732	116.090.896.404

Tabel 2.44
Aset Tetap Kabupaten Pidie Jaya Berupa Jalan dan Jembatan

NO.	TAHUN	JUMLAH		NILAI (Rp)	TOTAL		NILAI
		JALAN	JEMBATAN		Jumlah Jalan	Jumlah Jembatan	
1	2007	-	-	-	-	-	-
2	2008	-	1	3.774.877.819	-	1	3.774.877.819
3	2009	130	19	23.447.187.226	130	20	27.222.065.045
4	2010	64	17	13.921.226.703	194	37	41.143.291.748
5	2011	114	20	29.515.650.116	308	57	70.658.941.864
6	2012	186	54	24.703.897.600	494	111	95.362.839.464
7	2013	208	36	28.587.509.132	702	147	123.950.348.596

Sumber: DPPKAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Untuk menciptakan pengelolaan aset yang baik di Kabupaten Pidie Jaya, diperlukan suatu pengendalian yang maksimal dan efektif terhadap seluruh SKPK dengan melakukan kegiatan pemeriksaan aset secara berkala baik secara triwulan, semesteran maupun tahunan.

2.3.1.11. Kepegawaian

Kondisi kepegawaian Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkatan, sehingga posisi jumlah pegawai Kabupaten Pidie Jaya mencapai 3.687 orang hingga tahun 2013 yang terdiri dari seluruh kualifikasi pendidikan. Jumlah pegawai terbesar masih didominasi oleh kualifikasi strata satu (S1/D4) yang mencapai 2.274 orang. Selanjutnya diikuti oleh Diploma 3 sebanyak 497 orang dan SMA sederajat mencapai 453 orang. Adapun pegawai Kabupaten Pidie Jaya untuk kualifikasi strata tiga (S3) belum tersedia dan strata dua (S2) berkisar 80 orang.

Tabel 2.45
Jumlah PNS Dalam Lingkungan Pemerintah Pidie Jaya
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2013

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S 3	0
2.	S 2	80
3.	D4/S1	2275
4.	D.3	497
5.	D.2	266
6.	D.1	67
7.	SMA sederajat	453
8.	SMP sederajat	32
9.	SD sederajat	17
TOTAL		3.687

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2014

Untuk pendidikan penjurangan aparatur, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang telah memiliki aparatur yang telah memperoleh sertifikat PIM II berjumlah 2 Orang, PIM III berjumlah 7 orang dan PIM IV berjumlah 14 orang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan aparatur, setiap aparatur yang menduduki jabatan struktural eselon harus memperoleh dan atau memiliki sertifikasi pendidikan perjurangan aparatur sesuai eselon yang didudukinya. Jika dilihat dari seluruh pegawai, maka baru 0,62 persen yang baru memperoleh pendidikan perjurangan atau sekitar 4,42 persen dari seluruh pejabat struktural yang ada.

Tabel 2.46
Jumlah Pejabat Struktural
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Eselon	Tersedia	Terisi	Tidak Terisi	Yang Ada Diklat Perjurangan
II	29	29	0	2
III	132	131	1	7
IV	359	302	57	14
Jumlah	520	462	58	23

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2014

Adapun jumlah pegawai jika dilihat dari golongan, secara keseluruhan dari tahun ketahun maka pegawai Kabupaten Pidie Jaya masih didominasi oleh golongan III, diikuti oleh golongan IV dan Golongan II. Besarnya jumlah pegawai dari golongan III disebabkan karena sistem perekrutan PNSD masih didominasi formasi kualifikasi pendidikan strata satu (S1) dan strata dua (S2). Jika dilihat dari golongan, maka saat ini sumberdaya aparatur pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya relatif sangat bagus dan memudahkan dalam menempatkan strukturalisasi pegawai.

Tabel 2.47
Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Berdasarkan Golongan pada Tahun 2009 - 2013

NO.	TAHUN	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	2009	1.111	1.135	1.050	92	3.388
2.	2010	1.021	1.270	1.293	77	3.661
3.	2011	1.110	1.377	1.173	50	3.710
4	2012	1.125	1.422	1.047	47	3.641
5.	2013	1.137	1.451	1.049	50	3.687

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2014

Disamping Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Kabupaten Pidie Jaya juga mempekerjakan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL). Saat ini jumlah THL berjumlah 1.278 orang yang bekerja sebagai tenaga pendidikan, kesehatan, dan instansi pemerintah lainnya. Saat ini pekerjaan dan distribusi THL dirasakan belum efektif dan masih terdapat banyak persoalan. Banyak tenaga THL tersebut telah membebani anggaran pemerintah daerah dari tahun ketahun. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus melakukan rasionalisasi kebutuhan THL serta penempatan sesuai dengan kebutuhan agar terciptanya efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan pemerintahan.

2.3.1.12. Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk meningkatkan ketenagakerjaan menyangkut pencari kerja dan pengangguran, dalam meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah angkatan kerja sampai akhir tahun 2013 yaitu 64.858 jiwa dengan jumlah pencari kerja yang terdata pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 2.483 jiwa dengan jumlah pengangguran mencapai 10.435 jiwa. Banyaknya jumlah pengangguran yang mencapai 10.435 jiwa menyebabkan terjadinya salah satu faktor tingginya kemiskinan daerah. Untuk menanggulangi pengangguran harus diciptakan lapangan pekerjaan sehingga angka kemiskinan juga akan menurun seiring terciptanya lapangan pekerjaan.

Tabel 2.48
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2013

NO.	INDIKATOR	Kondisi Tahun 2009	Kondisi Tahun 2010	Kondisi Tahun 2011	Kondisi Tahun 2012	Kondisi Tahun 2013
1	Jumlah Angkatan Kerja	51.214	60.302	64.617	64.797	64.858
2	Jumlah Pencari Kerja	915	512	713	335	1.475
3	Jumlah Pengangguran	8.911	5.112	10.151	10.254	10.435

Sumber: Dinsosnakertran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.13. Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui penguatan kelembagaan penyelenggaraan syariat. Sebagai salah satu tempat utama pelaksanaan syariat adalah mesjid. Dalam upaya mendukung

pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, ada sebanyak 71 unit mesjid yang tersebar diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah mesjid terbanyak berada di Kecamatan Bandar Baru berjumlah 19 unit dan 13 unit di Kecamatan Bandar Dua. Kondisi dan jumlah mesjid tersebut sudah sesuai dengan luas daerah dan jumlah penduduk Pidie Jaya. Secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49
Nama-nama Mesjid Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO.	KECAMATAN	NAMA MESJID
1	2	3
1	Bandar Baru	Al - Falah
2	Sda	Baitul Abrar
3	Sda	Al - Baitul Makmur
4	Sda	Baiturrahman
5	Sda	Baiturrahim
6	Sda	Liwaul Hamdi
7	Sda	Baitul Izzah
8	Sda	Baitul Makmur
9	Sda	Al - Fukara
10	Sda	Baitul Fukara
11	Sda	Baitul Makmur
12	Sda	Sabilil Muttaqin
13	Sda	Baitul Muttaqin
14	Sda	Baitul Al-Fuqarah
15	Sda	Babul Ikhsal
16	Sda	Nur Abdullah
17	Sda	Baitul Sa'adah
18	Sda	Baitul Izzah
19	Sda	Baitul Mukmin
20	Pante Raja	Al - Fuqarraq
21	Sda	Nurul Huda
22	Sda	Ahlil Sisilah
23	Sda	Q u b a
24	Sda	Nurul Jadid
25	Trienggadeng	At - Taqarrub
26	Sda	At - Taqwa
27	Sda	Al - Hidayah
28	Sda	Al - Ikhlis
29	Sda	Baiturrahman
30	Sda	Quba
31	Sda	Darul Ikhsan
32	Meureudu	Baitul Qudus
33	Sda	Tgk. Dipucok Kreung
34	Sda	Iskandarmuda
35	Sda	At -Taqwa

36	Sda	Al - Istiqamah
37	Sda	Al - Islah
38	Sda	Baitul Maqfirah
39	Sda	Baitul Sattar
40	Sda	Al - Hidayah
41	Meurah Dua	Babussalam
42	Sda	Baitul Muqarram
43	Sda	Al - Munawarah
44	Sda	Madinah
45	Sda	Japakeh
46	Sda	Nurul Hasanah
47	Ulim	Nurul Huda
48	Sda	Nurul Yakin
49	Sda	Baitul Iklas
50	Sda	Al - Kausar
51	Sda	Zadid Taqwa
52	Sda	Baitul Mukmin
53	Sda	Baitul Aman
54	Sda	Mustaufar
55	Jangka Buya	Taqwa
56	Sda	Kiran
57	Sda	Jabal Rahmah
58	Bandar Dua	Al - Istiqamah
59	Sda	Nurul Iman
60	Sda	Babussalam
61	Sda	Baitusa'adah
62	Sda	Baitul Atiq
63	Sda	Baiturrahman
64	Sda	Munawwarah
65	Sda	Nurul Yaqin
66	Sda	Babul Iman
67	Sda	Raudhatul Mualla
68	Sda	Babul Mubarakat
69	Sda	Baitul Izzah
70	Sda	Darul Falah

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Dalam rangka membina generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama dengan perangkat desa dan kecamatan bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam menghidupkan tempat-tempat pengajian seperti Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) dan Majelis Taklim baik di Masjid-Mesjid dan Meunasah-Meunasah. Berikut adalah jumlah TPA dan Majelis Taklim di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.50 dan 2.51 sebagai berikut:

Tabel 2.50
Jumlah Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TPA	KETERANGAN
1	Bandar Baru	89	
2	Panteraja	16	
3	Trienggadeng	45	
4	Meureudu	82	
5	Meurah Dua	48	
6	Ulim	47	
7	Jangka Buya	39	
8	Bandar Dua	61	
J U M L A H		427	

Tabel 2.51
Jumlah Majelis Taklim Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO.	KECAMATAN	JUMLAH MAJELIS TAKLIM	KETERANGAN
1	Bandar Baru	43	
2	Panteraja	10	
3	Trienggadeng	27	
4	Meureudu	30	
5	Meurah Dua	19	
6	Ulim	30	
7	Jangka Buya	18	
8	Bandar Dua	45	
J U M L A H		222	

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Gencarnya pengembangan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya bertujuan untuk menguatkan iman dan taqwa kepada masyarakat khususnya generasi muda. Namun demikian masih terdapatnya beberapa kasus pelanggaran syariat yang terjadi dilingkungan masyarakat. Kasus yang paling tinggi terjadi pada jenis kasus khalwat dari tahun 2011-2013. Berdasarkan data dari Dinas Syariat Islam hanya dua jenis kasus pelanggaran syariat yang terdata dalam lingkungan masyarakat sebagaimana pada Tabel 2.52 berikut:

Tabel 2.52
Kasus Pelanggaran Syariat Di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011-2013

TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS KASUS	PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2011	3	Judi	Diselesaikan secara adat dan pembinaan kantor	Belum ada kasus yang di proses secara hukum
2011	10	Khalwat	Diselesaikan secara adat dan pembinaan kantor	Belum ada kasus yang di proses secara hukum
2012	4	Judi	Diselesaikan secara adat dan pembinaan kantor	Belum ada kasus yang di proses secara hukum

2012	8	Khalwat	Diselesaikan secara adat dan pembinaan kantor	Belum ada kasus yang di proses secara hukum
2013	8	Khalwat	Diselesaikan secara adat dan pembinaan kantor	Belum ada kasus yang di proses secara hukum

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

2.3.1.13.1. Pengelolaan Zakat

Dalam rangka pengembangan Syariat Islam sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka potensi zakat Kabupaten Pidie Jaya terus dimanfaatkan untuk pembangunan. Pengelolaan zakat sesuai ketentuan dikelola oleh Sekretariat Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya. Rata-rata penerimaan zakat dan infaq Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2010 s.d 2013 mencapai Rp. 1.700.000.000,- per tahun.

Penerimaan zakat tersebut masuk dalam pos penerimaan asli daerah (PAD) dan setiap tahunnya telah didistribusikan kepada fakir miskin, pembangunan rumah dhuafa, fakir uzur, dan mualaf yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, melalui program penyemarakkan Syiar Islam yang dilaksanakan oleh Sekretariat Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya.

Jumlah fakir miskin dan rumah dhuafa yang telah dibantu melalui pemanfaatan potensi zakat dapat dilihat pada Tabel 2.53 dan Tabel 2.54 sebagai berikut:

Tabel 2.53
Jumlah Fakir Miskin Penerima Zakat Tahun 2010 s.d 2013

No.	Kecamatan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Bandar Baru	557	279	944	944
2.	Pante Raja	140	73	254	254
3.	Trienggadeng	382	172	593	593
4.	Meureudu	382	184	520	520
5.	Meurah Dua	249	119	305	305
6.	Ulim	427	195	372	372
7.	Jangka Buya	226	109	241	241
8.	Bandar Dua	558	289	709	709
	Total	2.921	1.420	3.938	3.938

Sumber : Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel 2.54.
Jumlah Bantuan Rumah Dhuafa

No.	Kecamatan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Bandar Baru	0	1	1	1
2.	Pante Raja	0	1	1	1
3.	Trienggadeng	0	1	1	1
4.	Meureudu	0	2	2	1
5.	Meurah Dua	0	1	1	1
6.	Ulim	0	1	1	1
7.	Jangka Buya	0	1	1	1
8.	Bandar Dua	0	1	1	1
	Total	0	9	9	8

Sumber : Baitulmal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.1.14. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi bertujuan agar informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sampai kepada masyarakat, mencerdaskan pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Indikator keberhasilan pembangunan pada urusan ini dapat dilihat banyaknya jumlah jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jaringan prasarana telekomunikasi yang akan dikembangkan meliputi jaringan terrestrial atau kabel dan jaringan nirkabel. Pengembangan layanan telekomunikasi wilayah Kabupaten Pidie Jaya perlu diarahkan ke perkotaan-perkotaan yang telah menunjukkan prospek perkembangan yang baik melalui jaringan terrestrial atau kabel dengan menambah kapasitas Satuan Sambungan Telepon (SST).

Jaringan terrestrial di Kabupaten Pidie Jaya saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kota Meureudu dan sekitarnya. Karena dirasakan masih sangat kurang maka jaringan telepon kabel untuk masa datang akan dikembangkan hingga perkotaan Kota Lueng Putu, Bereunun, Ule Gle dan sekitarnya mengikuti sistem jaringan jalan. Kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang diproyeksikan memiliki prospek perkembangan yang cepat dan pesat di masa mendatang perlu dilakukan percepatan pengembangan layanan telekomunikasi. Dalam rangka menyeimbangkan perkembangan antara kawasan perkotaan dan kawasan perkampungan dan sebagai bagian dari upaya mempercepat perkembangan kawasan-kawasan yang masih tertinggal, pengembangan layanan telekomunikasi perlu diarahkan ke kawasan-kawasan dimaksud. Pengembangan layanan dilakukan dengan memperluas jaringan dan jangkauan sistem telekomunikasi yang sudah ada, khususnya melalui penyediaan Sambungan Telepon Otomatis (STO), maupun melalui jaringan nirkabel. Pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan meliputi:

1. Pengembangan jaringan kabel seluruh kecamatan yang terdiri atas:

- a. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan yang melalui Kecamatan: Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu. Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua dan Jangka Buya;
 - b. Jaringan kabel sepanjang jaringan jalan yang melalui Kecamatan jangka buya, meurah dua, ulim; meureudu, trienggadeng, panteraja, bandar baru dan bandar dua
2. Sementara itu pengembangan jaringan nirkabel didukung oleh sekitar 37 menara BTS (Base Transciever Station) bersama seperti digambarkan dalam Tabel 2.55 dibawah ini:

Tabel 2.55
Sebaran BTS Telekomunikasi di Kabupaten Pidie Jaya

NO.	LOKASI		OPERATOR	KETERANGAN
	Kecamatan	Gampong		
1.	Bandar Baru	Keude Leung Putu Puep Lueng Nibong Puep Lueng Nibong Baroh Musa Kayee Jatoe Jiem-Jiem	Telkomsel Indosat XL Axiata Telkomsel Telkomsel Telkomsel	- - - - - -
2.	Panteraja	Msh. Tu Msh. Tu Msh. Tu Msh. Tu Peurade	Telkomsel Indosat XL Axiata STI (CDMA) Telkomsel	- - - - -
3.	Trienggadeng	Keude Trienggadeng Keude Trienggadeng Keude Trienggadeng Peulandok Tunong Msh. Meue Tungkluet Sagoe Cot Lheue Rheng	Telkomsel Indosat XL Axiata Telkomsel Telkomsel Telkomsel - -	- - - - - - 2014 2014
4.	Meureudu	Msj. Tuha Rhing Blang Mulieng Mayang Cut Msh. Lhok	Telkom Telkomsel Telkomsel Telkomsel -	- - - - 2014
5.	Meurah Dua	Pante Beureune Pante Beureune Msh. Raya Msh. Bie Seunong	Telkomsel XL Axiata Indosat Telkomsel Telkomsel	- - - - -
6.	Ulim	Keude Ulim Keude Ulim Bale Ulim Msh. Pupu	Telkomsel XL Axiata Telkomsel Telkomsel	- - - -
7.	Bandar Dua	Gp. Ule Gle Keude Ule Gle Keude Ule Gle Muko Dayah Drien Bungong Jeulanga Barat Paya Baroh	Indosat Telkomsel XL Axiata XL Axiata Telkomsel Telkomsel -	- - - - - - 2014
8.	Jangka Buya	Keude Jangka Buya	Telkomsel	-

Sumber: Dishubparkominfo Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki website milik pemerintah daerah dengan nama www.pidiejayakab.go.id yang berperan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga telah bekerjasama dengan Telkom untuk menyediakan fasilitas Taman Digital yang tersebar di tiga lokasi Kabupaten Pidie Jaya. Disamping ada beberapa SKPK yang telah memiliki domain website tersendiri diantaranya Dishubparkominfo, Dinas Pendidikan, dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

Perkembangan informasi melalui internet juga merambah pada sektor swasta sebagai salah satu bisnis usaha mereka. Ada sekitar 12 Warnet yang menyediakan jaringan dan fasilitas WiFi di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2014. Hal tersebut meningkat jika dibandingkan dengan awal berdirinya Kabupaten Pidie Jaya yang hanya 7 Warnet hingga tahun 2009.

Disamping itu, Keberadaan wartel dan warnet akan menambah pula jasa penunjang dalam pemberian informasi publik kepada masyarakat. Semakin besar rasio wartel/warnet per 1.000 penduduk menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Rasio warnet per 1.000 penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 adalah 0,16333, artinya setiap 1 warnet melayani 6.122 penduduk Pidie Jaya.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus terhadap layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan seperti halnya bidang urusan pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, perdagangan, industri dan transmigrasi.

Kabupaten Pidie Jaya fokus terhadap 6 (enam) layanan urusan pilihan yaitu Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Industri, Pariwisata, dan Transmigrasi. Hal tersebut sesuai dengan letak geografis Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki lautan dan pergunungan yang disertai kawasan lindung.

2.3.2.1. Pertanian dan Peternakan

a. Pertanian

Kabupaten Pidie Jaya dengan luas lahan pertanian yang ada masih memiliki Indeks Pertanaman (IP) sebesar 170 dari IP 200 yang ditargetkan.

Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya lahan tadah hujan dan pembangunan infrastruktur saluran irigasi tersier secara bertahap.

Tabel 2.56
Luas Baku Sawah Yang Diairi dengan Sistem Irigasi Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Luas Sawah (Ha)	Irigasi					Jumlah (Ha)
			Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Non PU	T. Hujan	
1	Bandar Baru	1.455	835	219	-	-	401	1.455
2	Panteraja	332	106	-	-	-	226	332
3	Trienggadeng	1.079	315	-	-	-	764	1.079
4	Meureudu	1.160	1.116	-	-	-	44	1.160
5	Meurah Dua	574	550	-	-	-	24	574
6	Ulim	995	768	-	-	-	227	995
7	Jangka Buya	622	-	360	262	-	-	622
8	bandar Dua	2.547	2.547	-	-	-	-	2.547
	J U M L A H	8.764	6.237	579	262	-	1.686	8.764

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah telah menjadi satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten dimana pada tahun 2012 mencapai 58,81%. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 25.784 jiwa atau 16,29 % dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Oleh Karena itu pembangunan selalu diarahkan pada sektor ini dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan ekonomi mereka. Peningkatan produksi padi di Kabupaten Pidie Jaya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya : penggunaan benih unggul bervariasi, pemupukan berimbang, pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan aplikasi teknologi terbaru.

Beberapa indikator utama capaian sektor pertanian Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57
Indikator Penting Bidang Pertanian
Tahun 2009 s/d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

No	INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013
1	Produksi Padi Rata-Rata (ton)	79.015	87.784	88.817	103.504	113.617,18
2	Produktivitas Padi (ton/Ha)	6,28	6,32	7,14	7,99	8,35
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani (m)	2.995	5.735	9.951	9.776	10.342
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani - Ternak (m)	1.134	987	931	445	1.556
5	Pembangunan jaringan saluran Tersier (m)	2.279	8.330	21.033	22.211	29.117

Sumber : Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pembangunan sejak tahun 2009 s.d 2013, produksi rata-rata padi sawah sebesar 92.991 ton. Begitu juga dengan pembangunan terhadap akses produksi dimana pemerintah telah meningkatkan pembangunan jalan usaha tani rata-rata sepanjang 7.760 m setiap tahunnya dan pembangunan jaringan saluran tersier rata-rata sepanjang 16.594 m per tahun.

Luas areal pertanian tanaman pangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.58 sebagai berikut :

Tabel 2.58
Luas Areal Pertanian Tanaman Pangan Dan Jumlah Produksi
Serta Produktivitas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1.	Padi	12.957	7,99	103.503,70
2.	Tanaman Palawija			
	- Kedelai	8.452	1,74	18.254,66
	- Jagung	156	2,87	604,16
	- Kacang Hijau	37	1,51	74,08
	- Kacang Tanah	177	1,75	324,06
	- Ubi Kayu	146	10,15	1.573,70
3.	Tanaman Hortikultura			
	- Cabe Merah	118	7,20	852,12
	- Bawang Merah	54	6,13	377,85
	- Cabe Rawit	34	3,48	233,70
	- Mentimun	86	9,83	793,23
	- Langsung	47	1,55	93,10
	- Semangka	481	16,38	7.956,84
	- Mangga	62	2,35	129,02
	- Durian	92	12,89	977,91
	- Pepaya	54	10,06	526,36
	- Pisang	1.774	8,66	12.892,74

	- Manggis	37	2,00	101,60
	- Melinjo	219	7,03	1.646,01
	- Rambutan	173	2,05	405,52
4.	Sayur-sayuran			
	- Kacang Panjang	100	4,40	417,90
	- Terong	148	6,19	1.133,27
	- Kangkung	37	4,13	211,93
	- Bayam	46	1,26	79,72

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jenis tanaman pangan tersebut merupakan komoditi unggulan masyarakat dalam rangka meningkatkan penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah kabupaten Pidie Jaya menggalakkan program dan kegiatan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan seperti padi, tanaman palawija, tanaman hortikultura, dan sayur-sayuran. Tanaman tersebut menjadi tanaman favorit masyarakat dan mudah dalam pekerjaannya serta memiliki nilai tambah bagi mereka. Adapun sistem pertanian yang harus dioptimalkan untuk mendapatkan produksi yang maksimal adalah dengan cara penggunaan bibit unggul hibrida, penggunaan pupuk berimbang, pengendalian hama dan penyakit tanaman kontiniu baik untuk tanaman padi, palawija, hortikultura dan sayur-sayuran, serta melakukan pergiliran tanaman untuk menjaga konsistensi dan kandungan unsur hara dalam tanah. Kendala yang dihadapi petani dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan di Kabupaten Pidie Jaya pada saat ini adalah gangguan hama tikus yang masih tinggi, upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya adalah gerakan massal gopryokan hama tikus.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten di mana pada tahun mencapai 58,81%. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 25.784 jiwa atau 17,29% dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu pembangunan selalu di arahkan kepada sektor ini dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan ekonomi mereka khususnya pada Jenis tanaman pangan yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dalam rangka meningkatkan penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

b. Peternakan

Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2012 yaitu 18,56% atau 286.607,16. Sub sektor peternakan ini selain berperan sebagai penyedia pangan juga berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Sub sektor peternakan juga selain berkontribusi secara langsung, juga memiliki kontribusi secara tidak langsung berupa efek pengganda (multiplier effect), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Sehingga sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Masyarakat Pidie Jaya khususnya di pedesaan pada umumnya selain bertani dan berkebun juga beternak baik sapi, kerbau, kambing, domba ayam, itik dll. Populasi ternak yang termasuk dalam kelompok ternak ruminansia besar seperti sapi berjumlah 18.505 ekor dan kerbau 2.275 ekor. Sedangkan untuk ternak ruminansia kecil seperti Kambing berjumlah 14.135 ekor dan domba 1.316 ekor. Tabel 2.59 dan 2.60 merupakan perkembangan populasi ternak dikabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO	KECAMATAN	Sapi		Jumlah	Kerbau		Jumlah	Kuda
		Jantan	Betina		Jantan	Betina		
1	Bandar Baru	1.409	2.820	4.229	158	372	530	0
2	Panteraja	259	514	773	46	104	150	0
3	Trienggadeng	1.132	2.266	3.398	186	331	517	0
4	Meureudu	1.019	2.039	3.058	96	217	313	0
5	Meurah Dua	348	697	1.045	14	16	30	0
6	Ulim	475	951	1.426	46	92	138	0
7	Bandar Dua	1.151	2.302	3.453	132	294	426	0
8	Jangka Buya	374	749	1.123	34	137	171	0
	J U M L A H	6.167	12.338	18.505	712	1.563	2.275	0

Tabel 2.60
Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Kecil
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013

NO	KECAMATAN	KAMBING	DOMBA
1	Bandar Baru	3.396	215
2	Panteraja	1.453	96
3	Trienggadeng	4.386	258
4	Meureudu	1.258	130
5	Meurah Dua	1.468	74
6	Ulim	278	236
7	Bandar Dua	1.113	189
8	Jangka Buya	783	118
	J U M L A H	14.135	1.316

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel 2.61
Potensi Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Padang Pengembalaan
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013

No	KECAMATAN	LUAS (Ha)	
		Kebun Rumput (MHT)	Padang Pengembalaan
1	Bandar Baru	44	327,83
2	Panteraja	38	49,69
3	Trienggadeng	39	89,77
4	Meureudu	43	517,15
5	Meurah Dua	45	88,76
6	Ulim	46	98,98
7	Jangka Buya	8	-
8	Bandar Dua	46	99,37
	J U M L A H	309	1.271,55

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel 2.56 menunjukkan bahwa Pidie Jaya memiliki lahan hijau untuk makanan ternak (HMT) dan padang pengembalaan seluas 1.271,55 Ha dan padang pengembalaan seluas 309 Ha. Namun demikian masih banyak masyarakat yang melepaskan ternaknya bebas berkeliaran sehingga merusak tanaman pertanian dan tanaman pekarangan masyarakat lainnya. Pemerintah Pidie Jaya terus mengupayakan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penertiban ternak melalui penerapan Qanun Nomor 3 Tahun

2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyuluhan tentang cara beternak yang baik dan modern dimana ternak diupayakan selalu berada dikandang dan petani ternak harus menyuplai kebutuhan pakan dan nutrisi yang dibutuhkan ternak seperti sistem *cut and carry* bukan dengan cara konvensional seperti ternak dilepas bebas. Selain itu pemerintah juga mengupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan peternak dalam hal pemanfaatan limbah pertanian yang dapat dijadikan pakan alternatif untuk ternak diantaranya seperti fermentasi jerami, pemanfaatan kulit buah coklat. Pemanfaatan limbah ternak sendiri sebagai bioenergi seperti pembangunan biogas dan pelatihan pembuatan pupuk kandang.

Tabel 2.62
Jumlah Populasi Ternak Unggas Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

NO	Kecamatan	Ayam			Itik		Merpati
		Buras	Ras		Itik	Itik Manila (entok)	
			Pedaging	Petelur			
1	Bandar Baru	3.902	25.000	1.252	2.966	3.800	95
2	Panteraaja	3.042	6.000	-	2.289	2.290	70
3	Trienggadeng	7.613	27.000	519	4.019	1.055	95
4	Meureudu	6.765	28.800	800	5.462	3.260	106
5	Meurah Dua	7.582	18.000	-	6.882	3.500	126
6	Ulim	7.044	10.800	2.500	5.934	842	215
7	Bandar Dua	10.911	36.000	2.350	10.267	3.200	197
8	Jangka Buya	5.564	5.400	200	2.323	926	55
	J U M L A H	52.423	157.000	7.621	40.142	18.873	59.015

Sumber: Distannak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sedangkan untuk komoditi ternak unggas (Itik, Ayam Potong dan Petelur) merupakan komoditas penghasil daging dan telur yang sangat laku keras di pasaran lokal. Saat ini belum banyak peternak atau investor yang bergerak dalam bidang budidaya ternak itik, ayam potong dan petelur yang dikelola secara modern/intensif. Meningkatnya permintaan daging itik, ayam potong dan telur ayam ras untuk keperluan rumah tangga dan restoran, menjadikan Kabupaten Pidie Jaya pengimpor daging ayam dan telur yang cukup besar. Ayam potong dan petelur merupakan komoditas yang memiliki prospek investasi yang cukup cerah di Kabupaten Pidie Jaya.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah mulai mengupayakan untuk penggiatan usaha peternakan unggas seperti yang ada di Kecamatan Bandar

Baru dan Ulim dimana pemerintah daerah sudah memberikan bantuan kandang dan ternak ayam petelur sebanyak 4.000 ekor kepada masyarakat.

2.3.2.2. Perkebunan dan Kehutanan

a. Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian. Selama ini sektor perkebunan merupakan salah satu potensi keunggulan daerah dengan komoditi kakao. Selain komoditi kakao terdapat beberapa komoditi lain yang telah dibudidayakan dari tahun 2009 hingga 2013. Komoditi tersebut antara lain kelapa dalam, pinang, kelapa sawit, karet dan pala. Komoditi tersebut selama ini menjadi sumber pendapatan petani, khususnya yang berusaha di bidang perkebunan. Kondisi perkembangan luas lahan perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Table 2.63 berikut:

Tabel 2.63
Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan 2009 – 2013

No	Komoditi	Jumlah Luas Komoditas (ha) / Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kakao	8.272,00	10.432,80	10.432,80	12.645,00	13.304,00
2	Kelapa Dalam	2.886,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.273,00
3	Pinang	1.502,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
4	Kelapa Sawit	426,00	1.059,50	1.080,00	680,00	680,00
5	Karet	18,00	8,00	3,00	3,00	443,00
6	Pala	-	23,00	18,00	18,00	17,00

Sumber: Dishutbun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Luas areal tanaman kakao di Kabupaten Pidie Jaya paling luas dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Luasan areal kakao terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009, luas areal tanaman kakao mencapai 8.272 Ha dan terus berkembang menjadi 12.904 Ha Pada tahun 2013. Komoditi lainnya seperti kelapa dalam juga mengalami peningkatan luas areal dari 2.886 ha pada Tahun 2009 menjadi 3.336 Ha pada tahun 2013. Untuk area lahan pinang meningkat dari 1.502 ha pada tahun 2009 menjadi 1.515 ha pada tahun 2013. Untuk tanaman kelapa sawit, pada tahun 2009 seluas 26 ha meningkat menjadi 680 ha pada tahun 2013.

Secara umum produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan pertambahan luas areal pengembangan. Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.64
 Persentase Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2009 – 2013

NO	KOMODITI	Tahun (Dalam Persen)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kakao	-	-	18,33	29,48	20,17
2	KelapaDalam	-	-37,40	-44,72	3,41	-9,33
3	Pinang	-	0,00	5,42	56,89	7,36
4	KelapaSawit	-	416,67	164,52	263,41	3,13
5	Karet	-	-32,08	-44,44	20,00	0,00
6	Pala	-	-	-18,48	-8,10	6,37

Sumber: Dishutbun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Adapun hasil produksi komoditi kakao terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 sampai 2011 sekitar 18,33 persen. Tahun 2011 sampai 2012 meningkat sekitar 29,48 persen dan Tahun 2012-2013 sebesar 20,17 persen. Permasalahan pada tanaman kakao adalah tingginya tingkat serangan hama dan penyakit, disebabkan oleh perubahan iklim dan kurangnya perawatan kakao sesuai anjuran teknis sehingga produksi kakao sempat menurun. Akibatnya sebagian petani sempat mencoba untuk mengganti komoditi kakao dengan komoditi perkebunan lain. Akan tetapi pada akhir tahun 2013 ada beberapa faktor seperti peningkatan produksi dan harga kakao yang tinggi, tersedianya sarana untuk pemasaran bersama menyebabkan minat petani terhadap tanaman kakao semakin baik. Kondisi ini membuat permintaan terhadap bibit dan sarana produksi kakao kembali meningkat untuk pembangunan kebun baru, pemeliharaan dan rehabilitasi tanaman kakao.

Produksi komoditi perkebunan lainnya juga mengalami peningkatan produksi seperti pinang yang rata-rata pertumbuhan per tahun berkisar 23,2 persen. Komoditi kelapa sawit meningkat tajam menjadi 282,6 persen. Hal ini disebabkan peningkatan luas areal pada tahun-tahun tersebut

Komoditi kakao dengan luas areal tanaman kakao di Pidie Jaya paling luas dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Komoditi kakao terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009, luas areal tanaman kakao mencapai 8.272 ha dan terus berkembang menjadi 12.904 ha pada tahun 2013. Sedangkan komoditi lainnya seperti sektor tanaman perkebunan kelapa dalam, juga mengalami peningkatan dari 2.886 ha pada tahun 2009 menjadi 3.336 ha sampai tahun 2013. Untuk area lahan komoditi pinang meningkat dari 1.502 ha pada tahun 2009 menjadi 1.515 ha sampai tahun 2013. Untuk tanaman kelapa sawit, pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan area tanam dari 26 ha menjadi 680 ha pada tahun 2013.

Sebagai komoditi unggulan daerah, data luas areal dan produktifitas tanaman kakao rakyat Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.65 sebagai berikut:

Tabel 2.65
Luas Areal Tanaman dan Produksi Kakao
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

No.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH Km ²	LUAS AREAL (Ha)			JUMLAH	Areal Produktif (Ha)	PRODUKSI (Kg)	PROTAS Kg/Ha
			T.B.M	T.M	T.R				
1	BANDAR BARU	281,24	487	2.774	1.870	5.131	2.784	2.099.600	756,89
2	PANTE RAJA	40,04	35	609	388	1.032	609	307.900	505,58
3	TRIENGGADENG	128,00	436	1.113	636	2.185	1.079	456.135	409,82
4	MEUREUDU	156,74	385	598	162	1.145	598	246.900	412,88
5	MEURAH DUA	292,20	230	50	129	409	50	27.899	557,98
6	ULIM	60,73	515	469	303	1.287	469	230.998	492,53
7	JANGKA BUYA	29,64	-	-	-	-	-	-	0,00
8	BANDAR DUA	174,26	787	848	80	1.715	288	221.390	261,07
JUMLAH		1.162,85	2.875	6.461	3.568	12.904	5.877	3.910.822	605,30

Sumber : Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

T.B.M : Tanaman Belum Menghasilkan

T.M : Tanaman Menghasilkan

T.R : Tanaman Rusak

PROTAS : Produktifitas

Tabel 2.65 menunjukkan bahwa rata-rata produktifitas tanaman kakao rakyat di Pidie Jaya mencapai 605 kg/ha/tahun. Produktifitas tersebut belum memenuhi standar nasional dimana 1 (satu) hektar tanaman kakao dapat berproduksi mencapai 1 - 1,5 ton per tahun. Namun demikian berdasarkan analisis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pidie Jaya, hasil produksi perkebunan tanaman kakao terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 sampai 2010 sekitar 45,35%. Tahun 2011 sampai 2012 meningkat sekitar 45,69%.

Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditi perkebunan lainnya seperti kelapa sawit yang meningkat tajam hingga 263,41% hingga pada tahun 2013 dari tahun sebelumnya. Komoditi pinang terjadi peningkatan setiap tahun. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan produksi pinang setiap tahun berkisar 27,37%, namun terjadi penurunan pada tahun 2011 sampai 2012 sekitar 0,50% yang disebabkan karena rendahnya harga pinang serta kurangnya permintaan pasar.

Dilihat dari kondisi komoditi pada sektor perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan daerah maka kakao, kelapa sawit dan kelapa dapat dikembangkan secara lebih intensif dan berkelanjutan sehingga mampu

menopang dan meningkatkan nilai tambah masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan. Selain untuk peningkatan pendapatan masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat illegal logging. Beberapa tanaman hutan yang dapat dibudidayakan masyarakat seperti jabon, sengon, mahoni dan jati super.

Hutan rakyat mulai dibudidayakan di Pidie Jaya pada tahun 2011 seluas 60 hektar, tahun 2012 seluas 25 hektar dan tahun 2013 seluas 67 hektar. Sehingga luas hutan rakyat mencapai 152 hektar dan dalam bentuk Kebun Bibit Rakyat (KBR) mulai 2010 hingga 2013 sebanyak 84 kelompok. Dalam setiap kelompok KBR luas areal hutan rakyat bervariasi hingga mencapai 30 hektar/ kelompok. Data perkembangan areal hutan rakyat dapat dilihat pada Table 2.66 berikut:

Tabel 2.66
Perkembangan Areal Hutan Rakyat 2009 s.d 2013

No	Komoditi	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hutan Rakyat (Ha)	-	-	60	25	67
	- Jabon	-	-	30	25	67
	- Sengon	-	-	30	-	-
2.	KBR (Klp)	-	21	25	28	10

Sumber: Dishutbun Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel 2.67
Jumlah Pembuatan Bibit Pada Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
Kabupaten Pidie Jaya

NO	KOMODITI	Jumlah Bibit Tahun (Batang)				Ket.
		2010	2011	2012	2013	
1	Sengon/Mahoni	621.000	217.203	116.400	-	
2	Sengon/Bayur	85.000	-	-	-	
3	Sengon/Mahoni/Bayur	48.000	-	-	-	
4	Bayur/Sentang	90.000	-	-	-	
5	Sengon	170.000	103.529	29.600	-	
6	Sengon/Jabon	-	154.127	166.100	-	
7	Sengon/Mahoni/Jabon	-	59.312	14.500	-	
8	Sengon/Jati	-	134.085	-	-	
9	Mahoni/Jabon	-	-	20.200	188.466	
10	Karet	-	-	27.000	-	
JUMLAH		1.014.000	668.256	373.800	188.466	

Sumber: Dishutbun Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

Sampai sekarang belum ada hutan rakyat yang sudah memproduksi. Perkiraan panen dari tanaman hutan rakyat sangat cepat dibandingkan tanaman lainnya. Rata-rata masa produksi tanaman kehutanan tersebut sekitar 6 tahun (diperkirakan mulai tahun 2016). Kondisi komoditi pada sektor kehutanan maka komoditi yang layak untuk dikembangkan di Kabupaten Pidie Jaya adalah Mahoni, Sentang, Jabon, Sengon, Jati, Bayur Mindi dan Ketapang. Komoditas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan kehutanan juga ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi dilaksanakan di hutan lindung dan luar kawasan hutan lindung. Reboisasi dan pengkayaan mulai dilaksanakan pada tahun 2011 hingga tahun 2013 mencapai 510 hektar dari kebutuhan 5.286 hektar. Sedangkan penghijauan dilaksanakan mulai tahun 2009 hingga tahun 2013 mencapai 306 hektar dari total kebutuhan 2.250 hektar.

Tabel 2.68
Kebutuhan dan Hasil Pembangunan Bidang Kehutanan 2009-2013

NO	KEGIATAN	KEBUTUHAN	REALISASI					JUMLAH TOTAL	SISA
			2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Reboisasi Pengkayaan	5.286 Ha			140	150	220	510	4.776
2	Penghijauan	2.250 Ha	140	40	81	25	20	306	1.944

Sumber: Dishutbun Kab. Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.2.3. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan sektor perikanan tidak terlepas dari keterlibatan para nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Pertumbuhan jumlah nelayan di Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan nelayan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2010 mengalami penurunan sekitar 9 persen. Tahun 2011 mengalami peningkatan pertumbuhan sekitar 9 persen. Tahun 2012 kembali mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 2 persen dan pada tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 7 persen. Jika dilihat dari komposisi jumlahnya, jumlah nelayan terbesar pada tahun 2011 sebanyak 2.520 orang yang terdiri dari 2.043 orang nelayan tetap dan 477 orang nelayan sambilan. Sedangkan jumlah nelayan terkecil pada tahun 2010 yaitu sebanyak 2.273 nelayan yang terdiri dari 1.651 orang nelayan tetap dan 622 orang nelayan sambilan. Pada tahun 2013 jumlah nelayan di

pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 naik rata-rata 5 persen.

Tabel 2.70
Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Nelayan Kabupaten Pidie Jaya

Tahun	Jenis Alat Tangkap								Jumlah
	Purse Saine	Purse Mini	Tramel Net	Gill Net	Pancing Tonda	Pancing Rawai	Pancing Ulur	Pukat Pantai	
2009	17	88	121	215	144	130	106	13	834
2010	16	76	114	149	154	169	90	12	780
2011	16	67	100	165	170	129	98	11	756
2012	16	63	123	151	194	128	109	11	795
2013	17	63	129	431	175	150	109	10	1.084

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya Tahun 2014.

Pertumbuhan armada perikanan di Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2009 s.d 2013 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 2.71 sebagai berikut:

Tabel 2.71
Jumlah Armada Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2014

Tahun	KATEGORI KAPAL							Jumlah
	Ukuran Kapal (GT)					Sampan Mesin	PTM	
	0-5	6-10	11-20	21-30	31-50			
2009	378	6	72	3	11	255	42	767
2010	372	54	20	6	10	296	15	773
2011	370	45	18	4	10	283	10	740
2012	360	44	19	4	11	283	10	731
2013	370	44	19	4	11	283	10	741

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya 2014

Tabel 2.72
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013

No	Komoditas	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Teri	1.420	1.665	1.825	1.512	2.175
2	Dencis	1.550	1.675	1.740	1.495	1.953
3	Tongkol	575	605	685	735	1.643
4	Peperek	320	305	206	173	118
5	Tuna	1.965	1.975	1.950	1.970	2.159
6	Kerapu	20	40	40	-	-
7	Cakalang	605	620	480	386	1.438
8	Tenggiri	128	118	129	136	154
9	Layur	145	170	54	34	32
10	Turisi	95	120	130	123	132
11	Kuwe	172	177	177	174	203
12	Kembung	410	460	460	372	393
13	Lamadang	85	85	85	90	126
14	Kakap Batu	75	75	75	75	117
15	Udang	10	45	39	11	38
	TOTAL	7.575	8.135	8.075	7.286	10.681

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya 2014

Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 2.303 orang yaitu 1.878 orang nelayan tetap dan 425 orang nelayan sambilan.

Tabel 2.69
Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013

Kategori Nelayan (Orang)	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Nelayan Tetap	1.739	1.651	2.043	2.005	1.878
Nelayan Sambilan	754	622	477	465	425
TOTAL	2.493	2.273	2.520	2.470	2.303

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya 2014

Sebagai salah satu sektor unggulan daerah, perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor ini ditunjukkan oleh dua sub-sektor perikanan yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Berdasarkan data, luas areal perikanan budidaya mencapai 2.094,61 ha pada tahun 2009 dan sedikit menurun menjadi 2.078,23 ha pada tahun 2013 dikarenakan adanya alih fungsi lahan. Adapun jenis perikanan budidaya adalah bandeng, udang, lele, nila, bawal dan lain-lain.

Produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 1.932,94 Ton dan Tahun 2013 mencapai sebesar 6.149,48 ton sedangkan pada tahun 2010 dan 2012 terjadi penurunan dibawah 1.000 ton pertahunnya. Jika dilihat dari jenis-jenis perikanan budidaya, ikan bandeng pernah mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 875,90 ton. Namun terus mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2013 yang hanya sekitar 597,57 ton.

Sub-sektor perikanan tangkap, wilayah perikananannya mencapai daerah zona ekonomi eksklusif. Adapun jenis-jenis perikanan tangkap adalah Tuna, Tongkol, Kembung, Tenggiri, Cakalang, Dencis, Teri, Kuwe, Turisi, Peperek, Karapu Batu, dan Layur. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 mencapai 10.681 ton, merupakan produksi tertinggi. Sedangkan produksi terendah tahun 2012 yaitu masih sekitar 7.286 ton.

Jika dilihat dari berbagai jenis perikanan tangkap, produksi terbesar berada pada Ikan Tuna. Produksi Tuna rata-rata dapat mencapai 1.932 ton pertahun. Produksi ikan Teri rata-rata mencapai 1.562,40 ton pertahun, ikan Dencis sebanyak 1.552,00 ton pertahun, ikan Tongkol sebesar 654,75 ton, ikan Cakalang sebesar 488,20 ton dan ikan Kembung sebesar 444,80 ton per tahun.

Pertumbuhan jumlah alat tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 7 persen, kembali turun sebanyak 3 persen

2.3.2.4. Pariwisata

Sesuai dengan Kepprés No. 38 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa seluruh sektor harus mendukung pariwisata Indonesia. Hal ini merupakan peluang bagi daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor yang mampu memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Kabupaten Pidie Jaya memiliki banyak potensi pariwisata meliputi pariwisata pantai, pegunungan, sejarah, kebudayaan, serta wisata religi. Dari seluruh potensi tersebut, Pemerintah Daerah lebih mengarahkan pembangunan wisata kepada objek wisata pantai yang memiliki panorama yang indah seperti Pantai Raja/Tripa (*Kuthang*) di Kecamatan Trienggadeng dan Pantai Kutaran (*Manohara*) di Kecamatan Meureudu. Tabel berikut merupakan potensi objek wisata Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 2.73
Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata

No.	Kecamatan	Lokasi dan Objek Wisata	Jarak Tempuh dari Kec. (Km)
1.	Meureudu	a. Air Terjun Meureudu	46
		b. Bendungan Beuracan	6
		c. Mesjid Guci Keuramat	3
		d. Sungai Bate le Blang Awe	2,5
		e. Benteng Sultan Iskandar Muda	3
		f. Pantai Kutaran (<i>Monohara</i>)	2,5
2.	Bandar Dua	a. Bukit Berbatu Ule Gle	58
3.	Ulim	a. Kuta Batee	50
4.	Trienggadeng/Panteraja	a. Pantai Raja/Tripa (<i>Kuthang</i>)	35
5.	Bandar Baru	a. Bendungan Irigasi Cubo	21
		b. Pantai Lancang Paru Lueng Putu	7,7

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

2.3.2.5. Perdagangan dan Industri

a. Perdagangan

Berdasarkan data, sektor perdagangan dan industri juga telah berkembang pesat sejak pemekaran Kabupaten Pidie Jaya. Seiring dengan kemajuan pembangunan maka pusat-pusat perdagangan kecamatan bermunculan yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat Pidie Jaya. Pusat-pusat pedagangan tersebut seperti pasar Meureudu, Pasar Ule-Glee dan Lueng Putu telah berkembang pesat sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten.

Tabel 2.74
Data Sektor Perdagangan Per Kecamatan dalam
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

No.	Kecamatan	Pasar Tradisional	Pasar Lokal	Pertokoan/ Warung/ Kios	Jumlah Pedagang	Tenaga Kerja
1.	Bandar Baru	2	-	515	495	1.454
2.	Panteraja	1	1	162	152	381
3.	Trienggadeng	1	2	355	345	785
4.	Meureudu	1	3	660	635	1.721
5.	Meurah Dua	1	1	197	187	489
6.	Ulim	1	1	195	182	636
7.	Jangka Buya	1	2	180	170	424
8.	Bandar Dua	1	2	711	681	1.642
	Jumlah	9	12	2.975	2.847	7.532

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Sektor perdagangan telah mampu menyerap tenaga kerja 7.542 orang dan memberikan kontribusi terbesar ke tiga setelah sektor pertanian dan jasa-jasa terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya yaitu 10,5% atau 162.209,04 pada tahun 2012. Sektor perdagangan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Pemerintah terus mengembangkan sektor ini dengan program pengembangan pasar dan pusat perdagangan antar kecamatan.

b. Industri

Adapun jenis sektor riil lainnya yang berkembang di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri masyarakat seperti industri rumah tangga yang masuk dalam kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) meliputi Anyaman Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional, Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan terhadap industri tersebut setiap tahunnya. Industri kerajinan yang paling tinggi pertumbuhannya adalah kelompok Anyaman Tikar Pandan. Pada tahun 2009 hanya 54 pengrajin dan meningkat menjadi 371 pengrajin hingga tahun 2013. Selanjutnya kelompok pembuat garam dari 120 pengrajin pada tahun 2009 meningkat menjadi 260 pengrajin hingga tahun 2013. Namun yang paling memprihatinkan adalah usaha industri batu bata yang pada tahun 2009 mencapai 115 unit usaha dan turun drastis hingga tersisa 7 unit usaha saja pada tahun 2013. Penyebab utama penurunan dikarenakan sulitnya mendapat kayu bakar dan bahan baku untuk pengolahan sehingga membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya produksi yang tinggi dan mereka kesulitan untuk bersaing. Disamping

itu permintaan pasar terhadap batu-bata berkurang setelah pasca rehabrekon tsunami berakhir.

Adapun industri yang berkembang di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri dimiliki oleh masyarakat yang bergerak pada sektor ril seperti industri rumah tangga dikelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM), meliputi kegiatan anyaman tikar pandan, kerajinan rotan, kerajinan bambu, bordir, menjahit, pandai besi, garam, kue tradisional, coklat, penerangan ikan, batu bata, tahu/tempe, dan lain-lain.

Tabel 2.75
Perkembangan jumlah Industri Kecil Menengah
di Kabupaten Pidie Jaya 2009-2012

NO	KECAMATAN	Jumlah Industri/Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Bandar Baru	136	146	159	179
2	Pante Raja	23	23	23	23
3	Trienggadeng	135	235	244	255
4	Meureudu	106	196	214	80
5	Meurah Dua	11	11	11	176
6	Ulim	138	168	177	189
7	Bandar Dua	34	34	41	55
8	Jangka Buya	8	8	8	14
	JUMLAH	591	821	988	971

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Pidie Jaya 2013

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor Industri Kecil dan Menengah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 591 Unit dan tahun 2012 sebanyak 971 unit, berarti dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mengalami perubahan 380 unit (64,92%) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada umumnya dilakukan oleh anggota rumah tangga yang mempunyai kemampuan yang terbatas, baik dari segi sumber daya manusia maupun dukungan modal usaha dimiliki.

Berdasarkan kondisi yang ada maka pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat melakukan upaya dalam pelaksanaan program tahun 2014 sampai dengan 2019 pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah. Menurut jenis Industri Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan komoditi industri pangan, industri bangunan, industri logam/elektronika, industri kerajinan dan industri kimia. Adapun data menurut jenis industri Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut:

Tabel 2.76
Jenis Komoditi Industri Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012

No.	KOMODITI INDUSTRI	UNIT USAHA	T.KERJA (ORANG)	KAPASITAS PRODUK/TH		NILAI (Rp.000)		
				JUMLAH	SATUAN	INVESTASI	PRODUKSI	BB/BP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kilang Padi Tahu / Tempe	79	310	62.736	Ton	12.862.975	266.564.040	219.335.820
2	Mie Basah	11	31	262.440	Kg	150.850	11.083.740	3.911.100
3	Kue Adee	6	23	16.560	Kg	187.500	1.559.952	978.480
4	Pengolahan Ikan	16	97	462.120	Buah	136.000	115.530.000	69.318.000
5	Industri Jamu	2	4	35.400	Kg	5.750	708.000	531.000
6	Industri Cokolate	1	8	30.600	Botol	65.000	183.600	122.400
7	Tilam / Kasur	1	8	27.000	Kotak	107.500	2.440.800	1.146.000
8	Ind.Sepatu Kulit	1	4	528	Buah	45.000	132.000	92.400
9	Penjahit pakaian	1	6	1.440	Pasang	98.500	216.000	180.000
10	Perabot / Ketam	32	85	45.720	Pasang	262.700	9.576.000	8.750.000
11	Batu Bata	77	331	7.416	Buah	6.975.400	15.981.480	14.550.192
12	Pandai Besi Bengkel	7	68	1.428.000	Biji	192.350	499.800	285.600
13	Mobil (Roda 4)	9	29	10.440	Buah	55.300	626.400	417.600
14	Bengkel Motor (Roda 2)	13	37	4.476	Unit	449.000	-	-
15	Perabot Aluminium	74	177	54.708	Unit	3.202.000	-	-
16	Bengkel Las	3	16	372	Buah	104.300	465.000	316.200
17	Kerajinan Rotan	2	7	1.128	Unit	101.000	-	-
18	Kerajinan Bambu	2	9	3.516	Buah	55.000	173.700	127.800
19	Sapu Ijuk	5	6	564	Buah	21.950	112.800	64.584
20	Ind. Kerajinan Tikar Pandan	1	2	2.880	Buah	1.500	96.000	86.400
21	Asam Cuka	366	371	41.244	Lembar	721.990	8.248.800	6.936.960
22	Garam	1	2	72.000	Lusin	25.000	900.000	633.600
23	Pupuk Organik Cair	260	591	5.761.728	Kg	598.300	23.046.912	17.285.184
24		1	5	12.000	buah/kotak	150.000	240.000	120.000

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Pidie Jaya 2013

Dari data Tabel 2.76 terlihat bahwa kelompok industri yang paling tinggi pertumbuhannya adalah anyaman tikar pandan pada tahun 2009 hanya 54 orang dan meningkat menjadi 366 orang pada tahun 2012. Selanjutnya kelompok usaha industri garam dari 120 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 260 orang hingga tahun 2013. Namun pada usaha industri batu bata terjadi penurunan pada tahun 2009 mencapai 115 unit usaha dan turun drastis hingga dapat bertahan sebanyak 7 unit usaha saja pada tahun 2013. Penyebab utama penurunan dikarenakan sulitnya mendapat kayu bakar dan bahan baku pengolahan, sehingga pengusaha harus mengeluarkan biaya produksi yang tinggi sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dengan harga

pasar, selanjutnya permintaan pasar menurun karena rehab/rekon pasca tsunami telah selesai dilaksanakan.

Untuk industri besar, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menaruh perhatian serius terhadap upaya pengembangan industri berskala besar. Untuk pencapaian tersebut telah dilakukan berbagai kerjasama dan komitmen bersama dengan pihak investor yang berminat membuka kegiatan usaha dibidang industri. Pemerintah memfasilitasi serta memberikan kemudahan baik terkait dengan perizinan dan hal-hal lain yang memungkinkan pihak daerah mampu melaksanakannya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai tingkat pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing tersebut seperti kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Sebagai kabupaten yang tergolong masih sangat muda maka Pidie Jaya terus menggali potensi dan keunggulan daerah yang memiliki daya saing dan kekhasan tersendiri dengan daerah lain guna mengurangi ketertinggalannya dengan daerah lain khususnya di Provinsi Aceh. Guna mewujudkan daya saing daerah maka kemampuan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu fokus pembangunan guna mewujudkan daya saing tersebut. Ada beberapa indikator penting yang menjadi aspek daya saing diantaranya adalah:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Konsumsi RT Perkapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksud untuk mengetahui tingkat konsumsi RT yang menjelaskan seberapa besar pengeluaran RT tersebut. Semakin besar konsumsi RT maka semakin besar kemampuan untuk peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi masyarakat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan pengeluaran yaitu makanan dan non makanan. Untuk Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.77 sebagai berikut:

Tabel 2.77
 Angka Konsumsi RT Perkapita
 Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Total pengeluaran RT / bln(Ribu Rp. PPP)	620,180	622,160	626.890	630.370	635.100
2	Jumlah RT	38.932	41.110	44.223	44.279	44.390
3	Rasio (1./2.)	-	-	-	-	-

Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2013. (Data diolah)

* Angka perkiraan sementara

Lebih lanjut BPS Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan bahwa Pendapatan Per Kapita ADHB Tahun 2012 mencapai 9,34% atau Rp. 9.535.157 per tahun. Jumlah agregat tersebut menunjukkan pendapatan rata-rata penduduk Pidie Jaya selama tahun 2012. Namun demikian itu bukanlah sebuah ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini sangat tergantung kepada tingkat distribusi pendapatan yang dihitung melalui Indeks Gini yang akurat.

b. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Petani

Pembangunan ekonomi harus fokus pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, khususnya pada daerah-daerah rawan pangan di Kabupaten Pidie Jaya. Ketahanan pangan merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan kebutuhan konsumsi pangan daerah terutama dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial dan kebencanaan seperti bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Disamping menjaga ketahanan pangan daerah, pemerintah harus mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah diberbagai sektor khususnya sektor unggulan daerah. Sebagai wilayah pertanian dan perkebunan menginovasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan peningkatan nilai tambah sehingga mampu untuk memberikan kesejahteraan khususnya kepada petani. Selama ini banyak hasil pertanian dan perkebunan langsung dijual ke daerah lain seperti Sumatera Utara tanpa mendapatkan keuntungan yang berarti bagi petani.

Selama ini banyak hasil pertanian dan perkebunan langsung dijual kedaerah lain seperti Sumatera Utara tanpa mendapatkan keuntungan yang berarti bagi petani. Akibatnya nilai tambah hasil produksi pertanian Kabupaten Pidie Jaya banyak dinikmati oleh orang luar Kabupaten. Sekitar 54 persen lebih atau sekitar 61.354 ton hasil pertanian (padi) dijual ke luar daerah Pidie Jaya. Sebesar 36 persen atau sekitar 40.903 ton digunakan untuk konsumsi pangan masyarakat, dan sisanya sebanyak 10 persen atau

hanya 11.362 ton yang diolah oleh industri lokal untuk menghasilkan nilai tambah.

Indikator bidang ketahanan pangan yang telah terlaksana di Kabupaten Pidie Jaya melalui program kegiatan ketahanan pangan seperti Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat dilihat pada tabel 2.78 berikut :

Tabel 2.78
Indikator penting Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2009 s/d 2013
Kabupaten Pidie Jaya.

NO	INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
1	Pengembangan Lumbung Pangan (Unit)	-	2	2	-	-	4
2	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) / Kelompok	2	-	2	1	-	4
3	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) / Kelompok	-	3	1	-	1	5
4	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) / Klpk.	-	-	-	1	28	28

Sumber: Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pidie Jaya 2014

Dalam upaya mengembalikan kesejahteraan petani kegiatan yang mendukung seperti pengembangan lumbung pangan masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok oleh masyarakat tani.

Melihat lokasi pengembangan lumbung pangan masyarakat yang masih belum merata dalam Kabupaten Pidie Jaya sudah sepantasnya hal ini menjadi titik perhatian serius pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan di kabupaten Pidie Jaya lewat dukungan anggaran.

Alat yang paling efektif untuk membalikkan posisi petani dari yang semula mengalami ketergantungan menjadi pihak yang mengendalikan adalah organisasi petani. Melalui asosiasi, petani bisa mendapatkan harga hasil panennya yang lebih tinggi, penimbangan lebih adil, hingga peningkatan taraf hidup generasi selanjutnya. Dengan fungsi konvensionalnya lumbung pangan dapat membantu masyarakat meningkatkan ketahanan pangan dalam skala kecil. Selanjutnya dengan meumbuhkembangkan kemampuannya diharapkan fungsi lumbung pangan dapat meningkat, tidak hanya membantu ketahanan pangan masyarakat dalam skala terbatas, namun dalam jangka panjang dapat ditingkatkan lagi menjadi lembaga ekonomi yang berkembang dipedesaan.

Pada skala yang lebih luas, gabah yang dijual petani secara bersamaan pada musim panen menyebabkan market-able surplus yang cukup besar. Rendahnya daya tawar petani untuk menunggu saat penjualan yang baik dan berkurangnya kemampuan BULOG dalam menyerap sebagian market able surplus tersebut telah berdampak pada menurunnya harga gabah dibawah harga dasar selama musim panen raya padi.

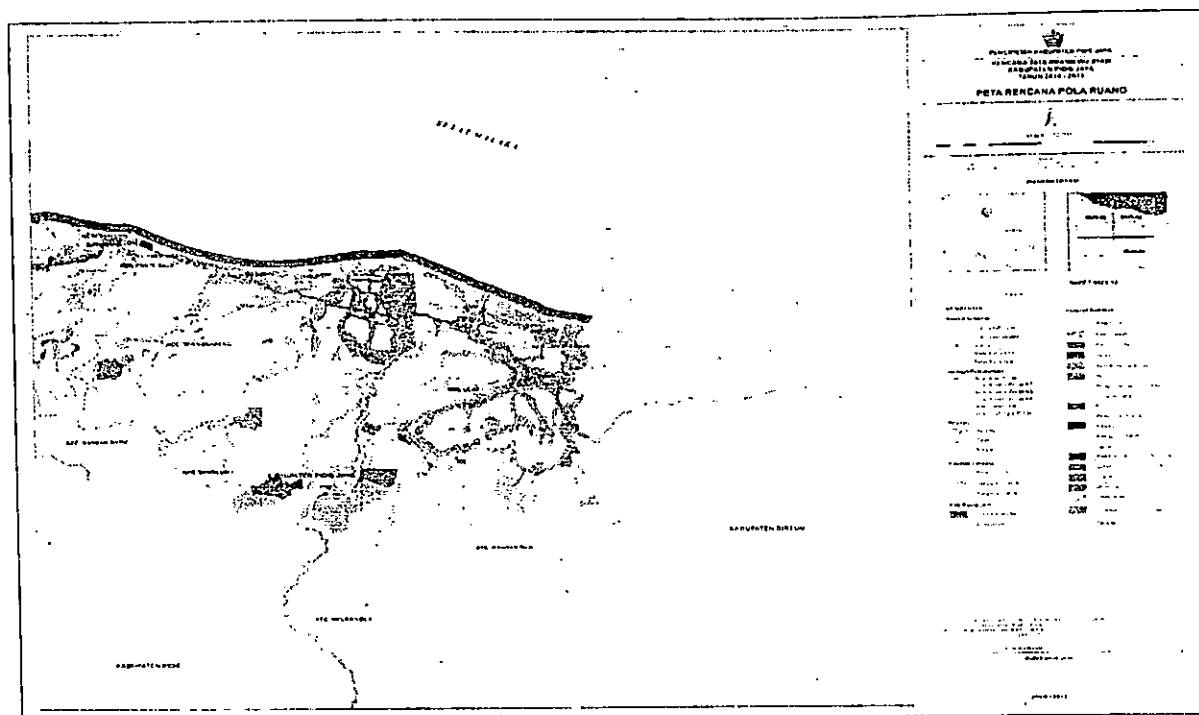
Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak pada petani dengan mengambil alih tata cara pembelian dan pendistribusian gabah petani dengan harga yang baik. Semua gabah hasil panen petani dibeli oleh pemerintah kabupaten baik bekerja sama dengan BULOG atau membangun lumbung pangan kabupaten untuk menampung gabah hasil panen petani. Disamping itu pemerintah juga harus mengupayakan agar pengolahan gabah menjadi beras sampai dikarungkan berada didalam Kabupaten baik dengan mengaktifkan kembali pabrik-pabrik pengolahan yang selama ini telah non aktif atau membangun pabrik pengolahan baru yang memenuhi standar nasional. jika upaya-upaya ini dapat direalisasikan, peningkatan nilai tambah petani akan semakin meningkat dengan sendirinya dan juga dapat terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pengembangan suatu wilayah haruslah didukung dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung percepatan suatu wilayah. Wilayah pedesaan yang menjadi akar kekuatan ekonomi rakyat di mana sektor pertanian menjadi andalan mereka. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengembangkan fasilitas wilayah/infrastruktur yang menuju pada akses-akses produksi agar mudah terhubung dengan wilayah pemasaran sehingga mampu menekan biaya produksi dan memberikan manfaat serta keuntungan bagi petani. Fasilitas tersebut seperti jalan usaha tani, irigasi, saluran tersier dll.

Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Qanun RTRW tersebut memuat diantaranya Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Penetapan Wilayah Strategis Kabupaten. Struktur ruang memuat rencana sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah. Sedangkan Rencana Pola Ruang memuat kawasan hutan lindung, kawasan budidaya, pertanian, perikanan, pemukiman, industri, dan pariwisata.

Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pidie Jaya



Sumber : Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sebagai daerah yang sedang fokus terhadap pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung percepatan pembangunan, maka arah kebijakan pembangunan harus mengacu pada RTRW Kabupaten. Bila dilihat pada rencana pola pemanfaatan ruang dalam Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya maka sebagian besar wilayah Pidie Jaya dikelilingi oleh Kawasan Lindung yang mencapai 53,51 persen atau berkisar 50.946,86 ha.

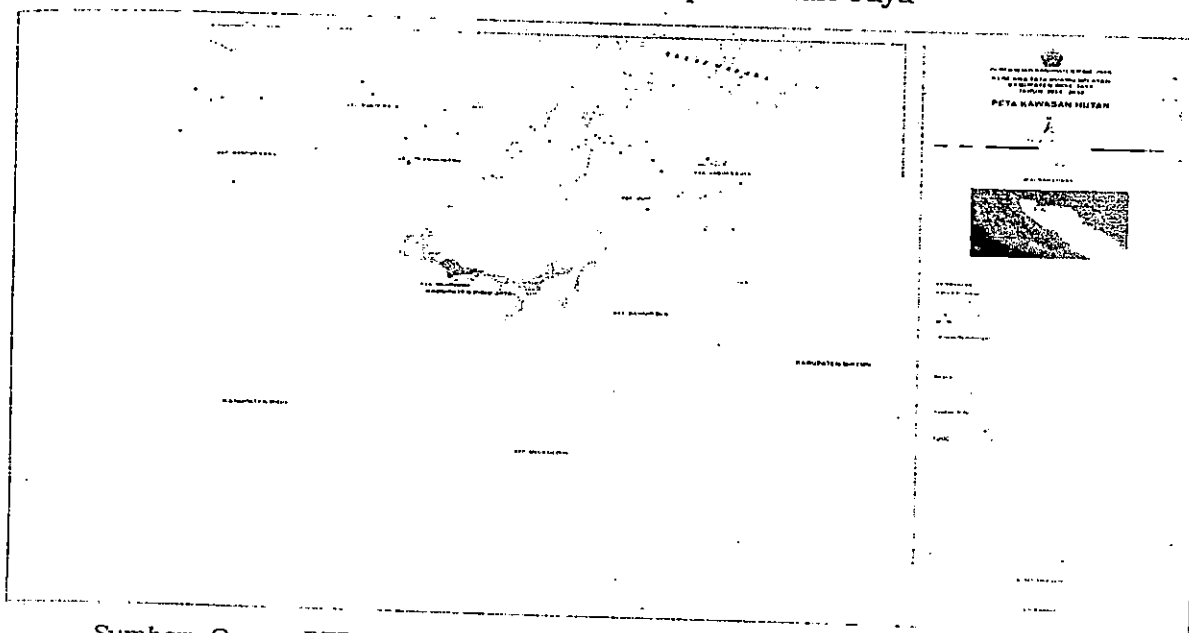
Sedangkan untuk sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten, akan dimanfaatkan pola ruangnya sebesar 31,04 persen atau 29.539 ha. Sebesar 27,29 ha atau 0,03 persen diperuntukkan untuk kawasan industri strategis, dan sebesar 7.687 ha atau 5,14 persen dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Tabel 2.79 berikut menjelaskan perbandingan antara Luas Kawasan Lindung dengan Luas Kawasan Budidaya.

Tabel 2.79
Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya
Tahun 2014 Kabupaten Pidie Jaya

No	Uraian	Luas (Ha)	Prosentase
1	Luas Kawasan Lindung	50.946,86	53,51
2	Luas Kawasan Budidaya	44.264,10	46,49
3	Jumlah Keseluruhan	95.210,96	100,00
4	Rasio (1./2.)	1 : 1	-

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.

Gambar 2.3
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pidie Jaya



Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan membuka peluang kesempatan kerja untuk masyarakat, Kabupaten Pidie Jaya sangat terbuka terhadap investasi baik dari dalam daerah, luar daerah bahkan dari luar Negeri. Sektor-sektor yang di harapkan menjadi daya tarik berinvestasi diantaranya sektor perkebunan, perikanan, pengolahan, perdagangan, pariwisata dan jasa-jasa.

Produk unggulan yang mampu meningkatkan investasi di Kabupaten Pidie Jaya seperti Kakao, peternakan, usaha hasil hutan bukan kayu, perikanan, usaha tani padi sawah, dan usaha industri makanan. Produk-produk tersebut menduduki tempat strategis karena disamping mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, produk-produk tersebut harus sangat didukung oleh kondisi alam Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan investasi pada berbagai komoditas unggulan sesuai dengan dukungan sumber daya daerah. Hal ini sangat tergantung pada dukungan pemerintah untuk menyediakan fasilitas penunjang sebagai supporting sistemnya

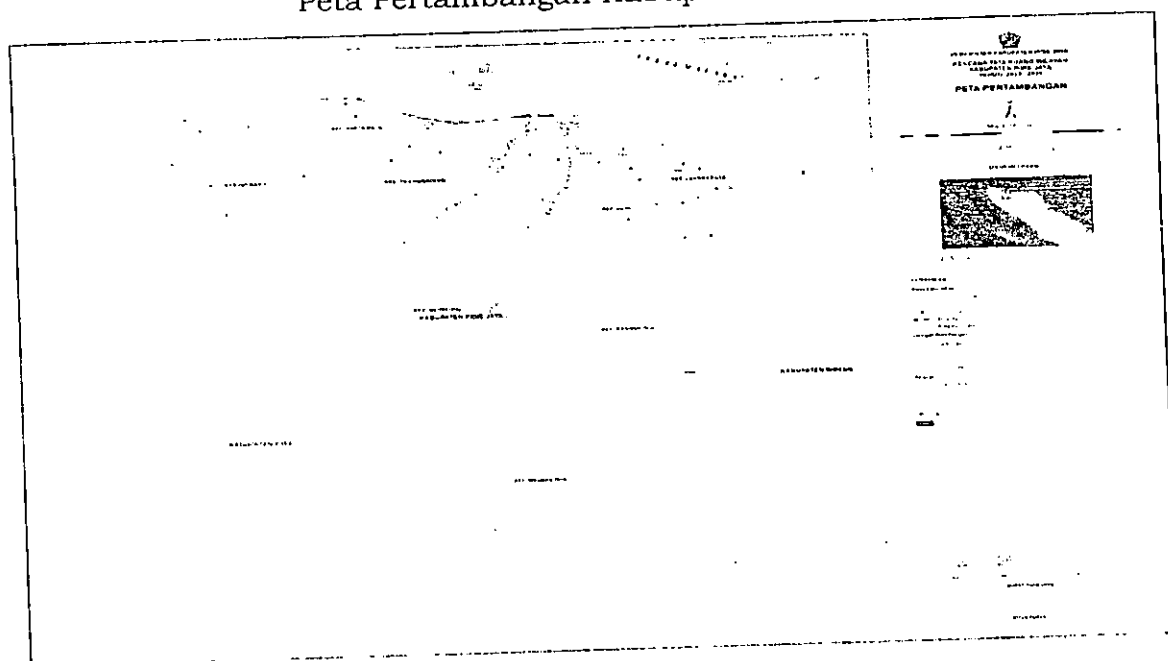
Disamping itu, Investasi itu sendiri sangat tergantung dari Iklim investasi seperti stabilitas dan keamanan wilayah. Indikator yang menjadi sorotan diantaranya angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, dan pemogokan kerja. Jika dilihat dari hal tersebut, Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong sangat rendah dari kondisi tersebut, hal tersebut terutama sekali pasca konflik

antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung damai.

Disamping iklim investasi, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan senantiasa diusahakan untuk memberikan pelayanan terbaik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar investor menjadi tertarik berinvestasi.

Untuk investasi industri, Kabupaten Pidie Jaya telah menyediakan lahan seluas 91,27 Ha berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk sebagai Kawasan peruntukan industri menengah. Khusus kawasan industri perikanan seluas 19,63 Ha terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja.

Gambar 2.4
Peta Pertambangan Kabupaten Pidie Jaya



Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014.

Untuk sektor pertambangan sebagai potensi investasi, Kabupaten Pidie Jaya, termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang diindikasikan mempunyai potensi bahan galian Besi, Emas (Ag), Tembaga (Cu), Timah Hitam, Seng (Zn), dan Perak (Au). Kandungan pasir besi terdapat disepanjang garis pantai mulai dari kecamatan Jangka Buya sampai ke kecamatan Trienggadeng. Kandungan Batu Besi (Iron Ore) dan Emas serta DMP Material di Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng dan Meureudu.

Kemudian untuk potensi investasi lainnya adalah pemanfaatan potensi Sumber Daya Air. Jika dilihat dari potensi sumber daya air yang ada seperti Krueng Meureudu sangat memungkinkan untuk dibangun Pembangkit Listrik

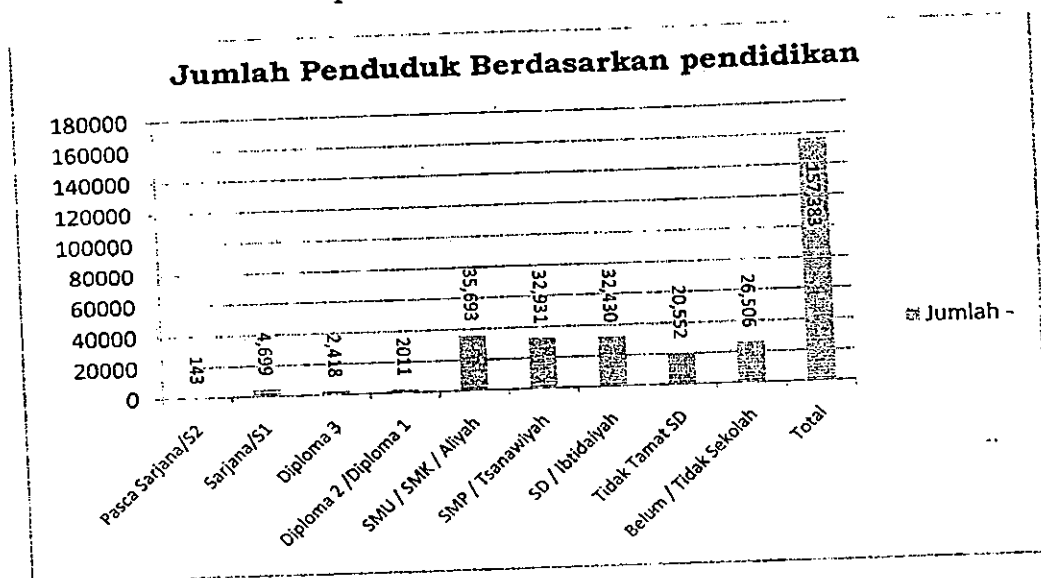
Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam hal ini sudah ada beberapa perusahaan swasta yang telah mengantongi izin prinsip untuk melakukan survey lokasi di sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya dengan tujuan mendirikan PLTMH. Pengairan air sawah sehingga masyarakat dapat bercocok tanam dengan air yang cukup, pemenuhan air untuk kebutuhan rumah tangga yaitu dengan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bahkan bisa dibangun perusahaan air minum dalam kemasan. Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan pernah dibangun dan mulai berproduksi di Krueng Meureudu tetapi perusahaan tersebut hancur akibat konflik.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk menjadikan SDM daerah yang memiliki daya saing, berkualitas, kreatif dan berprestasi. Ketersediaan SDM yang handal merupakan tolok ukur suatu kemajuan daerah dan kesiapan daerah untuk menuju proses persaingan dengan daerah yang lain terutama sekali dalam perekonomian. Salah satu menjadi kekuatan dan keunggulan Kabupaten Pidie Jaya adalah adanya sumber daya manusia yang berprestasi baik di Aceh ataupun Nasional, baik yang bekerja di pemerintahan, swasta, ataupun politisi.

Tabel 2.4 pada halaman sebelumnya telah menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2012. Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi dan akademi (D1/D2, D3, S1, S2, dan S3) sebanyak 9.271 orang atau 5,89%. Penduduk yang menempuh pendidikan menengah sebanyak 32.931 orang atau 20,92% dan yang menempuh pendidikan menengah atas sebanyak 35.693 orang atau 22,68%. Jumlah penduduk yang menempuh sekolah dasar atau setingkatnya mencapai 32.430 orang atau 20,61%. Namun demikian jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menamatkan pendidikan dasar relatif besar yaitu mencapai 13,06% atau sekitar 20.552 orang. Sedangkan sisanya sebesar 29,90% atau sebanyak 26.506 orang merupakan penduduk yang belum memasuki usia sekolah. Lebih jelas dapat dilihat dalam grafik 2.8 sebagai berikut:

Grafik 2.8
 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
 Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013



BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan untuk pembangunan daerah merupakan bagian sentral yang menentukan suatu kebijakan ataupun program dapat di jalankan. Masalah pendanaan pembangunan sering terjadi permasalahan yang serius dari tahun ke tahun, hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan yang begitu besar. Untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, transparan serta efektif dan efisien dengan menggunakan analisis kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu.

Analisis dalam pengelolaan keuangan daerah, bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dilakukan analisis terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk menganalisis kinerja keuangan maka diperlukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun realisasi kinerja keuangan sebelumnya.

Analisis kinerja keuangan yang harus dilakukan meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang tergambar dalam struktur APBD. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan struktur APBD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan negara, Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Qanun-Qanun yang mengatur tentang APBD dan laporan keuangan lainnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Baik buruknya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat tercermin dari kinerja keuangan dimasa lalu. Hal tersebut

dapat dilihat melalui kinerja pelaksanaan APBK dan Neraca Keuangan Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013).

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 menjelaskan bahwa Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai paraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 25 s.d 30 Permendagri 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, serta Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Saat ini Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya sangat tergantung pada sumber Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat setiap tahun rata-rata berkisar 70% dari total penerimaan daerah. Disisi lain kontribusi dari Pos Pendapatan Asli Daerah sangat minim, hanya 3,27% dari total penerimaan daerah. Kondisi ini sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Sejak tahun 2009 s.d 2013, realisasi pendapatan daerah rata-rata tumbuh mencapai 12,32%. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata 34,83% per tahun. Di lihat dari segi prosentase pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir sudah baik. Namun demikian belum dirasakan maksimal karena masih jauh dari target PAD yang telah ditetapkan setiap tahunnya dan kurang dari 4% realisasinya dari keseluruhan pendapatan daerah. Sumber PAD terbesar Kabupaten Pidie Jaya bersumber dari pos retrebusi daerah dan pajak daerah. Sedangkan sumber lain seperti zakat dan lain-lain pendaptan asli daerah yang sah menunjukkan pergerakan yang positif.

Pemeintah kabupaten harus lebih mengoptimalkan potensi PAD dan menggali sumber-sumber penerimaan baru sebagai sumber utama penerimaan daerah. Sumber PAD sekurang-sekurangnya dapat mencapai 10% dari total penerimaan daerah. Pemerintah harus dapat meminimalisir sumber kebocoran PAD dan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efesien.

Tabel 3.1 dibawah ini memperlihatkan pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2009 s.d 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013 (dalam ribuan)

Tahun	Target		Realisasi		Realisasi (%)
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
2009	5.231.612	-	4.575.408	-	87,46
2010	6.926.873	17,93	4.598.654	0,51	66,39
2011	12.290.847	47,81	8.243.166	79,25	67,07
2012	18.167.663	77,43	9.728.700	15,27	53,55
2013*	21.426.427	32,40	14.039.505	44,31	65,52
Rata-rata Per Tahun		43,90		34,83	68,00

Sumber: Bappeda, data diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)

*) Realisasi Tahun 2013 (belum di audit)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp. 9 Millyar lebih atau 200% sejak 5 (lima) tahun terakhir. Disamping itu, rata-rata pertumbuhan mencapai 34,83% per tahun. Pada Tahun Anggaran 2013 realisasi PAD sampai dengan akhir bulan Desember (Triwulan IV) mencapai Rp.14 Millyar lebih atau 65,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 21 Millyar lebih. Hal tersebut menunjukkan tren positif terhadap sumber penerimaan asli daerah. Namun demikian penerimaan PAD tersebut dirasakan belum optimal dan masih jauh dari harapan dan target yang telah ditetapkan.

Selama ini, penetapan target penerimaan PAD Kabupaten Pidie Jaya dari tahun ketahun tidak berpedoman pada tingkat realisasi tahunan, namun penetapannya selalu berpedoman pada target yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada rata-rata prosentase realisasi PAD yang hanya 68,00% per tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa penetapan target penerimaan PAD tidak realistis dari keadaan dan potensi sesungguhnya.

Pada bagian dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber pendanaan dari transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas: 1) bagi hasil pajak, 2) bagi hasil bukan pajak (SDA), 3) dana alokasi umum dan 4) dana alokasi khusus. Dan dana Penguat serta Pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya, pendapatan transfer Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi capaian penerimaan tersebut dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tergambar pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya
Tahun Anggaran 2009 - 2013 (dalam ribuan)

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2009	283.380.005	287.600.578	101,49	4.220.573	-
2	2010	343.598.041	303.482.881	102,01	-40.115.160	5,52
3	2011	351.021.825	350.404.394	99,82	-617.433	15,46
4	2012	372.462.532	374.283.994	100,49	1.821.462	6,81
5	2013*	426.242.521	429.030.848	100,65	2.788.327	14,63
6	Rata-rata per tahun			98,16		10,61

Sumber: Bappeda, data diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)
*) Realisasi Tahun 2013 (belum di audit)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2009-2013, Realisasi Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp. 141 Millyar lebih atau 49,18%, dari Rp. 287 Millyar lebih pada Tahun 2009 menjadi Rp. 429 Millyar lebih pada Tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan sebesar 10,61% per tahun. Pada Tahun Anggaran 2013, hingga Triwulan IV (posisi belum di audit), pencapaian realisasi Dana Perimbangan mencapai 100,65% dari target yang telah ditetapkan.

Secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 s.d 2013. Hal tersebut seiring dengan peningkatan komponen penerimaan utama seperti DAU dan DAK yang ditransfer oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Penambahan tersebut dikarenakan realisasi penerimaan APBN yang juga terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menambah porsi dana perimbangan yang diterima oleh daerah.

Lebih jelas rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013) disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d Tahun 2013 (dalam ribuan)

No	Uraian	Jumlah (dalam jutaan)					Rata Tumbuh (%)
		Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4.575.408	4.598.654	8.243.166	9.728.700	14.039.505	34,8
1.1.1	Pajak daerah	1.902.199	2.172.117	3.245.651	3.804.131	3.754.327	19,9
1.1.2	Retribusi daerah	1.080.254	1.123.769	1.850.178	1.921.475	6.919.806	83,2
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.423	171.503	241.835	418.457	783.520	3.038,4
1.1.4	Zakat	-	-	2.622.067	1.900.000	1.328.626	14,4
1.1.5	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.171.788	1.176.263	2.905.500	2.118.919	1.253.224	19,9
1.2	Dana Perimbangan	287.600.578	303.482.881	350.404.392	374.283.994	429.030.848	10,6
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	18.650.274	22.120.108	20.303.414	18.897.356	27.809.406	12,7
1.2.2	Dana bagi hasil SDA	8.141.952	14.505.654	11.326.407	12.061.638	-	-9,3
1.2.3	Dana alokasi umum (DAU)	212.543.352	231.101.119	272.626.771	307.809.690	350.574.172	13,4
1.2.4	Dana alokasi khusus (DAK)	48.265.000	35.756.000	46.147.800	35.525.310	50.647.270	5,7
1.2.5	Dana Penguat	-	-	-	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.294.800	28.383.314	81.882.566	51.053.411	62.312.392	41,7
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	562.079	25,0
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari prov. dan dari Pemda lainnya	-	5.276.443	8.892.324	8.695.364	9.129.208	17,8
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	47.990.242	18.662.683	42.621.105	16,8
1.3.5	Bantuan keuangan dari prov. Dan Pemda lainnya **)	-	-	-	-	10.000.000	25,0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	30.294.800	23.106.871	25.000.000	23.695.364	-	-30,2
A	Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)	322.051.046	383.488.536	440.530.126	426.370.743	505.382.747	12,3

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

*) Realisasi Tahun 2013 (belum di audit)

***) Sesuai dengan asal sumber bantuan keuangan

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009 s.d 2013), rata-rata realisasi belanja daerah per tahun mencapai 98,9% dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) rata-rata mencapai 2% dari keseluruhan APBK Pidie Jaya setiap tahunnya. Masih besarnya SiLPA tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan APBK masih belum optimal.

3.1.2 Neraca Keuangan Kabupaten Pidie Jaya

Sesuai dengan penjelasan pada lampiran Permendagri 13 tahun 2006 bahwa Neraca keuangan daerah berisikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan komponen rekening utama yang masih dapat dirincikan ke dalam sub rekening sampai level rincian yang lebih detail. Neraca keuangan daerah merupakan salah satu kesatuan dari laporan keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilaporkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gambaran Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama kurun waktu 2009-2012 seperti terlihat pada Tabel 3.4 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.4
RATA -RATA PERTUMBUHAN NERACA
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 s.d 2012

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	168.806.860	309.765.454	452.204.152	555.713.438	50,79%
1.1.	ASET LANCAR	25.654.638	26.503.139	9.737.762	17.578.444	6,86%
1.1.1.	Kas	24.873.617	23.941.396	7.117.896	13.230.672	3,95%
1.1.2.	Piutang	68.736	92.975	158.420	367.510	79,21%
1.1.3.	Persediaan	712.285	2.468.768	2.461.446	3.980.262	102,67%
1.2	INVESTASI	1.250.000	2.250.000	3.250.000	5.000.000	59,43%
1.3.	ASET TETAP	141.902.222	280.587.715	438.623.090	532.395.344	58,48%
1.3.1.	Tanah	13.641.699	24.906.229	32.373.449	38.184.385	43,50%
1.3.2.	Peralatan dan mesin	32.455.652	43.765.579	70.745.609	84.345.295	38,57%
1.3.3.	Gedung dan bangunan	21.136.070	36.979.376	62.540.992	91.365.101	63,39%
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	55.320.784	82.220.096	128.543.763	165.528.064	44,48%
1.3.5.	Aset tetap lainnya	11.028.267	18.927.656	22.334.381	23.382.542	31,44%
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	8.319.750	73.788.779	122.084.896	129.589.957	286,17%
1.4.	ASET LAINNYA	-	424.600	593.300	739.650	21,47%
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	0,00%
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	0,00%
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	0,00%
1.4.4.	Aset tak berwujud	-	-	-	-	0,00%
1.4.5.	Aset Lain-Lain	-	424.600	593.300	739.650	21,47%
	JUMLAH ASET DAERAH		309.765.454	452.204.152	555.713.438	22,96%

2.	KEWAJIBAN	-	4.674.200	1.112.918	278.019	-50,40%
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	4.674.200	1.112.918	278.019	-50,40%
2.1.1.	Utang jangka pendek	-	39.687	958.899	124.000	743,03%
2.1.2.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	4.634.513	154.019	154.019	-32,23%
2.1.3.	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Pokok Pinjaman	-	-	-	-	0,00%
2.1.5.	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman	-	-	-	-	0,00%
3.	EKUITAS DANA	168.806.860	305.091.254	451.091.234	555.435.419	50,57%
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	25.654.638	21.828.938	8.624.842	17.300.425	8,40%
3.1.1.	SILPA	24.873.617	19.303.544	6.963.482	13.076.653	0,49%
3.1.2.	Cadangan piutang	68.736	92.975	158.420	367.510	79,21%
3.1.3.	Cadangan persediaan	712.285	2.468.767	2.461.446	3.980.262	102,67%
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	3.339	393	-	-62,74%
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	(39.687)	(958.899)	(124.000)	743,03%
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	143.152.222	283.262.316	442.466.392	538.134.994	58,57%
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	141.902.222	280.587.716	438.623.092	532.395.344	58,48%
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	424.600	593.300	739.650	21,47%
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.250.000	2.250.000	3.250.000	5.000.000	59,43%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	168.806.860	309.765.454	452.204.152	555.713.438	50,79%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pidie Jaya Tahun 2013

Daerah

Saldo neraca keuangan daerah, Aset (kekayaan) Daerah merupakan yang berisikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan oleh pemerintah daerah akibat dari peristiwa masa lalu yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun di masa mendatang serta keberadaannya dapat diukur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2009-2012),

rata-rata Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 50,79% yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi, dan Aset Tetap. Ini menunjukkan bahwa jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan sebesar 50,79% setiap tahun. Aset Lancar terdiri dari Kas, dan Persediaan yang mengalami peningkatan sebesar 6,86% per tahun. Investasi Pemerintah Daerah mengalami peningkatan cukup besar sebesar 13% atau sekitar 1 Millyar Rupiah pertahunnya yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Daerah pada Bank Aceh. Begitu juga dengan Aset Tetap yang mengalami peningkatan sebesar 58,48% pertahunnya. Aset tersebut berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, kendaraan, gasi, dan jaringannya, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset lain yang merupakan bagian dari kekayaan daerah dimana dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban Daerah (Utang)

Kewajiban daerah adalah utang daerah yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek (jangka waktunya ≤ 12 bulan) dan kewajiban jangka panjang (pembayarannya > 12 bulan).

Kewajiban Daerah (Utang) Kabupaten Pidie Jaya terus mengalami penurunan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata kewajiban yang mengalami penurunan sebesar -50,40%. Utang jangka pendek Kabupaten Pidie Jaya rata-rata pertahunnya mengalami peningkatan sebesar 743,03%. Utang tersebut timbul akibat ada sejumlah dana yang belum dibayarkan pada pihak ke-3 dari pemerintah daerah yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Kewajiban jangka pendek juga timbul akibat sisa dana tunjangan profesi guru dan tunjangan penghasilan guru. Sedangkan utang kepada pihak ke-3 merupakan

2.1.5	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman				0,00%
3.	EKUITAS DANA	168.806.860	305.091.254	451.091.234	0,00%
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	25.654.638	21.828.938	8.624.842	50,57%
3.1.1.	SILPA	24.873.617	19.303.544	6.963.482	8,40%
3.1.2.	Cadangan piutang	68.736	92.975	158.420	0,49%
3.1.3.	Cadangan persediaan	712.285	2.468.767	2.461.446	79,21%
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan		3.320	3.980.262	102,67%

kewajiban berupa PPh 21, PPh 23, dan PPN yang belum dilaporkan, serta kewajiban kepada rekanan lainnya yang harus dilunasi.

c. **Equitas dana Investasi Daerah**

Equitas dana investasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang terdiri dari:

1. Equitas dana lancar, yang merupakan selisih antara aset lancar dengan jumlah nilai utang lancar yang terdiri dari sisa kas pada kas daerah (SiLPA) dan sisa kas pada bendahara pengeluaran ditambah dengan cadangan piutang dan persediaan dikurangi dengan utang lancar yaitu utang jangka pendek.
2. Equitas dana investasi, merupakan jumlah nilai investasi jangka panjang, investasi aset tetap dan aset tetap lainnya yang dikurangkan dengan kewajiban jangka panjang.
3. Equitas dana cadangan, merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Equitas dana investasi Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 58,57%.

3.2. **Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah bertujuan untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Hal tersebut mengandung makna bahwa kepala daerah (Bupati) diberikan kewenangan dan kebijakan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penyusunan APBK Pidie Jaya selama ini didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) yang dirasakan dari setiap alokasi biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efektif dan efisien.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya dimasa lalu dapat dijelaskan pada 3 (tiga) komponen utama dalam struktur APBK yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penekanan terhadap optimalisasi pendapatan daerah terutama sekali pada pos

pendapatan asli daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus memperbarui data-data dan informasi terbaru yang merupakan persyaratan dalam perhitungan dalam memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat, serta menciptakan program-program yang dapat mengungkit ekonomi rakyat.

Sejalan dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam pemungutan pajak dan retribusi (*tax assignment*) kepada daerah, selanjutnya memberikan dana bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta memberikan bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan kepada daerah.

Beberapa strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya selama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Melakukan perluasan sumber-sumber (objek) PAD yang produktif serta efisiensi belanja perasional pemungutannya.
- Memperhitungkan potensi PAD secara maksimal dengan proses pengkajian dan analisis.
- Pembuatan Qanun-Qanun tentang sumber-sumber pemanfaatan PAD dan melakukan
- Menerbitkan Peraturan Bupati tentang tarif dan teknis pemungutan PAD yang mudah dilaksanakan.
- Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan PAD agar penerimaannya maksimal dan terhindar dari penyelewengan.
- Melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor yang terkait dengan PAD.
- Melakukan database wajib pajak dan retribusi yang handal dan akurat.

Penekanan selanjutnya pada pos belanja daerah dan pembiayaan daerah yang lebih tepat, serta efektif dan efisien dalam penggunaannya. Terutama sekali untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dimasa lalu.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi anggaran untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya masih relatif kurang jika dibandingkan kebutuhan anggaran untuk belanja aparatur.

Tabel 3.5 memperlihatkan komposisi belanja aparatur yang dibandingkan dengan total belanja pembangunan dalam struktur APBK Pidie Jaya dari tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan. Pengeluaran) (Rp)	Persentase kebutuhan aparatur
1	T.A 2009	178.229.729.426	141.407.518.468	55,76
2	T.A 2010	210.444.183.603	177.614.425.290	54,23
3	T.A 2011	224.965.490.561	227.863.596.719	49,68
4	T.A 2012	213.693.755.832	204.575.486.352	51,09
5	T.A 2013*	287.692.112.332	204.943.584.963	58,40
	Rata-rata	223.005.054.351	191.280.922.358	53,82

Sumber : Bappeda, Data diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)
 *) Realisasi Tahun 2013 (belum di audit)

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur sejak 5 (lima) tahun terakhir berkisar 53,82% dari total rata-rata belanja daerah sebesar Rp. 414.285.976.709,- per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa porsi alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur jauh lebih besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk kebutuhan pembangunan kepentingan masyarakat. Hal ini terjadi karena kemampuan APBK Pidie Jaya masih sangat rendah sehingga dana APBK besar penggunaannya untuk kebutuhan alokasi dasar (PNS Daerah).

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan atas kepentingan masyarakat dan pelayanan publik, masih kurang dari setengah total belanja daerah atau hanya rata-rata 46,12% setiap tahunnya. Pembiayaan untuk aparatur daerah dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai fasilitator pembangunan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sejak tahun 2009-2013, Pembiayaan Daerah terlihat adanya fluktuatif. Surplus/Defisit riil anggaran Kabupaten Pidie Jaya yang diperlihatkan pada Tabel 3.6. Adanya peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 meskipun ada defisit pada tahun 2010 dan 2011. Peningkatan surplus anggaran daerah tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja masih sangat stabil, serta pelaksanaan APBK yang realisasinya sudah

maksimal. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, hanya mengandalkan penerimaan dari SiLPA tahun sebelumnya. Apabila belanja dan pengeluaran daerah terus meningkat disertai dengan tingginya serapan anggaran sementara sumber pendapatan daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan maka tahun-tahun kedepan dikawatirkan keuangan daerah akan mengalami defisit. Keadaan ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang belum memuaskan.

Tabel 3.6 berikut ini memperlihatkan adanya fluktuatif surplus/defisit anggaran Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2009 s.d 2013.

Tabel 3.6
Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009-2013 (dalam ribuan)

NO	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013* (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	322.051.046	383.488.536	440.530.126	426.370.743	505.382.747
Dikurangi Realisasi :						
2.	Belanja Daerah	319.637.247	388.058.608	452.829.087	418.269.242	492.635.697
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Defisit/ Surplus riil	1.413.799	(5.570.072)	(13.298.961)	7.101.501	11.747.050

Sumber : Bappeda, Diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)
* DPPKAD Kab. Pidie Jaya Tahun 2014 (belum di audit)

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan dalam APBK berupa dana penyertaan modal pemerintah kabupaten sebesar 1 Millyar Rupiah setiap tahunnya, yang ditempatkan pada Bank Aceh. Dana tersebut menjadi pengeluaran pembiayaan pemerintah dimana dapat ditarik kembali sewaktu-waktu diperlukan. Hasil yang diperoleh melalui kebijakan tersebut, berupa penerimaan bunga investasi yang menjadi PAD dalam bentuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban (utang) atau pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dalam struktur APBK Pidie Jaya mengacu Standar Akuntansi Pemerintah sebagai mana telah diatur dalam PP. No. 71 Tahun 2010.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran periodik dimaksud untuk menganalisis belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik yang menjadi prioritas utama daerah yang dibebankan kepada keuangan daerah (APBK). Sejak 4 (empat) tahun terakhir 2010 s.d 2013, pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pidie Jaya memperlihatkan kondisi seperti berikut:

Tabel 3.7
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 s.d 2013 (dalam ribuan)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*	Laju Pertumbuh. (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	181.504.247	204.782.090	249.541.575	262.503.861	44,63
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	160.155.097	182.451.740	223.177.986	238.880.262	12,29
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	21.349.150	22.330.350	26.363.589	23.623.599	4,09
B	<i>Belanja Langsung</i>	62.315.562	86.727.979	89.721.060	102.843.060	16,26
1	Belanja Pegawai	11.898.765	14.113.239	13.903.659	21.521.744	20,22
2	Belanja Barang dan Jasa	50.416.797	72.614.740	75.817.401	81.321.316	15,32
C	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	0,00
2	Penyeritaan Modal Pemerintah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	244.819.809	292.510.069	340.262.635	366.346.921	14,49

Sumber : Bappeda, Diolah (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Th. 2009-2012)
* DPPKAD Tahun 2014 (belum di audit)

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas Kabupaten Pidie Jaya mencapai 14,49%. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pidie Jaya untuk keperluan utama (pokok) selama satu periode anggaran mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 14,49% atau Rp. 40.509.037.000,-.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya pada masa lalu dapat menjadi acuan dalam proyeksi pendanaan dimasa akan datang. Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan hingga tahun 2018 mendatang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan terhadap total pendapatan terjadi karena adanya penambahan pendapatan yang lebih besar daripada peningkatan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Pada Kurun Tahun 2014 s.d 2018 (*dalam ribuan*)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	Pendapatan	602.517.407	626.618.103	654.917.600	681.200.539	710.754.028
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.708.915	3.797.272	3.885.465	3.985.400	3.997.264
	Total Penerimaan	606.226.322	630.415.375	658.803.065	685.185.939	714.751.292
	<i>Dikurangi:</i>					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	378.869.803	396.972.415	414.162.198	432.374.221	455.413.883
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan	227.356.519	233.442.960	244.640.867	252.811.718	259.337.409

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Pidie Jaya untuk 5 (lima) Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMK tahun 2014-2019, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata positif sebesar 3,35% atau sekitar 7.99 Millyar Rupiah per tahun.

Peningkatan penerimaan yang terjadi sangat dipengaruhi adanya penerimaan daerah dari transfer dana otonomi khusus (Otsus) pemerintah Provinsi Aceh yang masuk dalam kas daerah sejak tahun 2014 sesuai dengan

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Cara Pengalokasian TDBH Migas dan Penggunaan Dana Otsus. Disamping itu adanya peningkatan penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Dengan adanya tren positif kapasitas rill kemampuan keuangan daerah maka dapat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan program-program prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan mandiri.

Berikut adalah rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan Kabupaten Pidie Jaya 5 (lima) tahun ke depan terlihat dalam Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2018 (dalam ribuan)

No	Uraian	Proyeksi				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Kapasitas rill kemampuan keuangan	227.356.519	233.442.960	244.640.867	252.811.718	259.337.409
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	112.781.990	121.865.492	128.075.540	133.120.675	145.778.540
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	<i>Dikurangi</i>					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	25.890.455	31.456.543	45.072.267	52.750.935	58.907.540
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
II	Total rencana pengeluaran prioritas I	86.891.535	90.408.949	83.003.273	80.369.740	86.871.000
	Sisa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	140.464.984	143.034.011	161.637.594	172.441.978	172.466.409
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	81.352.050	86.710.775	91.291.332	95.455.030	99.067.450
III.a	Belanja tidak langsung	271.834.560	283.470.432	290.771.905	298.799.145	305.597.450
	<i>Dikurangi:</i>					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama SKPK	185.034.320	140.446.452	129.221.915	126.769.175	133.537.440
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	136.800.240	139.023.980	157.249.990	167.429.970	167.060.010

IV	Total Rencana Pengeluaran Prioritas III (Belanja Tidak Langsung)	3.659.000	3.998.040	4.369.075	4.978.267	5.339.746
	Surplus anggaran rill atau berimbang (I-II-III)	5.744	11.991	18.529	33.741	66.653

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 (data diolah)

Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa total proyeksi Dana Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Jumlah pagu indikatif rata-rata sebesar 243.5 Millyar per tahun. Dana tersebut diproyeksi untuk dialokasikan kepada pembiayaan program-program yang menjadi prioritas utama daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Total pengeluaran rata-rata yang diproyeksikan untuk pembiayaan prioritas I Kabupaten Pidie Jaya 2014 s.d 2018 berjumlah 85,5 Millyar per tahun, diperuntukkan untuk program/kegiatan sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat. Pembiayaan prioritas II diproyeksikan rata-rata 153,5 Millyar per tahun, di peruntukkan untuk membiayai program/kegiatan unggulan di SKPK sesuai bidang urusan. Sedangkan Prioritas III diproyeksikan rata-rata 4,4 Millyar per tahun, diperuntukkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, bansos dll.

Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD menjelaskan bahwa program/kegiatan dapat dipisahkan menjadi prioritas I, II, dan III, dimana prioritas I mendapat prioritas utama sebelum Prioritas II dan III. Lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I, Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program pembangunan menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Pidie Jaya, amanat/kebijakan Provinsi dan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi kepala daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi

prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prioritas II, merupakan program prioritas di tingkat SKPK yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPK termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Prioritas III, merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal dan dengan mempertimbangkan masukan dari SKPK. Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi menjadi *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Bupati. Permasalahan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya diuraikan menurut urusan pemerintahan daerah yang dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan pada urusan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang ada dapat dipetakan dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya untuk periode 2014-2019.

Sebagai daerah hasil pemekaran baru dan masih termasuk sebagai salah satu Kabupaten Tertinggal di Indonesia dan di Aceh khususnya, maka telah sewajarnya seluruh permasalahan pembangunan daerah yang terjadi menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk dapat dicari solusinya. Berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki permasalahan dan isu strategis yang cukup serius yang perlu penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya bisa lebih meningkat dan kabupaten ini mampu mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju. Adapun permasalahan dan isu strategis yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah:

1. Angka kemiskinan masih tinggi;
2. Infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat belum optimal;
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD;
4. Kualitas pendidikan yang masih rendah;
5. Tingkat pelayanan kesehatan masih rendah;
6. Kecenderungan meningkatnya perilaku yang tidak sesuai dengan Syariat Islam;
7. Belum optimalnya sistem pengelolaan pemerintahan yang baik;
8. Pengembangan industri kecil dan menengah relatif rendah; dan
9. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang proporsional dan berbasis perlindungan sosial.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT melalui pembahasan bersama dan musyawarah yang melibatkan perwakilan seluruh pemangku kepentingan. Hasil dari musyawarah tersebut diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan dalam membangun Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun ke depan, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut.

4.2.1. Analisis SWOT

4.2.1.1. Kekuatan (*Strong*)

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terhadap pembangunan daerah;
2. Adanya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan perdamaian;
3. Pola kehidupan sosial budaya (social culture) masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Islami dengan penerapan Syariat Islam;
4. Letak geografis daerah yang strategis dengan akses yang relatif mudah;
5. Adanya potensi pertumbuhan kawasan ekonomi wilayah barat/Bandar Baru, wilayah tengah/Meureudu, dan wilayah timur/Bandar Dua;
6. Potensi sumber daya alam yang tersedia;
7. Potensi sumber daya manusia yang cukup handal; dan
8. Adanya lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal.

4.2.1.2. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum efektifnya pelaksanaan regulasi peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan lainnya;
2. Tingkat disiplin aparatur masih rendah;
3. Lemahnya etos kerja kalangan masyarakat;
4. Rendahnya tingkat produktifitas dan nilai tambah komoditas sumberdaya alam daerah;
5. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah;
6. Masih rendahnya kreatifitas dan pengembangan kepemudaan;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
8. Masih kurangnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah;
9. Pengembangan ekonomi lokal masyarakat yang belum didukung oleh akses pasar;
10. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya energi;
11. Infrastruktur (jalan, irigasi, dan jembatan) belum memadai; dan
12. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

4.2.1.3. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya partisipasi lembaga non pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan;
2. Adanya minat investor untuk berinvestasi;
3. Sebagai wilayah yang menjadi arus distribusi barang dan jasa;
4. Adanya komitmen pemerintah terhadap pencapaian target MDGs dan keberlanjutan kerjasama dengan masyarakat internasional;
5. Adanya sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan bantuan luar Negeri;
6. Adanya program jaminan kesehatan bagi masyarakat (*universal coverage*);
7. Telah ditetapkan kawasan strategis yang terintegrasi dalam tata ruang wilayah;
8. Adanya upaya pengembangan ekonomi berbasis syariah; dan
9. Adanya potensi sumberdaya daerah yang dapat dikembangkan khususnya komoditi unggulan.

4.2.1.4. Ancaman (*Threat*)

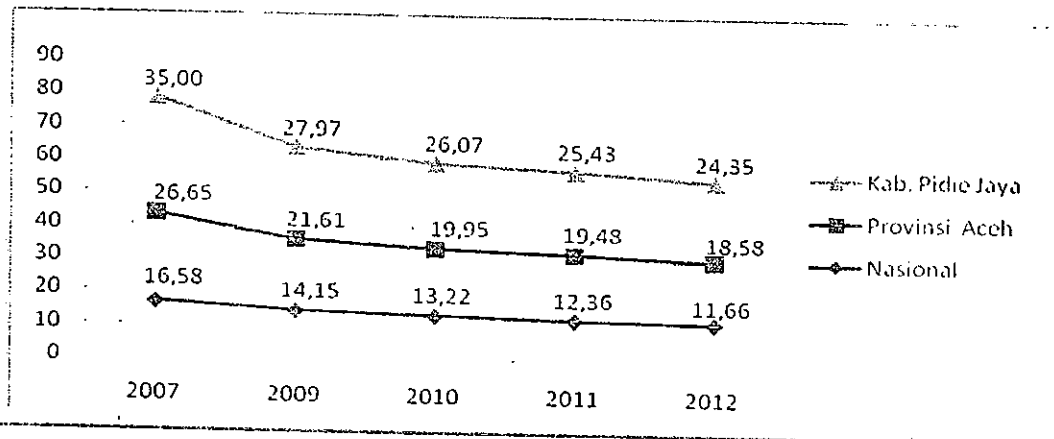
1. Adanya berbagai kebijakan nasional dan internasional yang tidak sesuai dengan kesiapan daerah;
2. Pengembangan globalisasi dan elaborasi budaya asing yang negatif;
3. Instabilitas perekonomian global;
4. Meningkatnya degradasi sosial dan budaya dalam tatanan kehidupan tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
5. Terjadinya alih fungsi lahan produktif dan tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman;
6. Masih adanya wilayah rawan bencana;
7. Pengeksploasian sumber daya alam secara ilegal;
8. Persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

4.2.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun ke depan (2014-2019) adalah sebagai berikut:

1. **Angka kemiskinan masih tinggi**, hal itu dapat dilihat dari rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Posisi sekarang, Angka kemiskinan di Pidie Jaya tahun 2012 sebesar 24,43 persen, berada pada peringkat kedua terbawah Se-Aceh. Sedangkan Provinsi dan Nasional masing-masing 19,48 dan 12,36 persen. Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya sekitar 3,72, hal ini menunjukkan kondisi yang masih lebih buruk dari Nasional (1,90) dan Propinsi (3,07). Kedalaman kemiskinan di Pidie Jaya berada pada tingkat tertinggi kelima di Propinsi Aceh, sehingga tingkat kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan minimum masih lebih buruk dari beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Jika dilihat dari Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 sebesar 0,92 lebih buruk dari capaian indeks keparahan kemiskinan Propinsi (0,83) dan capaian indeks keparahan kemiskinan Nasional (0,48). Hal ini merupakan sesuatu yang cukup ironis jika dilihat dari potensi ekonomi dan sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang ada di Pidie Jaya. Namun demikian bila dilihat dari grafik kemiskinan dari tahun 2007 s.d 2012 maka kemiskinan Pidie Jaya terus mengalami penurunan seperti ditunjukkan dalam grafik 3.1 berikut ini:

Grafik 5.1
Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya
terhadap Propinsi dan Nasional



Sumber: TKPK Pidie Jaya Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan faktor utama kemiskinan disebabkan oleh faktor struktural, yaitu sistem pengelolaan pembangunan dan pembinaan masyarakat belum tepat sasaran serta belum berbasis kepada kebutuhan dalam menjawab penyebab kemiskinan, dan faktor kultural yaitu pola hidup dan perilaku hidup yang belum sesuai dengan pola hidup sehat, rendahnya etos kerja dan ketergantungan terhadap bantuan orang lain.

2. **Infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat belum optimal**, hampir 35% irigasi belum mampu memberikan kontribusi air terhadap sektor pertanian disebabkan rusak terutama di kecamatan Trienggadeng dan Panteraja. Sumber daya air yang berlimpah belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Ini menyebabkan Indeks Penanaman (IP) Pidie Jaya yang seharusnya 200 per tahun, namun hanya berkisar 170 per tahun. Sedangkan pada sektor perkebunan, masih minimnya jalan produksi menuju ke perkebunan rakyat dan banyaknya perkebunan yang kembali menjadi hutan karena minimnya perawatan dan perhatian pemerintah. Infrastruktur jalan yang masih belum terealisasi ke berbagai pelosok serta kualitas pembangunan jalan yang rendah dan cepat rusak. Hasil produksi perkebunan rakyat tidak dapat terangkut dan terjual dengan cepat. Hal ini sangat mempengaruhi arus percepatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur ekonomi lainnya. Begitu juga dengan sektor perikanan yang selama ini belum tergarap dengan baik.
3. **Belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, perkembangan PAD ril Pidie Jaya setiap tahunnya hanya

berkisar 3 persen atau sekitar 12 Miliar Rupiah dari total penerimaan daerah. Hal ini tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan APBK Pidie Jaya hanya berjumlah Rp. 434 Miliar Rupiah. Jumlah ini sangat kecil untuk proses pembangunan daerah. Jika digali dan dikelola dengan baik, sumber potensi PAD sangat memungkinkan terus ditingkatkan. Hal tersebut dapat diperoleh dari kontribusi sektor pertanian khususnya padi yang setiap tahun surplus dan diolah diluar daerah. Sektor perikanan yang belum dapat memberikan nilai tambah melalui pengelolaan teknologi. Disamping itu, kontribusi PAD dapat diperoleh dari pemanfaatan sumberdaya alam eksplorasi galian C, yang selama ini masih ada galian C yang illegal. Penguatan pengelolaan persampahan secara baik melalui kualitas pelayanan sampah sehingga kontribusi jasa sampah terhadap PAD memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Jika dilihat dari banyaknya sampah perhari dengan rata-rata 1-2,5 ton, maka untuk itu perlu sistem pengelolaan sampah dilakukan secara profesional. Faktor lain penyebab rendahnya PAD yaitu masih minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pada objek-objek yang menjadi PAD dan kurangnya peraturan-peraturan yang mengatur sistem dan tatacara pemungutan PAD yang lebih operasional.

4. **Kualitas pendidikan yang masih rendah**, hal itu ditandai dengan masih rendahnya angka kualitas lulusan siswa yang rata-rata masih berkisar 5,64 angka kelulusan mencapai 98,54 persen tahun 2012. Sedangkan dan angka siswa yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi khususnya kepeguruan tinggi negeri yaitu sekitar 12,34 persen dari total lulusan. Semua kondisi tersebut disebabkan masih rendahnya sumberdaya pengajar, dimana hasil test kompetensi guru di Pidie Jaya dari 320 orang yang mengikuti hanya sebesar 11,56 persen yang dinyatakan lulus, tingkat kualifikasi pendidikan masih perlu ditingkatkan, karena mayoritas tenaga pendidik masih ada di bawah strata 1, di samping masih keterbatasan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan serta rendahnya kedisiplinan tenaga pengajar. Angka Melek huruf hanya sebesar 94,92 persen tahun 2011, angka lama bersekolah pada tahun 2011 masih sebesar 8,82 tahun, hal ini menunjukkan masih ada anak yang putus sekolah pada usia wajib belajar sembilan tahun, angka partisipasi murni pada tahun 2011

untuk tingkat SD/MI sebesar 97,53 persen, SMP/MTs sebesar 85,29 persen dan SMA/MA sebesar 76,11 persen.

5. **Tingkat pelayanan kesehatan masih rendah**, hal itu dapat dilihat dari keluhan masyarakat terhadap sistem manajemen pelayanan kesehatan di Pidie Jaya, baik ditingkat desa hingga di kabupaten. Perkembangan pembangunan dari indikator makro sektor kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2011, angka kelangsungan hidup bayi sebesar 98,21 persen, angka kematian bayi sebesar 1,23 persen, angka balita gizi buruk per 1.000 sebesar 15 persen, angka kebutuhan dokter berdasarkan penduduk sebesar 1 : 8.250, sedangkan angka harapan hidup sudah mencapai 69,25 tahun. Kondisi ini disebabkan karena peran tenaga medis yang belum maksimal dan minimnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan. Terbatasnya tenaga dokter khususnya dokter spesialis, diperburuk dengan sistem distribusi tenaga medis yang masih kurang proporsional dan tepat. Di samping itu belum selesainya infrastruktur pendukung Rumah Sakit Rujukan, hal itu membuat masyarakat Pidie Jaya harus memperoleh pelayanan kesehatan keluar daerah.
6. **Kecenderungan meningkatnya yang tidak sesuai dengan Syariat Islam**, hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan cita-cita pembangunan. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pidie Jaya tahun 2009-2011 menunjukkan angka masyarakat terlibat narkoba sebanyak 662 kasus, tindak kekerasan terhadap perempuan sebanyak 385 kasus, kasus pembunuhan 64 kasus dan kasus lainnya. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan dan peran serta ulama dalam pembangunan. Disamping itu juga ada masih adanya kasus-kasus pelanggaran syariat yang terjadi dilingkungan masyarakat. Kasus yang paling tinggi terjadi pada jenis kasus khalwat sebanyak 26 kasus dari tahun 2011-2013. Kondisi ini disebabkan peran penyelenggaraan pendidikan keagamaan belum berjalan secara optimal baik dilembaga formal maupun non formal.
7. **Belum optimalnya sistem pengelolaan pemerintahan yang baik**, hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya sistem penempatan aparatur yang proporsional dan profesional (*the right man and the right place*). Masih sedikit aparatur yang telah memperoleh sertifikat kepemimpinan atau PIM II berjumlah baru 2 Orang, PIM III

berjumlah 7 orang dan PIM IV berjumlah 14 orang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan aparatur, setiap aparatur yang menduduki jabatan struktural eselon harus memperoleh dan atau memiliki sertifikasi pendidikan perjenjangan aparatur sesuai eselon yang didudukinya. Jika dilihat dari seluruh pegawai, maka baru 0,62 persen yang baru memperoleh pendidikan perjenjangan atau sekitar 4,42 persen dari seluruh pejabat struktural yang ada serta masih terdapat aparatur yang bekerja bukan berdasarkan bidang tugasnya. Sistem penataan aset daerah belum berjalannya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, belum optimalnya sistem pengelolaan yang belum berbasis kinerja yang berdampak kepada pemborosan anggaran daerah. Kondisi ini juga berdampak kepada tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang lebih boros dan tidak mengacu kepada anggaran berbasis kinerja. Jika dilihat dari pengelolaan keuangan, hanya pada tahun 2009 Pemerintah Pidie Jaya pernah memperoleh penghargaan Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dan selanjutnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 penghargaan tersebut tidak pernah diperoleh lagi. Pada kontes pelayanan, pemerintah Pidie Jaya telah menerapkan sistem pelayanan terpadu di setiap Kecamatan, itu pun belum berjalan secara optimal, sistem perizinan satu pintu telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara prima akibat faktor aparatur dan fasilitas pendukung yang belum tersedia. Dengan demikian perlu membenahan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan "Good Governance" dengan kondisi pemerintahan yang tertata, bersih, transparan, akuntabilitas, adil serta bertanggung jawab.

8. **Pengembangan industri kecil dan menengah relatif rendah.** Penguatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui penguatan sektor ril yaitu pengembangan industri kecil dan UMKM. Sebagai wilayah kecil dengan kondisi sumber daya alam yang cukup memadai, perlu penguatan dan pengembangan nilai tambah melalui penguatan industri dan UMKM. Jika ini dapat tumbuh dan berkembang akan berdampak kepada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat, apalagi didukung dengan pengembangan dan perbaikan iklim investasi. Jika dilihat dari pertumbuhan UMKM dari tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM cukup

signifikan, dimana pada tahun 2009 jumlahnya hanya 210 UMKM, bertambah menjadi 1.470 UMKM pada tahun 2013. Namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan penguatan fiskal daerah sehingga perlu peningkatan usaha yang lebih kondusif dengan penguatan kemitraan melalui pelibatan sektor swasta baik lokal, nasional, atau internasional. Keberhasilan industri kecil dan UMKM melalui pelibatan investasi akan lebih efektif dengan birokrasi yang tidak mempersulit investasi terutama pada sektor-sektor yang bergerak dalam bidang industri pertanian dan pengolahan serta industri kreatif lainnya.

9. **Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang proporsional dan berbasis perlindungan sosial.** Dalam rangka penguatan pemberdayaan dan peran serta kelompok perempuan dalam pembangunan harus diikuti melalui kebijakan perencanaan dan penetapan anggaran yang proporsional, dan kebijakan berbasis perlindungan sosial terhadap kelompok rentan (anak-anak, penyandang keterbelakangan (*disabilitas*), lansia, dan PMKS). Prinsip dasar pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya tanpa diskriminatif sektoral, sumberdaya dan kewilayahan. Dengan demikian perlu pembenahan yang mendasar dan menyeluruh terhadap sistem perencanaan tersebut agar proporsionalitas anggaran dapat diperlakukan secara sama baik pada masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak hidup lainnya.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 menyebutkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih wajib menjabarkan Visi dan Misinya ke dalam RPJM Daerah dan menyesuaikannya dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi dimana ia berada. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan yang diamanatkan di dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka penyajian dan penjabaran Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pidie Jaya untuk periode masa bakti 2014-2019 telah dilakukan dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan semua rencana program dan kegiatan yang ditampung di dalam RPJM Daerah disusun dalam skala prioritas yang tajam dan didukung oleh data dan statistik terkini untuk setiap bidang pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana sudah dituangkan ke dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang pemerintahan dilakukan secara terkoordinasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang RPJM Nasional, 2009-2014. Dengan demikian, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya wajib disinergikan dengan prioritas nasional, yakni antara lain:
 - a. Menjamin terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, dengan cara melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tata tertib sosial politik di daerah dalam bingkai NKRI;

- b. Membudayakan prinsip *good governance* dan *clean government*;
 - c. Mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru;
 - d. Menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok, terutama pangan dan kebutuhan dasar masyarakat;
 - e. Memelihara infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, saluran dan dam irigasi, infrastruktur sosial budaya, terutama fasilitas layanan sosial dasar, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan fasilitas catatan sipil, infrastruktur ekonomi produktif, terutama pasar dan pusat-pusat produksi kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - f. Melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan energi untuk kebutuhan lokal;
 - g. Menjamin tegaknya aturan tentang pengelolaan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan;
 - h. Memberi perhatian terhadap masalah kesenjangan sosial ekonomi;
 - i. Mengembangkan pola-pola kerjasama antar pelaku pembangunan daerah dalam kerangka perencanaan partisipatif;
 - j. Memberi perhatian yang besar terhadap issue yang berkaitan dengan kesenjangan gender.
4. Peraturan menteri dalam negeri peraturan menteri dalam negeri menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.

5.1 Visi

Visi Bupati terpilih merupakan cita-cita yang diinginkan dan dijanjikan serta telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya untuk lima tahun ke depan (periode tahun 2014-2019) adalah: ***"Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA"***.

Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya periode 2014-2019 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pidie Jaya selama lima tahun kedepan. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena

itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Aman adalah kondisi masyarakat yang terlindungi dari berbagai bahaya dan ancaman dari pihak-pihak tertentu baik dari dalam maupun dari luar serta ketidakkhawatiran dalam melaksanakan aktifitas berusaha untuk memenuhi penghidupannya, memperoleh hak yang sama dalam berdemokrasi, politik dan hukum secara jelas dan pasti.

Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup masyarakat baik materil maupun spirituil secara loyal dan berkeadilan sesuai dengan perannya, ditandainya dengan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui penguatan pertumbuhan pembangunan ekonomi secara merata yang berbasis pada pemanfaatan potensi lokal, perluasan lapangan usaha, serta Indeks kepuasan masyarakat yang terus meningkat dan terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih baik.

Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu mengambil keputusan dan tindakan sendiri dalam penanganan sosial, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya; tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah, mampu membangun daya saing internal dalam usaha menolong diri sendiri, mampu menjalankan perannya sebagai mitra dan penyokong bagi pemerintah.

Berlandaskan UUPA, adalah kondisi pembangunan masyarakat berdasarkan pengejawantahan nilai-nilai yang dikandung dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh sehingga penyelenggaraan pemerintah akan efektif dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut. Kondisi ini akan mampu memberikan nuansa pembangunan yang mengarah kepada pencapaian masyarakat Pidie Jaya yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam tatanan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Substansi filosofis visi tersebut merupakan pengejawantahan dari kebijakan nilai-nilai pembangunan daerah yaitu "**Tertib Ibadat, Meutaoe Bak Meuhareukat, Berseh ngen Sehat, Donya Akherat Allah Peulihara/ Beusejahtera**". Pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

Tertib Ibadat, mewujudkan penyelenggaraan Syariat Islam secara berkelanjutan, dimulai dengan penguatan pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu dalam kehidupan masyarakat, *zikir* dan pembacaan surat *yasin* bersama setiap malam jum'at, penguatan majelis taklim, peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta memelihara tatanan kehidupan yang berbasis keimanan dan nilai-nilai ibadah.

Meuatoe Bak Meuhareukat, mewujudkan struktur ekonomi masyarakat yang kuat melalui penguatan sektor pertanian dengan gerakan tanam serentak, membangun sarana dan prasarana pertanian dengan semangat kebersamaan, meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan mereka, serta memperkuat usaha kecil dan menengah yang bergerak disektor pertanian.

Berseh ngen Sehat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan tuntunan syariat, meningkatkan kemampuan berfikir positif, kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Donya Akherat Allah Peulihara/ Beusejahtera, mewujudkan kehidupan masyarakat yang seimbang dengan mengharap Ridha Allah SWT, serta ikhlas, jujur, dan bijak dalam bertindak/bersikap sehingga mampu menciptakan kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat sehingga kita yakin Allah SWT akan melindungi kita semua.

5.2 Misi

Misi merupakan rangkaian kebijakan umum untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2014-2019 dijabarkan kepada 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. *Misi Pertama*, Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.
2. *Misi Kedua*, Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.
3. *Misi Ketiga*, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.
4. *Misi Keempat*, Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.

5. *Misi Kelima*, Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya periode 2014-2019 adalah *Mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang aman, sejahtera, dan mandiri dengan berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh*. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

5.3.1 Mewujudkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa, yang ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan non teknis.
- b. Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, tertata, dan berwibawa dengan mengedepankan profesionalisme dan kebutuhan.
- c. Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5.3.2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha, yang ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5-6 persen pertahun.
- b. Menurunnya angka kemiskinan 1 (satu) persen setiap tahun.
- c. Menurunnya angka pengangguran daerah hingga mencapai 5-7 persen.
- d. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya membuka lapangan usaha melalui penguatan investasi daerah.
- e. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah;
- f. Mengefektifkannya pengguna lahan pertanian dan perkebunan serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- g. Meningkatnya produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

- h. Meningkatnya kualitas sumberdaya petani, nelayan dan sumberdaya kelompok usaha sektor rill.

5.3.3 Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, yang ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Terwujudnya pemerataan akses pendidikan daerah.
- b. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk Pidie Jaya.
- c. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/ SMP/SMA.
- d. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/ SMP/SMA.
- e. Tersedianya fasilitas pendukung pendidikan dayah.
- f. Meningkatnya kualitas pendidikan dayah.
- g. Terwujudnya akredetasi pendidikan dayah.
- h. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan.
- i. Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian *millenium development goals* (MDGs).
- j. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.
- k. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyediaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs.
- l. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan komprehensif.
- m. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar pada tingkat desa dan kecamatan secara berkualitas.
- n. Tersedianya rumah sakit daerah yang terakreditasi tipe C.
- o. Tersedianya rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak.
- p. Tersedianya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi khususnya keluarga miskin.
- q. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat

5.3.4 Mewujudkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu, yang ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan serta irigasi yang menjadi fasilitas pendukung utama layanan dasar dan penguatan pertumbuhan akses ekonomi daerah.
- b. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan fasilitas pendukung utama layanan dasar dalam menciptakan pelayanan prima.
- c. Terwujudnya integrasi pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan tataruang dan tujuan pembangunan daerah.
- d. Terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis lingkungan.
- e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bagi keluarga kurang mampu/dhuafa.

5.3.5 Terwujudnya kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam, yang ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam.
- c. Terwujudnya pola perlindungan sosial terhadap masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai syariat.
- d. Terwujudnya pemberdayaan terhadap pelaku sosial masyarakat dalam menerapkan dan memahami kondisi sosial berdasarkan pendekatan Syariat Islam.
- e. Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan menetapkan strategi yang tepat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, akan tetapi seluruh aktifitas program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga terwujudnya pemerintah yang responsif dan masyarakat yang aktif.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*) perubahan yang ingin dicapai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi ataupun untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja yang ditetapkan. Disamping itu, strategi yang merupakan sebagai langkah pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*) secara efektif dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Kedua Perencanaan dimaksud diatas bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang dapat diimplementasikan (*actionable*). Maka rencana strategis yaitu segala sesuatu yang secara langsung dapat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMK. Dalam upaya penentuan strategi pembangunan daerah dapat dilakukan melalui analisis Lingkungan Strategis yang merupakan suatu pendekatan ilmiah berdasarkan fakta dan data keadaan atau kondisi yang ada (eksisting) dan kondisi yang terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah dengan strategi yang tepat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT yang diuraikan pada BAB IV dengan berbagai program indikatif untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada periode 5 (lima) tahun yang memadukan antara kekuatan dan peluang (S-O), kekuatan dan ancaman (S-T), kelemahan dan peluang (W-O) dan kelemahan dan ancaman (W-T). Analisis ini diuraikan sebagai berikut:

6.1.1. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Pelaksanaan tatakelola pemerintahan dan birokrasi yang efektif dalam pelayanan publik melalui pelayanan terpadu yang didukung sarana dan teknologi yang memadai;
2. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana serta pemahaman tentang pentingnya kelestarian lingkungan sekitar;
3. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015;
4. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang Kesehatan pada tahun 2015;
5. Peningkatan pertumbuhan investasi asing dan dalam negeri serta peran lembaga otoritas investasi;
6. Peningkatan kualitas pendidikan berbasis keahlian (*Link and Match*) dan kebutuhan pasar tenaga kerja;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin;

8. Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6.1.2. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Pembangunan kepercayaan (*trust building*) kepada berbagai stakeholder dalam rangka keberlanjutan perdamaian (*peace sustainability*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta penuntasan proses reintegrasi;
2. Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;
3. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan Syariat Islam;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

6.1.3. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kontinuitas produk pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan unggulan untuk mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar;
2. Peningkatan produk unggulan lokal masyarakat yang dapat bersaing di pasar lokal dan daerah lain;
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kecamatan sebagai daya saing wilayah dan pemerataan pembangunan dengan memperkuat ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi areal pertanian;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, PAD dan pendapatan perkapita masyarakat;
6. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur (jalan, irigasi, PPI) terutama di daerah pertanian dan perkebunan;
7. Pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasarkan potensi wilayah;
8. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah;
9. Peningkatan kualitas SDM yang kreatif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
10. Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan menengah;

11. Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan;
12. Peningkatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

6.1.4. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
2. Penempatan pejabat dalam lingkup pemerintahan yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme kerja;
3. Pengembangan dan peningkatan keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan;
4. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah akan terwujud dengan baik jika tujuan dan sasaran pembangunan diimplementasikan dengan berbagai strategi pembangunan yang tepat dan sistematis. Implementasi tersebut akan berlanjut secara efektif jika penyelenggaraan pembangunan daerah yang disusun secara tepat melalui strategi pembangunan dan dioperasionalkan dengan penetapan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya periode 2014-2019. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam upaya mengoperasionalkan Misi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa;
 - 1.1. Rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi serta mewujudkan prinsip penempatan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja secara profesional dan proporsional.
 - 1.2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui diklat formal dan informal.
 - 1.3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.
 - 1.4. Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama.
 - 1.5. Menata kembali aset daerah dengan baik dan jelas.

- 1.6. Meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan terpadu.
- 1.7. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat.
- 1.8. Mewujudkan kesejahteraan aparatur melalui remunerasi pendapatan berdasarkan beban kerja dan kualitas kinerja secara profesional
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha;
 - 2.1. Meningkatkan usaha produktif bagi Masyarakat.
 - 2.2. Meningkatkan usaha produktif bagi kelompok miskin dalam upaya peningkatan pendapatan.
 - 2.3. Mewujudkan upaya perluasan lapangan usaha dan pemanfaatan lahan terlantar melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.
 - 2.4. Membuka selebar-lebarnya untuk kesempatan berinvestasi baik nasional dan internasional.
 - 2.5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan serta memberikan kemudahan menuju akses-akses produksi masyarakat.
 - 2.6. Membantu masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan produksi dan pemasaran.
 - 2.7. Mengoptimalkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor ril daerah.
 - 2.8. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah yang berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan sentra-sentra produksi.
 - 2.9. Mewujudkan ketersediaan dan kestabilan distribusi barang terutama dalam upaya menjaga kebutuhan pokok masyarakat.
 - 2.10. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan hutan lindung, konservasi dan produksi sesuai arah dan fungsinya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
 - 3.1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun serta rintisan wajib belajar 12 Tahun.
 - 3.2. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada semua tingkatan.

- 3.3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif.
- 3.4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dayah secara terpadu.
- 3.5. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dayah melalui pembinaan dan akreditasi.
- 3.6. Mengoptimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya melalui pendidikan dan pelatihan fungsional.
- 3.7. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
- 3.8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen pelayanan pendidikan.
- 3.9. Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam penguasaan teknologi.
- 3.10. Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu dan Puskesmas.
- 3.11. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh tingkat layanan dasar masyarakat
- 3.12. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah sakit secara berkualitas.
- 3.13. Mengupayakan ketersediaan farmasi secara baik dan terjangkau bagi keluarga miskin serta pengaktifan sistem pelayanan asuransi masyarakat miskin.
- 3.14. Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak.
- 3.15. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya penuntasan angka gizi buruk anak.
- 3.16. Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang mampu.
- 3.17. Menggerakkan pola hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan
4. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu;
 - 4.1. Meningkatkan seluruh fasilitas jalan dan jembatan daerah secara berkelanjutan.
 - 4.2. Mengoptimalkan tata pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi partisipatif (PPSIP).

- 4.3. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk kemudahan akses transportasi petani.
 - 4.4. Menyelesaikan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan dan berkelanjutan.
 - 4.5. Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan.
 - 4.6. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi dalam mendukung sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang transformatif dan transparansif.
 - 4.7. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, permukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan.
 - 4.8. Penguatan kebijakan Penataan Pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
 - 4.9. Mengintegrasikan pembangunan dengan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 - 4.10. Memanfaatkan sumber-sumber air baik sungai dan sumber air lainnya secara optimal dalam penguatan kebutuhan dasar masyarakat.
 - 4.11. Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa.
5. Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam;
- 1.1. Meningkatkan peran ulama, pelaku sosial dan pemangku adat dalam pembangunan daerah serta pada seluruh aktifitas kemasyarakatan.
 - 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kepada seluruh masyarakat melalui penguatan rutinitas pengajian.
 - 1.3. Memperkuat pembangunan sosial melalui pemberdayaan pelaku sosial dan kelompok marjinal.
 - 1.4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok sosial berdasarkan Syariat Islam.
 - 1.5. Pemberdayaan perempuan dalam mendukung terselenggaranya Syariat Islam.
 - 1.6. Mengoptimalkan dan penguatan kegiatan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 1.7. Mewujudkan semangat solidaritas dan gotong royong sebagai budaya tertinggi daerah dalam pembangunan.
- 1.8. Meningkatkan aktivitas mesjid dan meunasah dengan menciptakan sosial keagamaan.

6.3. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019

Rumusan strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan hasil analisis SWOT yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya strategi dan kebijakan pembangunan Pidie Jaya 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA".

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan non teknis. 2. Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, tertata, dan berwibawa dengan mengedepankan profesionalisme dan kebutuhan. 3. Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem rekrutmen aparatur yang berbasis kompetensi; 2. Peningkatan sistem pembinaan sumber daya aparatur ; 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan teknologi; 4. Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 5. Peningkatan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan standar pelayanan minimal melalui sistem pelayanan prima; 6. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi serta mewujudkan prinsip penempatan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja secara profesional dan proporsional. 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui diklat formal dan informal. 3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. 4. Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama. 5. Menata kembali aset daerah dengan baik dan jelas.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan terpadu. 7. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat. 8. Mewujudkan kesejahteraan aparatur melalui remunerasi pendapatan berdasarkan beban kerja dan kualitas kinerja secara profesional.

Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan potensi lokal dan perluasan lapangan usaha dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5-6 persen pertahun. 2. Menurunkan angka kemiskinan 1 (satu) persen setiap tahun. 3. Menurunkan angka pengangguran daerah hingga mencapai 5-7 persen.	1. Peningkatan produktifitas usaha masyarakat. 2. Penguatan kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah dan ketersediaan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat. 3. Perluasan lapangan usaha bagi masyarakat.	1. Meningkatkan usaha produktif bagi Masyarakat. 2. Meningkatkan usaha produktif bagi kelompok miskin dalam upaya peningkatan pendapatan. 3. Mewujudkan upaya perluasan lapangan usaha dan pemanfaatan lahan terlantar melalui kebijakan peraturan perundang-undangan.

Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya membuka lapangan usaha melalui penguatan investasi daerah. 5. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah 6. Mengefektifkannya pengguna lahan pertanian dan perkebunan serta meningkatkan ketahanan pangan daerah. 7. Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya petani, nelayan dan sumberdaya kelompok usaha sektor Bill. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penguatan iklim investasi melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal. 5. Peningkatan sarana dan prasarana akses pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 6. Peningkatan komoditi unggulan daerah sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. 7. Pengoptimalisasian sumberdaya/potensi alam daerah secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Membuka selebar-lebarnya untuk kesempatan berinvestasi baik nasional dan internasional. 5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan serta memberikan kemudahan menuju akses-akses produksi masyarakat. 6. Membantu masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan produksi dan pemasaran. 7. Mengoptimalkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor ril daerah. 8. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah yang berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan sentra-sentra produksi. 9. Mewujudkan ketersediaan dan kestabilan distribusi barang terutama dalam upaya menjaga kebutuhan pokok masyarakat.

Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			10. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan hutan lindung, konservasi dan produksi sesuai arah dan fungsinya.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara optimal dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemerataan akses pendidikan daerah. 2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk Pidie Jaya. 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/ SMP/SMA. 4. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/ SMP/SMA. 5. Tersedianya fasilitas pendukung pendidikan dayah. 6. Meningkatnya kualitas pendidikan dayah. 7. Terwujudnya akreditasi pendidikan dayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. 2. Peningkatan kualitas profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang berkelanjutan. 3. Penguatan sistem pengelolaan pendidikan daerah. 4. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah. 5. Peningkatan fasilitas dan sistem pengelolaan serta pelayanan pendidikan dayah yang bermutu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun serta rintisan wajib belajar 12 Tahun. 2. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada semua tingkatan. 3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif. 4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dayah secara terpadu. 5. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dayah melalui pembinaan dan akreditasi.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>8. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan.</p> <p>9. Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian <i>millenium development goals</i> (MDGs).</p> <p>10. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.</p> <p>11. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar pada tingkat desa dan kecamatan secara berkualitas.</p> <p>12. Tersedianya rumah sakit daerah yg terakreditasi tipe C.</p>	<p>6. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.</p> <p>7. Penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan poskesdes.</p> <p>8. Peningkatan dan pengawasan terhadap ketersediaan farmasi atau obat-obatan kesehatan di seluruh tingkat layanan</p> <p>9. Peningkatan ketercapain prgram MDGs melalui penguatan standar pelayanan minimal.</p> <p>10. Peningkatan Promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.</p>	<p>6. Mengotimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya melalui pendidikan dan pelatihan fungsional.</p> <p>7. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen pelayanan pendidikan.</p> <p>9. Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam penguasaan teknologi.</p> <p>10. Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu dan Puskesmas.</p> <p>11. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran kesehatan di seluruh tingkat layanan dasar masyarakat.</p> <p>12. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah sakit secara berkualitas.</p>

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>13. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs;</p> <p>14. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan komprehensif.</p> <p>15. Tersedianya rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak.</p> <p>16. Tersedianya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi khususnya keluarga miskin.</p> <p>17. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat.</p>		<p>13. Mengupayakan ketersediaan farmasi secara baik dan terjangkau bagi keluarga miskin serta pengefektifan sistem pelayanan asuransi masyarakat miskin.</p> <p>14. Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak.</p> <p>15. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya penuntasan angka gizi buruk anak.</p> <p>16. Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang mampu.</p> <p>17. Menggerakkan pola hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan.</p>

Misi 4 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Mewujudkan Pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dalam memenuhi layanan dasar dan penguatan ekonomi daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan, serta Irigasi yang menjadi fasilitas pendukung utama layanan dasar dan penguatan pertumbuhan akses ekonomi daerah. 2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan fasilitas pendukung utama layanan dasar dalam menciptakan pelayanan prima. 3. Terwujudnya integrasi pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan tata ruang dan tujuan pembangunan daerah. 4. Terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis lingkungan. 5. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bagi keluarga kurang mampu/dhuafa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana jalan dan jembatan pendukung layanan dasar masyarakat. 2. Pembangunan fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. 3. Pembangunan sarana dan prasarana aparat pemerintah daerah. 4. Pengoptimalisian pemeliharaan sarana dan prasarana daerah. 5. Peningkatan penataan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang kawasan. 6. Pengoptimalisian pengawasan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan. 7. Peningkatan sistem pengelolaan sumber air bersih untuk kebutuhan dasar. 8. Pembangunan rumah sehat sederhana bagi keluarga miskin/dhuafa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan seluruh fasilitas jalan dan jembatan daerah secara berkelanjutan. 2. Mengoptimalisasikan tata pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 3. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk kemudahan akses transportasi petani. 4. Menyelesaikan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan dan berkelanjutan. 5. Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan. 6. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi dalam mendukung sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang transformatif dan

Misi 4 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>transparansif.</p> <p>7. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, permukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan.</p> <p>8. Penguatan kebijakan Penataan Pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.</p> <p>9. Mengintegrasikan pembangunan dengan dampak pencemaran dan merusak lingkungan hidup.</p> <p>10. Memanfaatkan sumber-sumber air baik sungai dan sumber air lainnya secara optimal dalam penguatan kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>11. Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa.</p>

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Mewujudkan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami. 3. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. 4. Terwujudnya pola perlindungan sosial terhadap masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai syariat. 5. Terwujudnya pemberdayaan terhadap pelaku sosial masyarakat dalam menerapkan dan memahami kondisi sosial berdasarkan pendekatan Syariat Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam. 2. Peningkatan peran ulama dalam penyelenggaraan syariat islam yang komprehensif dan berkelanjutan. 3. Optimalisasi pelaksanaan Sosialisasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Syariat Islam. 4. Pemberdayaan sosial masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. 5. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak 6. Penguatan kelembagaan kepemudaan daerah dan remaja mesjid 7. Pembangunan sarana dan prasana peribadatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersyariat. 8. Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan dan lembaga sosial secara intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran ulama, pelaku sosial dan pemangku adat dalam pembangunan daerah serta pada seluruh aktifitas kemasyarakatan. 2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kepada seluruh masyarakat melalui penguatan rutinitas pengajian. 3. Memperkuat pembangunan sosial melalui pemberdayaan pelaku sosial dan kelompok marginal. 4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok sosial berdasarkan Syari'at Islam. 5. Pemberdayaan perempuan dalam mendukung terselenggaranya Syariat Islam. 6. Mengoptimalkan dan penguatan kegiatan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. 7. Mewujudkan semangat solidaritas dan gotong royong sebagai budaya tertinggi daerah dalam

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pembangunan. 8. Meningkatkan aktivitas mesjid dan meunasah dengan menciptakan sosial keagamaan.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMK. Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program pembangunan yang disusun dalam RPJMK untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh SKPK/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program SKPK adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPK.
2. Program lintas SKPK adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPK untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.
3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah, antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan analisis terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan pada BAB VI, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan 9 (sembilan) Perioritas Pembangunan Utama dalam RPJMK Tahu 2014 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penataan Birokrasi Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Syariat Islam;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;

5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/Alam;
7. Infrastruktur Pendukung Yang Terintegrasi;
8. Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial; dan
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Untuk Pencapaian Sasaran

MISI I: Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.									
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan
				Kondisi Awal 2014	Kondisi Akhir 2019				
<p>1). Meningkatnya kualitas kinerja aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan non teknis</p> <p>2). Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).</p> <p>3). Terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</p>	<p>1). Peningkatan sistem rekrutmen aparatur yang berbasis kompetensi;</p> <p>2). Peningkatan sistem pembinaan sumber daya aparatur ;</p> <p>3). Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan teknologi;</p> <p>4). Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>5). Peningkatan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan standar pelayanan minimal melalui sistem pelayanan prima;</p>	<p>1). Melakukan rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi serta mewujudkan prinsip penempatan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja secara profesional dan proporsional.</p> <p>2). Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui diklat formal dan informal.</p> <p>3). Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.</p> <p>4). Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama.</p> <p>5). Menata kembali aset daerah dengan baik dan jelas.</p>	<p>1). Jumlah Aparatur Yang dilakukan pembinaan (Prajabatan, PIM, SPM, Tata Naskah, Lakip, Tapkin, SOP, pengelolaan Pustaka)</p> <p>2). Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana tempat pendidikan dan pelatihan PNS</p> <p>3). Prosentase aparatur pemda yang dibina</p> <p>4). Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (E-Planning)</p> <p>5). Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya</p>	<p>200 Orang</p> <p>0</p> <p>1,22%</p> <p>100%</p> <p>8%</p>	<p>300 Orang</p> <p>100%</p> <p>2,45%</p> <p>100%</p> <p>10%</p>	<p>1). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>2). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>3). Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>4). Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>5). Program Keluarga Berencana</p> <p>6). Program Pelayanan Umum</p> <p>7). Program Peningkatan Sarana dan</p>	<p>OTDA</p> <p>OTDA</p> <p>Perencanaan</p> <p>Kependudukan</p> <p>Keluarga Berencana</p> <p>OTDA</p> <p>Pekerjaan Umum</p>	<p>SETDAKAB/ BKPP</p> <p>SETDAKAB/ BKPP</p> <p>BAPPEDA</p> <p>DISDUKCAPIL</p> <p>BKBPP</p> <p>SETDAKAB/ KECAMATAN</p> <p>DPU</p>	<p>Prioritas 1: Penataan Birokrasi Pemerintahan</p>

6). Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	6). Meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan terpadu. 7). Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat. 8). Mewujudkan kesejahteraan aparatur melalui remunerasi pendapatan berdasarkan beban kerja dan kualitas kinerja secara profesional.	6). Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	73%	95%	Prasarana Pemerintah	Pemberdayaan Masyarakat Desa Komunikasi dan Informatika OTDA OTDA	BPM SETDAKAB INSPEKTORAT INSPEKTORAT
		7). Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	60%	90%	8). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan		
		8). Rasio Pasangan Ber Akte Nikah	70%	95%	9). Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
		9). Tingkat ketersediaan data PLKB dan keluarga berencana	50%	75%	10). Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
		10). Tingkat efektifitas Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada 8 kecamatan	25%	100%	11). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
		11). Tingkat ketersediaan sarana prasarana pusat perkantoran pemerintahan kabupaten,	30%	60%			
		12). Tingkat ketersediaan kantor mukim dan kantor keuchik	8%	35%			
		13). Tingkat layanan LPSE	100%	100%			
		14). Tingkat penyelesaian hasil temuan serta pengawasan tindak lanjut sejumlah TLHP	15%	90%			
		14). Tingkat ketersediaan tenaga Auditor (Orang)	2	20			

MISI II : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.

Basaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan
				Kondisi Awal 2014	Kondisi Akhir 2019				
1). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya 2). Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Pidie Jaya 3). Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang diiringi dengan meningkatnya kualitas sumberdaya petani, nelayan dan sumberdaya kelompok usaha	1). Penguatan kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah dan ketersediaan kebutuhan konsumsi dasar masyarakat. 2). Perluasan lapangan usaha bagi masyarakat melalui peningkatan produktifitas usaha masyarakat. 3). Peningkatan sarana dan prasarana akses pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 4). Peningkatan komoditi unggulan daerah sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. 5). Pengoptimalisasian	1). Meningkatkan usaha produktif masyarakat bagi kelompok miskin dalam upaya peningkatan pendapatan. 2). Mewujudkan upaya perluasan lapangan usaha dan pemanfaatan lahan terdilarat melalui kebijakan peraturan perundang-undangan. 4). Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan serta memberikan kemudahan menuju akses-akses produksi masyarakat. 5). Membantu masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan produksi dan pemasaran.	1). Pertumbuhan PDRB per tahun	5-6	6-7	1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2). Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 3). Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 4). Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 5). Program peningkatan produksi hasil peternakan 6). Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Pertanian	DPP/DISHUTBUN	Prioritas 5: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 6: Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah/ Alam
			2). Prosentase PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (jutaan)	5,17	5,77		Pertanian	DPP/DISHUTBUN	
			3). Laju Inflasi Prov/Kab/Kota	3,05	3-4		Pertanian	DPP/DISHUTBUN	
			4). Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	24,35	19,95		Pertanian	DPP/DISHUTBUN	
			5). Tingkat pengangguran terbuka	7,5	7		Pertanian	DPP	
			6). Indeks Gini	0,32	0,18		Pertanian	DPP	
7). Indeks Ketimpangan Regional (williamson)	0,13	0,11	Pertanian	DPP					
8). Jumlah penyuluh yang memiliki	1	6	Pertanian	DPP					

<p>sektor riil.</p> <p>4). Meningkatnya efektivitas penggunaan lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah</p> <p>5). Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p>6). Meningkatnya Angka Investasi Daerah baik investasi dalam negeri maupun Investasi luar negeri</p>	<p>sumberdaya/ potensi alam daerah secara berkelanjutan</p> <p>6). Penguatan iklim investasi melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal.</p>	6). Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah yang berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan sentra-sentra produksi.	sertifikasi (orang)	2	4	7). Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	DPP
		7). Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan hutan lindung, konservasi dan produksi sesuai arah dan fungsinya	9). Jumlah objek wisata yg sudah dikembangkan	1.743	2.000	8). Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	BPKP/DPP
		8). Mewujudkan ketersediaan dan kestabilan distribusi barang terutama dalam upaya menjaga kebutuhan pokok masyarakat.	10). Produksi garam rakyat (ton pertahun)	1.748	2.100	9). Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Ketahanan Pangan	BPKP
		9). Mengoptimalkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor ril daerah.	11). Produksi olahan hasil perikanan (ton/tahun)	1.549,5	2.078,3	10). Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	DISHUTBUN
		10). Membuka selebar-lebarnya kesempatan berinvestasi baik nasional dan internasional.	12). Luas lahan tambak produktif (Ha)	7,89	8,00	11). Program perencanaan dan pengembangan hutan rakyat	Kehutanan	DISHUTBUN
			13). Tingkat Produksi padi rata-rata (ton/ha)	658,9	1.061,17	12). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	DISHUTBUN
			14). Produktivitas rata-rata tanaman perkebunan utama (Kg/Ha)	101,4	181	13). Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kehutanan	DISHUTBUN
			15). Ketersediaan jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (km)	36,2	66,20	14). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DISHUTBUN
			16). Ketersediaan jalan usaha tani yang direhab (km)	224,27	375,00	15). Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan Perikanan	DKP
			17). Ketersediaan jalan produksi (km)					
	18). Kontribusi							

			Sektor Pertanian terhadap PDRB	57.25%	52.30%	16). Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan Perikanan	DKP	
			19). Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,03	0,06	17). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelautan Perikanan	DKP	
			20). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,85	2,43	18). Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan Perikanan	DKP	
			21). Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,49	4,24	19). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelautan Perikanan	DKP	
			22). Produksi Perikanan Tangkap (ton per tahun)	10.681	11.200	20). Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	DINSOSNAKER TRANS	
			23). Produksi Perikanan Budidaya (ton per tahun)	942,61	1.040	21). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	DINSOSNAKER TRANS	
			24). Cakupan patroli pengawasan illegal unreported and unregulated (IUU) fishing (patrol./tahun)	3	6	22). Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	DINSOSNAKER TRANS	
			25). Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,88	3,99	23). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Lokal	Tenaga Kerja	DINSOSNAKER TRANS	
			26). Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,49	9,59	24). Program Pengembangan	Industri	DISPERINDAG	
			27). Kontribusi tanaman perkebunan terhadap PDRB	5,58	5,72				

18

			28). Persentase Koperasi Aktif	27,5%	70%	Industri Kecil dan Menengah		KOPERASI	
			29). Tingkat ketersediaan pasar, toko, dan kios	37%	80%	25). Program peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi	Industri	DISPERINDAG KOPERASI	
			30). Cakupan pedagang kaki lima yang difasilitasi	12%	32%	26). Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	DISPERINDAG KOPERASI	
			31). Cakupan Industri Kecil yang difasilitasi	18%	45%	27). Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	DISHUBPARKOM INFO	
			32). Jumlah investasi yang masuk (investor)	3	10	28). Program peningkatan kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM	DISPERINDAG KOPERASI	
			33). Nilai investasi yang masuk (Rp.)	7,6 Milyar	150 Milyar	29). Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Koperasi dan UKM	DISPERINDAG KOPERASI	
						30). Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Koperasi dan UKM	DISPERINDAG KOPERASI	
						31). Program promosi hasil industri kecil dan menengah	Industri	DISPERINDAG KOPERASI	
						32). Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat	BPM	
						33). Program peningkatan partisipasi	Pemberdayaan Masyarakat	BPM	

						masyarakat dalam membangun desa			
						34). Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat	BPM	
						35). Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat	BPM	
						36). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	Pemberdayaan Masyarakat	BPM	
						37). Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	SETDAKAB	
						38). Program peningkatan Iklim Investasi	Penanaman Modal	SETDAKAB	

MISI III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan
				Kondisi Awal 2014	Kondisi Akhir 2019				
<p>1). Terwujudnya Pemerataan Akses Pendidikan Formal maupun Non Formal pada setiap jenjang pendidikan</p> <p>2). Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk Pidie Jaya.</p> <p>3). Tersedianya fasilitas pendukung pendidikan dayah</p> <p>4). Meningkatnya kualitas pendidikan dayah.</p> <p>5). Terwujudnya akreditasi pendidikan dayah.</p> <p>6). Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan</p>	<p>1). Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.</p> <p>2). Peningkatan kualitas profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang berkelanjutan.</p> <p>3). Penguatan sistem pengelolaan pendidikan daerah.</p> <p>4). Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah.</p> <p>5). Peningkatan fasilitas dan sistem pengelolaan serta pelayanan pendidikan dayah yang bermutu.</p> <p>6). Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang</p>	<p>1). Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun serta rintisan wajib belajar 12 Tahun.</p> <p>2). Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada semua tingkatan.</p> <p>3). Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif.</p> <p>4). Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dayah secara terpadu.</p> <p>5). Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dayah melalui pembinaan dan akreditasi.</p> <p>6). Mengoptimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya melalui pendidikan dan</p>	<p>1). Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</p> <p>2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 3- 6 tahun</p> <p>3). Persentase Gampong/Desa yang terlayani PAUD</p> <p>4). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI</p> <p>5). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs</p> <p>6). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI</p> <p>7). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs</p> <p>8). Angka Partisipasi Sekolah (APS)</p>	<p>39,22%</p> <p>61%</p> <p>63%</p> <p>104%</p> <p>99%</p> <p>90%</p> <p>73%</p> <p>99%</p>	<p>56%</p> <p>78%</p> <p>80%</p> <p>108%</p> <p>103%</p> <p>94%</p> <p>76%</p> <p>100%</p>	<p>1). Program Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>3). Program Pendidikan Menengah</p> <p>4). Program Pendidikan Non Formal</p> <p>5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>6). Program Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SD, SMP, SMA/MK)</p> <p>7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p>	<p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p>	<p>Disdik</p> <p>Disdik</p> <p>Disdik</p> <p>Disdik</p> <p>Disdik</p> <p>Disdik</p> <p>Disdik</p>	<p>Prioritas 3: Pendidikan</p> <p>Prioritas 4: Kesehatan</p>

dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan	berkualitas. 7). Penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan poskesdes. 8). Peningkatan dan pengawasan terhadap ketersediaan farmasi atau obat-obatan kesehatan di seluruh tingkat layanan	pelatihan fungsional. 7). Meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. 8). Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen pelayanan pendidikan. 9). Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam penguasaan teknologi. 10). Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu dan Puskesmas.	Usia 7 - 12 tahun 9). Angka Partisipasi Sekolah (APS) , Usia 13 - 15 tahun 10). Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI 11). Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 12). Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs 13). Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 14). Prosentase Guru Kualifikasi S1 atau D IV 15). Prsentase Guru Bersertifikasi 16). Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) TK/SD/ SMP/ SMA 17). Prosentase Sekolah yang Terakreditasi Nilai ≥ B	98%	100%	8). Program Peningkatan sarana dan prasarana dayah 9). Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah 10). Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah 11). Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 12). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13). Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14). Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 15). Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 17). Program Pengawasan Obat	OTDA OTDA OTDA Perenc. Pembangunan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	KPPD KPPD KPPD Bappeda Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes	
7). Tersaluranya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian millenium development goals (MDGs).	9). Peningkatan ketercapain prgram MDGs melalui penguatan standar pelayanan minimal 10). Peningkatan Promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. 11). Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. 12). Peningkatan kualitas profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang berkelanjutan.	11). Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran kesehatan di seluruh tingkat layanan dasar masyarakat. 12). Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah sakit secara berkualitas. 13). Mengupayakan ketersediaan farmasi secara baik dan terjangkau bagi keluarga miskin serta pengefektifan sistem pelayanan asuransi masyarakat miskin.	11). Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 12). Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs 13). Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 14). Prosentase Guru Kualifikasi S1 atau D IV 15). Prsentase Guru Bersertifikasi 16). Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) TK/SD/ SMP/ SMA 17). Prosentase Sekolah yang Terakreditasi Nilai ≥ B	0,02%	0%				
8). Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.	12). Peningkatan kualitas profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang berkelanjutan.	13). Mengupayakan ketersediaan farmasi secara baik dan terjangkau bagi keluarga miskin serta pengefektifan sistem pelayanan asuransi masyarakat miskin.	14). Prosentase Guru Bersertifikasi 15). Prsentase Guru Bersertifikasi 16). Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) TK/SD/ SMP/ SMA 17). Prosentase Sekolah yang Terakreditasi Nilai ≥ B	76%	86%				
9). Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar	13). Penguatan sistem pengelolaan pendidikan daerah. 14). Peningkatan ketersediaan fasilitas	14). Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak	17). Prosentase Sekolah yang Terakreditasi Nilai ≥ B	30,14	79,29				
				69%	89%				

6

pada tingkat desa dan kecamatan secara berkualitas	dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah.	15). Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya penuntasan angka gizi buruk anak.	18). Prosentase Sekolah yang Menjalankan MBS	100%	100%	dan Makanan		
10). Tersedianya rumah sakit daerah yang terakreditasi tipe C.	15). Peningkatan fasilitas dan sistem pengelolaan serta pelayanan pendidikan dayah yang bermutu.	16). Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang mampu.	19). Angka rata-rata lama sekolah	8,69	8,69	18). Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
11). Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs;	16). Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.	17). Menggerakkan pola hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan	20). Angka melek huruf	95,48%	95,48%	19). Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinkes
12). Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan konprehensif.	17). Penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan poskesdes.	18). Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan daerah dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun serta rintisan wajib belajar 12 Tahun.	21). Tersedianya Rumah Sakit Daerah Bertipe	Non Tipe	Tipe C	20). Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Dinkes
13). Tersedianya rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak.	18). Peningkatan dan pengawasan terhadap ketersediaan farmasi atau obat-obatan kesehatan di seluruh tingkat layanan	19). Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada semua tingkatan.	22). Angka kematian bayi/1000 kelahiran	1,15	0,85	21). Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Dinkes
	19). Peningkatan ketercapaian prgram MDGs melalui penguatan standar pelayanan minimal.	20). Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif.	23). Angka kematian ibu/1000 kelahiran	11,5	3,64	22). Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
	20). Peningkatan Promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.	21). Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dayah secara terpadu.	24). Angka usia harapan hidup	69,36	69,52	23). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinkes
		22). Meningkatkan pengawasan	25). Persentase balita gizi buruk (per 1.000)	3,49	0,96	24). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
			26). Rasio posyandu persatuan balita	1:79	1:100			
			27). Rasio posyandu persatuan penduduk	1:662	1:725			
			28). Rasio Puskesmas dan pustu per satuan penduduk	1:4.900	1:5.162			

<p>14). Tersedianya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi khususnya keluarga miskin.</p> <p>15). Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat.</p>	<p>penyelegaraan pendidikan dayah melalui pembinaan dan akreditasi.</p>	<p>29). Rasio dokter per satuan penduduk</p>	<p>1:8.645</p>	<p>1:7.500</p>	<p>25). Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</p>	<p>Kesehatan</p>	<p>Dinkes</p>			
	<p>23). Mengoptimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya melalui pendidikan dan pelatihan fungsional.</p>	<p>30). Rasio tenaga medis per satuan penduduk</p>	<p>1:373</p>	<p>1:331</p>	<p>26). Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</p>				<p>KB</p>	<p>BKBPP</p>
	<p>24). Meningkatkan kualitas profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.</p>	<p>31). Jumlah tenaga medis</p>	<p>394</p>	<p>394</p>	<p>27). Program Keluarga Berencana</p>				<p>KB</p>	<p>BKBPP</p>
	<p>25). Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen pelayanan pendidikan.</p>	<p>32). Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet (Fe3)</p>	<p>31%</p>	<p>50%</p>	<p>28). Program Kesehatan Reproduksi Remaja</p>				<p>KB</p>	<p>BKBPP</p>
	<p>26). Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam penguasaan teknologi.</p>	<p>33). Persentase ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A</p>	<p>92%</p>	<p>97%</p>	<p>29). Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</p>				<p>KB</p>	<p>BKBPP</p>
	<p>27). Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu dan Puskesmas.</p>	<p>34). Persentase bayi 0-5 bulan yang mendapat ASI Eksklusif</p>	<p>2%</p>	<p>3%</p>						
	<p>28). Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran kesehatan di seluruh tingkat layanan dasar masyarakat.</p>	<p>35). Persentase pemberian Vitamin A pada Bayi dan Balita</p>	<p>88%</p>	<p>95%</p>						
	<p>29). Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah sakit secara berkualitas.</p>	<p>36). Persentase pasien jiwa yang terdeteksi</p>	<p>22%</p>	<p>28%</p>						
	<p>30). Mengupayakan ketersediaan farmasi secara baik dan</p>	<p>37). Persentase air bersih</p>	<p>33,57</p>	<p>50,09</p>						
		<p>38). Persentase rumah sehat</p>	<p>44,96</p>	<p>48,96</p>						
	<p>39). Persentase Jamban Keluarga</p>	<p>42,26</p>	<p>50,26</p>							
	<p>40). Persentase Imunisasi</p>	<p>61</p>	<p>80</p>							

	terjangkau bagi keluarga miskin serta pengaktifan sistem pelayanan asuransi masyarakat miskin.	41). Persentase desa UCI	21	30				
	31). Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak	42). Jumlah desa siaga	40	75				
	32). Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya penuntasan angka gizi buruk anak.							
	33). Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang mampu.							
	34). Menggerakkan pola hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan							

8

MISI IV: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Pendukung Layanan Dasar dan Perekonomian Secafa Terintegrasi dan Terpadu

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan
				Kondisi Awal 2014	Kondisi Akhir 2019				
<p>1). Meningkatkan Kualitas sarana jalan dan jembatan yang menjadi pendukung utama layanan dasar dan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah</p> <p>2). Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman.</p>	<p>1). Pembangunan sarana jalan dan jembatan pendukung layanan dasar masyarakat.</p> <p>2). Pembangunan fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.</p> <p>3). Pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.</p> <p>4). Pengoptimalisian pemeliharaan sarana dan prasarana daerah.</p> <p>5). Peningkatan penataan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang kawasan.</p> <p>6). Pengoptimalisian pengawasan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan.</p>	<p>1). Meningkatkan seluruh fasilitas jalan dan jembatan daerah secara berkelanjutan.</p> <p>2). Mengoptimalkan tata pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.</p> <p>3). Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk kemudahan akses transportasi petani.</p> <p>4). Menyelesaikan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan dan berkelanjutan.</p> <p>5). Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan.</p> <p>6). Meningkatkan</p>	<p>1). Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (km)</p> <p>2). Panjang Jalan Desa yang direhab (km)</p> <p>3). Jumlah Jembatan yang direhab</p> <p>4). Prosentase Jembatan dalam kondisi Baik</p> <p>6). Rasio Jaringan Irigasi</p> <p>7). Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)</p> <p>8). Drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)</p> <p>9). Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)</p> <p>10). Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)</p> <p>11). Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)</p>	240	320	<p>1). Program pembangunan jalan dan jembatan</p> <p>2). Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>3). Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</p> <p>4). Program pembangunan infrastruktur perdesaan</p> <p>5). Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</p> <p>6). Program pengembangan</p>	<p>Pekerjaan Umum</p> <p>Pekerjaan Umum</p> <p>Pekerjaan Umum</p> <p>Pekerjaan Umum</p> <p>Lingkungan</p>	<p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>DPU</p> <p>KLH</p>	<p>Prioritas 7: Infrastruktur Pendukung yang Terintegrasi</p> <p>Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Kebencanaan</p>

<p>7). Peningkatan sistem pengelolaan sumber air bersih untuk kebutuhan dasar.</p> <p>8). Pembangunan rumah sehat sederhana bagi keluarga miskin/dhuafa.</p>	<p>fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi dalam mendukung sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang transformatif dan transparansif.</p> <p>7). Pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, permukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan.</p> <p>8). Penguatan kebijakan Penataan Pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.</p> <p>9). Mengintegrasikan pembangunan dengan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.</p> <p>10). Memanfaatkan sumber-sumber air baik sungai dan sumber air lainnya secara optimal dalam penguatan kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>11). Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa</p>	12). Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	15.820	16.370	kinerja pengelolaan persampahan	Hidup		
		13). Pemukiman Layak Huni (%)	47,57	72,57	7). Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	KLH	
		14). Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	1:500	1:500	8). Program Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Lingkungan Hidup	KLH	
		15). Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	56	70	9). Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Lingkungan Hidup	KLH	
		16). Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	56	66	10). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	OTDA	BPBD	
		17). Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	20	45				

6

MISI V : Mewujudkan Kehidupan Berbasis Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial yang Berlandaskan Nilai-Nilai Syariah Islam

Batasan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan
				Kondisi Awal 2014	Kondisi Akhir 2019				
1). Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelaksanaan Syariah Islam	1). Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Syariah Islam.	1). Meningkatkan peran ulama, pelaku sosial dan pemangku adat dalam pembangunan daerah serta pada seluruh aktifitas kemasyarakatan.	1). Jumlah majelis taklim yang dibina (desa)	222	222	1). Program Peningkatan Pemahaman Syariah Islam	OTDA	Dinas Syariah Islam	Prioritas 2: Pelaksanaan Syariah Islam
2). Meningkatnya upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.	2). Peningkatan peran ulama dalam penyelenggaraan syariah islam yang komprehensif dan berkelanjutan.	2). Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kepada seluruh masyarakat melalui penguatan rutinitas pengajian.	2). Persentase Taman Pengajian Alquran (TPA) yang dibina	100	100	2). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana Syariah Islam	OTDA	Dinas Syariah Islam	Prioritas 8: Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
3). Terwujudnya pola perlindungan sosial terhadap masyarakat	3). Optimalisasi pelaksanaan Sosialisasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Syariah Islam.	3). Memperkuat pembangunan sosial melalui pemberdayaan pelaku sosial dan kelompok marginal.	3). Persentase Imam meunasah dan Imam Mesjid yang dibina	100	100	3). Program Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Syariah Islam	OTDA	Dinas Syariah Islam	
4). Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariah Islam	4). Pemberdayaan sosial masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.	4). Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok sosial berdasarkan Syariah Islam.	4). Jumlah kelompok PKK yang dibina	40	72	4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	OTDA	Dinas Syariah Islam	
	5). Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	5). Penguatan kelembagaan kepemudaan daerah dan remaja mesjid	5). Persentase Peningkatan jumlah kelompok UEPG	20 klp	120 klp	5). Program Pembinaan dan Pengembangan Syariah Islam	OTDA	Dinas Syariah Islam	
	6). Penguatan kelembagaan kepemudaan daerah dan remaja mesjid	6). Pembangunan sarana dan prasana	6). Persentase Peningkatan jumlah kelompok PEPG	8 klp	48 klp	6). Program Nasional			
	7). Pembangunan sarana dan prasana	7). Pemberdayaan perempuan dalam	7). Persentase Peningkatan	2 klp	2 klp				

<p>perwujudan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersyariat.</p> <p>8). Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan dan lembaga sosial secara intensif</p>	<p>mendukung terselenggaranya Syariat Islam.</p> <p>6). Mengoptimalkan dan penguatan kegiatan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>7). Mewujudkan semangat solidaritas dan gotong royong sebagai budaya tertinggi daerah dalam pembangunan.</p> <p>8). Meningkatkan aktivitas mesjid dan meunasah dengan menciptakan sosial keagamaan.</p>	<p>jumlah kelompok EUG-SP</p> <p>8). Tingkat ketersediaan kantor kechik</p> <p>9). Tingkat ketersediaan kantor mukim</p> <p>11). Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)</p>	8%	75%	Masyarakat Mandiri Pedesaan	Masyarakat	
			38%	75%	7). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Sosial	DINSOSNAKER TRANS
			5		8. Program Pengembangan Kemitraan	Infokom	DISHUBPARKOM INFO
					9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Budaya	DISHUBPARKOM INFO
					10. Program Pengembangan Nilai Budaya	Budaya	DISHUBPARKOM INFO
		11). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Budaya	DISHUBPARKOM INFO			

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPK terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPK. Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMK.

Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*out comes*) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPK untuk menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPK.

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing masing program. Untuk program yang pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPK (lintas SKPK) maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPK terkait.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dapat dilihat dalam Tabel 8.1 sebagai berikut:

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 - 2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	SKPK Pnanggung Jawab		
					2015		2016		2017		2018		2019				Target Kinerja	Rp (Jutaan)
					Target Kinerja	Rp (Jutaan)	Target Kinerja	Rp (Jutaan)	Target Kinerja	Rp (Jutaan)	Target Kinerja	Rp (Jutaan)	Target Kinerja	Rp (Jutaan)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1		URUSAN WAJIB																
1	01	PENDIDIKAN				35.497		35.852		36.210		36.573		36.938		181.070		
1	01	15	Program Pendidikan Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	39	43	46		50		53		56		56		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 3-6 tahun	%	61	64	68	2.562	71	2.613	75	2.640	78	2.666	78	13.069	DINAS PK
				Persentase Gampong/Desa yang terlayani PAUD	%	63	66	70		73		77		80		80		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	104	105	106		106		107		108		108		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	99	100	101		102		102		103		104		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90	91	92		92		93		94		94		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	73	73	74	16.225	75	16.387	76	16.717	76	16.884	77	82.764	DINAS PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 tahun	%	99	99	100		100		100		100		100		
1	01	16		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 tahun	%	98	98	99		100		100		100		100		

				Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	79,51	80,31	14.700	81,11	14.847	81,91	14.995	82,71	15.145	83,51	15.297	84,31	74.985	DINAS PK
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	58,3	59,14		59,94		60,74		61,54		62,34		63,14		
				Angka putus-sekolah (APtS) SMA/MA/SMK	%	0,03	0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk usia ≥ 15 Tahun	%	96	97	80	97	81	98	82	98	82	99	83	99	408	DINAS PK
				Jumlah PKBM yang terakreditasi	%	0	12		24		36		48		60		72		
				Persentase Guru berkualifikasi ≥ S1 atau D IV	%	76	78		80		82		84		86		86		
				Persentase Guru bersertifikasi	%	27	28		29		30		31		32		32		
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) TK	Rerata	30,14	40,14	820	50,14	828	55,14	836	60,14	845	65,14	853	70,14	4.183	DINAS PK
				Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) SD	Rerata	34,27	44,27		54,27		59,27		64,27		69,27		74,27		
				Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP	Rerata	39,29	49,29		59,29		64,29		69,29		74,29		79,29		
				Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA/SMK	Rerata	35,71	45,71		55,71		60,71		65,71		70,71		75,71		
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang terakreditasi nilai ≥ B	%	69	73	1.110	76	1.121	79	1.132	82	1.144	85	1.155	89	5.662	DINAS PK/ SEKRT. MPD

				Persentase Sekolah yang menjalankan MBS	%	100	100		100		100		100		100				
1	01	22		Komite Sekolah/Dayah yang dibina	%	0	30		40		50		60		75		75		
				Tingkat peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Pidie Jaya	Komite	142	19		19		19		19		19		95		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendidikan	Indeks	85	85		90		95		95		100		100		
								41.075		38.537			40.464		42.481		208.071		
1	02			KESEHATAN															
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	600	100	630	100	662	100	695	100	729	100	3.315	DINAS KESEHATAN
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	35	38	9.120	45	9.576	46	10.055	65	10.558	75	11.085	75	50.394	DINAS KESEHATAN dan RSU
				Cakupan pelayanan kesehatan jiwa	%	44	48		57		65		73		81		81		
1	02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin (Pengawasan Apotik dan Toko Obat)	%	100	100	210	100	221	100	232	100	243	100	255	100	1.160	DINAS KESEHATAN
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	99,77	99,77	113	99,77	119	99,77	125	99,77	131	99,77	137	99,77	624	DINAS KESEHATAN
				Cakupan Desa Siaga Aktif	%	14	23		27		32		36		41		41		
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	405	100	425	100	446	100	469	100	493	100	2.238	DINAS KESEHATAN dan RSU

				Cakupan balita gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan	%	51	60		69		75		84		90		90		
				Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	63	65		68		70		72		74		74		
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	66	67	260	68	273	69	287	70	301	71	316	71	1.437	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Gampong yang melakukan STBM	Gampng	6	20		20		20		20		20		106		
				Cakupan desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	59	63		70		72		74		77		77		
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	AFP Pendduk di bawah 15 Tahun	≥ 2/ 100.000	≥ 2/ 100.000	322	≥ 2/ 100.000	338	≥ 2/ 100.000	355	≥ 2/ 100.000	373	≥ 2/ 100.000	391	≥ 2/ 100.000	1.779	DINAS KESEHATAN
				Penemuan penderita pneumonia Balita	%	5	7		11		14		18		21		21		
				Penemuan pasien baru TB BTA positif	%	7	11		15		19		22		26		26		
				Penderita DBD yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	02	23	Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	Tingkat ketersediaan dokumen sumberdaya kesehatan	Dok.	6	6	294	6	309	6	324	6	340	6	357	30	1.625	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sunatan masal	Orang	0	100	9.800	100	10.290	100	10.805	100	11.345	100	11.912	500	54.151	DINAS KESEHATAN

6

1	02	24		Prosentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu	%	100	100		100	100	100	100	100	100					
				Prosentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan (BPJS)	%	100	100		100	100	100	100	100	100					
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Prosentase ketersediaan Poskesdes	%	43	44	5.620	45	46	47	48	48	6.831	48	31.054		DINAS KESEHATAN	
				Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu	Buah	19	0	5.620	0	0	0	1	1	6.831	1	31.054		DINAS KESEHATAN	
1	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya Rumah Sakit Rujukan Bertipe C	Unit	0	0	18.000	1	0	0	0	1	9.041	1	56.032		DINAS KESEHATAN dan RSU	
				Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana RSU	%	40	40	18.000	55	60	65	75	75	9.041	75	56.032		DINAS KESEHATAN dan RSU	
1	02	27	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit	Prosentase Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana RS	%	50	50	117	60	123	65	129	70	135	75	142	75	646	RSU
				Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	33	38		44	50	60	63	63	182	63	829		DINAS KESEHATAN	
1	02	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Kunjungan Bayi	%	90	90	150	90	158	90	165	90	174	90	182	90	829	DINAS KESEHATAN
				Cakupan pelayanan anak Balita	%	75	75		75	77	78	79	79	174	79	182	79	829	DINAS KESEHATAN
1	02	30	Program pelayanan kesehatan lansia	Cakupan lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	67	69	150	71	158	73	165	76	174	78	182	78	829	DINAS KESEHATAN
1	02	31	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	20	23	70	25	74	27	77	30	80	32	82	34	383	DINAS KESEHATAN
				Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	88	89	285	90	299	91	314	92	330	93	346	93	1.575	DINAS KESEHATAN

1	02	32		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	52	55		58		62		68		71		71		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan pelayanan ibu nifas	%	100	100		100		100		100		100		100		
1	03		PEKERJAAN UMUM					113.068		114.199		115.341		116.494		117.659		576.760	
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	39	2	48.280	2	48.763	2	49.250	2	49.743	2	50.240	49	246.277	DINAS PU
1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase pembangunan turap / talud / bronjong	%	50	5	1.209	5	1.221	5	1.233	5	1.246	5	1.258	75	6.167	DINAS PU
1	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	%	50	5	4.832	5	4.880	5	4.929	5	4.978	5	5.028	75	24.648	DINAS PU
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase Tingkat ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	60	5	18.236	5	18.418	5	18.603	5	18.789	5	18.976	85	93.022	DINAS PU
1	03	26	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Prosentase peningkatan Optimalisasi Embung	%	50	50	4.409	55	4.453	60	4.498	65	4.543	70	4.588	70	22.490	DINAS PU
1	03	27	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Tingkat ketersediaan air minum	%	30	4	2.510	4	2.535	4	2.560	4	2.586	4	2.612	50	12.804	DINAS PU
1	03	28	Program Pengendalian Banjir	Prosentase Penanganan Kawasan Rawan Banjir	%	20	4	149	4	150	4	152	4	154	4	155	40	760	DINAS PU

1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Prosentase sarana perkotaan yang dibangun	%	20	3	1.000	3	1.000	4	1.100	4	1.200	4	1.500	4	5.700	DINAS PU
1	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana pedesaan	%	35	7	30.729	7	31.036	7	31.347	7	31.660	7	31.977	70	156.749	DINAS PU
1	05		PENATAAN RUANG					1.357		1.371		1.384		1.398		1.412		6.922	
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTRK, RTBL, RTRK) dan Sosialisasi	Dok.	1	1	1.357	1	1.371	1	1.384	1	1.398	1	1.412	5	6.922	DINAS PU / BAPPEDA
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.023		1.033		1.044		1.054		1.065		5.218	
1	06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data/informasi yang tersedia	Dok./ Buku	8	10	665	10	672	10	678	10	685	10	692	10	3.392	BAPPEDA
1	06	16	Program Kerja Sama Pembangunan	Tingkat ketersediaan laporan kegiatan	Lap.	3	4	160	4	162	4	163	4	165	4	166	4	816	BAPPEDA
1	06	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Perencanaan Kelembagaan P3A yang dibina dan penguatan Kelembagaan KPI	%	60	7	700	7	707	7	714	7	721	7	728	95	3.571	BAPPEDA
				Prosentase penguatan kelembagaan sanitasi dan air minum (PPSP/AMPL)	%	100	100%		100	100		100		100		100	100		
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Tingkat ketersediaan	%	100	100	360	100	364	100	367	100	371	100	375	100	1.836	BAPPEDA

				dokumen perencanaan pembangunan daerah															
1	06	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan ekonomi	%	100	100	264	100	267	100	269	100	272	100	275	100	1.347	BAPPEDA
1	06	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan KSDM	%	100	100	399	100	403	100	407	100	411	100	415	100	2.035	BAPPEDA
1	06	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat pelaksanaan kordinasi bidang perencanaan Sarana dan Prasarana	%	100	100	250	100	253	100	255	100	258	100	260	100	1.275	BAPPEDA
1	07		PERHUBUNGAN					256.809		259.377		261.970		264.590		267.236		1.309.982	
1	07	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum	%	50	55	5.830	60	5.888	65	5.947	70	6.007	75	6.067	75	29.739	DISHUBPAR KOMINFO
1	07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	40	45	5.820	50	5.878	55	300	60	303	6	306	70%	12.607	DISHUBPAR KOMINFO
				Tersedianya Tanah untuk Fasilitas Perhubungan	Ha	0	1		1		0		0		0		2 Ha		
1	07	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan Guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten	%	60	64	300	71	303	73	306	78	309	80	312	85	1.530	DISHUBPAR KOMINFO
1	07	22	Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Bidang Perhubungan	Tersedianya Database Bidang Perhubungan	%	70	100	310	100	313	100	316	100	319	100	323	100	1.581	DISHUBPAR KOMINFO
1	07	23	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Perhubungan	Tersedianya SDM di Bidang Perhubungan	%	35	70	160	100	162	100	163	100	165	100	166	100	816	DISHUBPAR KOMINFO

1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan SDM Petugas P2TP2A	%	35	40	89	45	90	50	91	55	92	60	93	60	454	BKBPP
1	12		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					1.066		1.077		1.087		1.098		1.109		5.438	
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Prosentase KB Aktif	%	51	55	1.054	60	1.065	65	1.075	70	1.085	75	1.097	75	5.376	BKBPP
1	12	22	Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Prosentase Ketersediaan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	75	75	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	61	BKBPP
1	13		SOSIAL					3.210		3.242		3.275		3.307		3.340		16.374	
1	13	15	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terdatanya Jumlah PMKS	%	50	50		0		0		0		50		100	2.545	DINSOS NAKERTRAN
				Tingkat cakupan pelayanan dukungan barang untuk WRSE	Orang	220	50		50		50		50		50		250		
				Tersedianya Bantuan Dana Usaha Bagi Keluarga Miskin	KK	250	70	499	70	504	70	509	70	514	70	519	350		
				Tingkat Cakupan Pelayanan dukungan Barang Bantuan Usaha KUBE-FM	KUBE	110	15		16		16		16		16		79		
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Bantuan Kebutuhan Hidup Bagi Lansia	Orang	200	50		50		50		50		50		50	4.591	DINSOS NAKERTRAN
				Terlaksananya Pemulangan bagi orang terlantar/ terdampar dan anak terlantar	%	10	20	900	20	909	20	918	20	927	20	937	20		
1	13	16		Terpenuhinya bantuan pendukung tanggap darurat	%	0	20		20		20		20		20		20		

				bencana															
				Kebutuhan hidup bagi orang dengan kecacatan Berat (ODKB)	Orang	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65				
				Terpenuhinya kebutuhan penderita kusta	KK	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
				Terpenuhinya alat Bantuan Bagi Penyandang Cacat	Orang	20	50	50	55	55	55	55	55	55	55				
				Adanya Alat Pendukung Bagi Penyandang Cacat	Orang	20	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
1	13	18	Program Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma	Jumlah penyandang cacat dan Trauma yang dibina	Orang	25	5	101	5	102	5	103	5	104	5	105	50	515	DINSOS NAKERTRAN
1	13	19	Program Pembinaan Panti Asuhan /panti Jompo	Jumlah Panti Asuhan yang dibina	Panti	6	6	360	6	364	6	367	6	371	6	375	6	1.836	DINSOS NAKERTRAN
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Cakupan peran kelembagaan Tagana dalam penanganan bencana per tahun	%	100	100	1.350	100	1.364	100	1.377	100	1.391	100	1.405	100	6.886	DINSOS NAKERTRAN
1	14		TENAGA KERJA					2.714		2.741		2.769		2.796		2.824		13.844	
1	14	15	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tersedianya Fasilitas Balai Latihan Kerja	%	70	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS NAKERTRAN
				Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	0	0	1.900	25	1.919	30	1.938	45	1.958	55	1.977	60	9.692	DINSOS NAKERTRAN
1	14	16	Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Ketersediaan Informasi Bursa Tenaga kerja	%	0,5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	3.714	DINSOS NAKERTRAN
				Besaran tenaga kerja yang siap pakai terdaftar yang ditempatkan	%	20	5	728	5	735	7	743	5	750	4	758	46		DINSOS NAKERTRAN
1	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga	Besaran tenaga kerja yang memperoleh perlindungan	%	15	5	86	5	87	5	88	5	89	5	89	40	439	DINSOS NAKERTRAN

18

1	17	16	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan jenis fasilitas seni dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian	%	5	5	680	5	687	5	694	5	701	5	708	30	3.469	DISHUBPAR KOMINFO
				Cakupan organisasi kesenian	%	5	5		5		5		5		30				
				Cakupan Pelaksanaan Kajian Seni	%	10	10		10		10		10		60				
				Cakupan Gelar Seni dalam bentuk pagelaran, pameran, festival dan lomba	%	75	75		75		75		75		75				
1	17	17	Program pengelolaan kekayaan budaya	Tersedianya sistem database kebudayaan	%	0	0	310	0	313	100	316	0	319	0	323	100	1.581	DISHUBPAR KOMINFO
				Cakupan penyelesaian kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan	%	75	100		100		100		100		100				
1	17	18	Program Pengelolaan dan Pelestarian Adat dan Budaya	Cakupan Adat dan budaya Daerah yang dilestarikan	%	25	20	76	10	78	10	83	10	86	20	88	70	411	SEKRET. MAA
1	18		PEMUDA DAN OLAH RAGA					8.683		8.770		8.858		8.946		9.036		44.292	
1	18	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	OKP	60	60	683	60	690	60	697	60	704	60	711	60	3.484	DISPORA
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina	Cabor	24	25	2.000	26	2.020	27	2.040	28	2.061	29	2.081	29	10.202	DISPORA
				Jumlah cabang olah raga pelajar yang dibina	Cabor	4	5		6		7		8		9		9		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tingkat ketersediaan stadion sepak bola	%	40	50	6.000	60	6.060	70	6.121	80	6.182	90	6.244	100	30.606	DISPORA

1	18	21		Tingkat ketersediaan gedung Olah raga	%	0	0		0		30		30		30		90		
				Tingkat ketersediaan lapangan bola kaki yang standar di 3 kecamatan	%	20	0		20		20		20		20		100		
1	18	22	Program Peningkatan Kualitas dan Pengetahuan anggota Gerakan Pramuka	Jumlah organisasi gerakan pramuka yang dibina	Tingkat	3	3	249	3	251	3	254	3	256	3	259	3	1.268	DISPORA
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					2.548		.573		2.599		2.626		2.651		12.997	
1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan sistem pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	0	20	170	20	180	20	2.017	20	2.338	20	2.017	100	6.722	KESBANGPOL
				Prosentase penyelenggaraan HUT Linmas	%	100	100	20	100	20	100	20	100	21	100	21	100	102	SATPOL PP / WH
1	19	16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase peningkatan Siskamswakarsa	%	0	20	505	20	510	20	515	20	520	20	526	100	2.576	KESBANGPOL / SATPOL PP DAN WH
				Prosentase penurunan angka kriminalitas	%	45	7	198	5	200	4	202	3	204	3	206	23	1.010	SATPOL PP DAN WH
1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	%	0%	20		20		20		20		20		100	KESBANGPOL	
				Penyelenggaraan hari kebangkitan Nasional	%	100	100	70	100	71	100	71	100	72	100	73	100	357	DISHUBPAR KOMINFO
				Persentase peningkatan forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	%	0	20		20		20		20		20		100	KESBANGPOL	
1	19	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI (Per tahun)	%	100	100	1.200	100	1.300	100	1.400	100	1.500	100	1.600	100	7.000	KESBANGPOL

8

				Prosentase Pengembangan wawasan kebangsaan melalui peringatan hari-hari besar	% :	100	100	15	100	15	100	15	100	15	100	16	100	77	SATPOL PP DAN WH
1	19	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase menurunnya gangguan keamanan dalam negeri	%	0	20	370	20	370	20	370	20	370	20	370	100	1.850	KESBANGPOL
1	19	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Prosentase Penyuluhan terhadap judi dan maksiat	%	35	10	95	10	100	10	100	10	110	10	120	85	545	SATPOL PP DAN WH
1	19	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	0	0%	0	0%	0	90	151	90	153	90	154	90	458	KESBANGPOL
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					40.663		41.386		45.549		43.388		46.418		217.410	
1	20	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat penyelesaian Prolegda per tahun	%	44	70	3.353	73	3.387	76	3.420	78	3.455	79	3.489	80	17.104	DPRK
1	20	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Tingkat pelayanan terhadap masyarakat	%	100	100	1.065	100	1.076	100	1.086	100	1.097	100	1.108	100	5.433	SEKDAKAB
				Tingkat pelayanan terhadap tamu-tamu daerah	%	100	100		100		100								SEKDAKAB
				Prosentase pelayanan pelelangan pengadaan barang dan jasa daerah	%	100	100	270	100	280	100	283	100	286	100	288	100	1.407	SEKDAKAB
1	20	17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan realisasi APBD per tahun	%	94	98	532	98	574	98	604	98	613	98	664	98	2.990	DPPKAD

8

				Prosentase Peningkatan realisasi PAD dari target per tahun	%	66	5	562	5	562	5	562	5	562	5	562	91	2.812	DPPKAD
1	20	18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Tersediaanya dokumen pelaksanaan anggaran daerah	%	100	100	151	100	159	100	167	100	175	100	184	100	836	DPPKAD
1	20	19	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat ketersediaan pos pemadam kebakaran	Unit	1	0		0		1		0		1	3	5.020	BPBD	
				Tingkat ketersediaan mobil pemadam kebakaran	Unit	4	0	130	0	140	2	2.300	0	150	2	2.300			8
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat ketersediaan LHP setiap tahun	%	100	20		20		20		20		20	100	2.295	INSPEKTORAT	
1	20	20		Jumlah penurunan angka penemuan kasus (Kasus)	Kasus	200	180	450	165	455	157	459	138	464	111	468			100
				Tingkat Penyelesaian hasil temuan serta pengawasan tindak lanjut sejumlah TLHP	%	51	6		6		6		6		6	81			
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat ketersediaan auditor yang profesional sejumlah 20 Auditor	Orang	2	2	78	3	79	4	80	5	80	4	81	20	398	INSPEKTORAT
1	20	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya operasional website Baitul Mal Pidie Jaya	%	100	100	65	100	67	100	63	100	66	100	64	100	325	BAITUL MAL
1	20	24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pemberian bantuan hukum kepada aparatur dan masyarakat	%	100	100	250	100	253	100	255	100	258	100	260	100	1.275	SEKDAKAB
1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat penyelesaian produk hukum daerah	%	100	100	200	100	202	100	204	100	206	100	208	100	1.020	SEKDAKAB
			Program Peningkatan Pelayanan Umum	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86	12.500	87	12.625	87	12.751	87	12.879	88	13.008	88	63.763	SEKDAKAB/ KECAMATAN/ KP2TSP

			Tersedianya dokumen (LPPD, LKPJ, ILPPD, LAKIP)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Prosentase pelaksanaan kegiatan monitoring HO	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Terfasilitasinya Pemilihan Perangkat Gampong dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Tingkat keterlaksanaan MONEV Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Prosentase pelayanan terhadap bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Tingkat keterlaksanaan pengawasan eksplorasi SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Prosentase penerapan PATEN di Kecamatan	%	25	50	50	75	100	100	100	100	100	SEKDAKAB/KECAMATAN
1.	20	28	Tersedianya Patok Tapal Batas Wilayah Pemda	Patok	0	50	50	50	50	50	50	50	250	SEKDAKAB
			Tersedianya Patok Batas Tanah Pemda	Patok	100	200	200	200	200	200	200	200	1100	SEKDAKAB
			Tesedianya subsidi Raskin untuk KK Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Tingkat ketersediaan Operasional untuk 39 Pustaka Gampong	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB
			Tingkat pembinaan aparatur mukim/gampong yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SEKDAKAB/BPM/BAPPEDA
			Tingkat penyelesaian penataan aset daerah	%	50	10	10	10	10	10	10	10	10	DPPKAD

1	20	37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Prosentase Sarana dan Prasarana yang disediakan	%	10	10	3.404	10	3.433	10	3.472	10	3.507	10	3.542	50	17.364	KANTOR PEMBINAAN DAYAH
1	20	38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana Syariat Islam	Prosentase peningkatan kapasitas umum meunasah, umum mesjid, guru TPA/TPQ	%	65	10	350	10	354	5	357	5	361	5	364	95	1.785	DINAS SYARIAT ISLAM
1	20		Program Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Syariat Islam	Prasentase ketersediaan informasi tentang Syariat Islam di seluruh wilayah Pidie Jaya	%	40	45	25	50	25	55	26	60	26	65	26	65	128	DINAS SYARIAT ISLAM
1	20		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang dilakukan pembinaan (Prajabatan, PIM, SPM, Tata Naskah, Lakip, Tapkin, SOP, pengelolaan Pustaka)	Orang	1.200	200	1.750	200	1.768	200	2.785	200	2.122	300	2.143	2.300	10.568	SEKDAKAB /BKPP
				Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana tempat pendidikan dan pelatihan PNS	%	0	0												0
1	20		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase aparaturnya penda yang dibina	%	1,22	1,36	720	1,63	727	1,91	734	2,04	742	2,18	749	2,45	3.673	BKPP
1	20		Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	%	60	65	850	70	859	75	867	80	876	85	885	85	4.336	BPBD
1	20		Program Pengendalian Banjir	Prosentase rehabilitasi perumahan masyarakat pasca banjir	%	0	75	1.000	80	1.010	85	1.020	90	1.030	95	1.041	95	5.101	BPBD
1	20		Program Tanggap Darurat Bencana	Prosentase ketersediaan petugas pemadam kebakaran	%	33	33	500	33	505	45	800	45	850	70	1.000	70	3.655	BPBD
				Peningkatan kapasitas anggota SAR (Search and Rescue)	Orang	40	50		60		70		80		90		100		

1	20		Program Pendidikan Dayah	Angka Partisipasi Pendidikan Dayah	%	30	30	275	35	278	40	281	45	283	50	286	50	1.403	KANTOR PEMBINAAN DAYAH
1	20		Program Pemberdayaan Santri	Prosentase santri yang dibina	%	10	10	95	10	96	10	97	10	98	10	99	10	485	KANTOR PEMBINAAN DAYAH
1	20		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wakaf	Prosentase Tanah wakaf yg didata	%	40	40	130	45	131	50	133	55	134	60	135	60	663	BAITUL MAL
1	21		KETAHANAN PANGAN					1.887		2.012		3.440		3.082		3.226		11.354	
1	21	15	Program penganekaragaman dan Keamanan pangan	Nilai pola pangan harapan	%	80	5	323	10	339	15	356	20	374	25	393	25	1.785	BPKP
1	21	16	Program Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.	%	90	2%	225	4	230	6	234	8	239	10	244	10	1.171	BPKP
1	21	17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Gampong Demapan yang diberdayakan	Gampng	7	10	45	10	46	10	47	10	48	10	49	50	234	BPKP
1	21	18	Program Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KP)	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina	KWT	40	8	45	8	46	8	48	8	49	8	51	40	239	BPKP
1	21	19	Program Penyuluhan dan Pendampingan Petani serta Pelaku Agribisnis (Penas)	Terpenuhinya Kegiatan Penas	Keg.	1	0	0	0	0	1	1.500	0	0	0	0	1	1.500	BPKP
1	21	20	Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Kelautan	Prosentase penyuluh yang dilakukan pembinaan	%	55	10	263	15	276	20	290	25	304	30	320	95	1.453	BPKP
1	21	22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani dan SDM Pelaku Usaha Agribisnis	Jumlah Gapoktan dan LUEP yang dilakukan pembinaan	Klp	0	5	16	5	17	5	18	5	19	5	19	25	88	BPKP
1	21	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Tersedianya Fasilitas Penunjang BPP	%	45	10	540	10	567	10	595	10	625	10	656	50	2.984	BPKP

18

1	21	24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah saung tani yang dibangun	Unit	9	4	400	4	400	3	400	4	400	3	300	27	1.900	BPKP
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					7.447		7.521		7.597		7.673		7.749		37.987	
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah kelompok PKK yang dibina	Klp	40	8		8		8		8		8		40		BPM
				Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diikuti	TTG	1	1	1.325	1	1.345	1	1.441	1	1.441	1	1.480	5	7.032	
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Pemakmu Gampong (UEPG)	Klp	20	20		20		20		20		20		120		BPM
				Jumlah kelompok Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG)	Klp	8	8	560	8	566	8	571	8	577	8	583	48	2.857	
				Jumlah kelompok Ekonomi Usaha Gampong Simpan Pinjam (EUG-SP)	Klp	2	2		2		2		2		2		2		
1	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Jumlah gampong yang dibina	Gampng	40	8		8		8		8		8		80		BPM
				Penerapan Sistem Administrasi Informasi Gampong (SAIG)	Gampng	1	8	1.150	8	1.178	8	1.198	8	1.202	8	1.248	41	5.976	
1	22	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pelatihan Pokja Profil Gampong yang dibina	Gampng	5	20	150	25	170	30	200	35	230	40	250	155	1.000	BPM
				Jumlah apartur gampong yang dibina	Orang	666	666		666		666		666		666		666		
1	22	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah perempuan yang dilatih keterampilan	Orang	150	75	212	75	214	75	216	75	218	75	221	375	1.081	BPM
1	22	20	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	Prosentase ketersediaan laporan monev. PNPM	%	22	24	3.218	23,50	3.250	22	3.283	20	3.316	18	3.349	18	16.415	BPM

1	22	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Presentase Sarana dan Prasarana Desa yang tersedia	%	20	20	893	25	902	30	911	35	920	40	929	40	4.555	BPM
				Tingkat ketersediaan kantor kechik	%	8	15		25		35		45		60		60		
				Tingkat ketersediaan kantor mukim	%	38	45		50		55		60		65		75		
1	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.744		1.761		1.779		1.797		1.815		8.896	
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya domain Website pemerintah daerah	Domain	4	1	500	1	505	1	510	1	515	1	1.500	9	3.530	DISHUBPAR KOMINFO/ BAITUL MAL
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi dan Informatika	%	30	40		50		60		70		80		80		
				Tersedianya Fasilitas Komunikasi dan Informatika (Gedung Media Center)	Unit	0	0		0		0		0		1		1		
1	25	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Aparatur bidang Komunikasi dan Informatika	%	10	15	450	15	455	15	459	15	464	15	468	85	2.295	DISHUBPAR KOMINFO
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	10		10		10		10		10		50		DISHUBPAR KOMINFO
				Tersedianya layanan LPSE dengan baik	%	100	100		100		100		100		100		100		SEKDAKAB/ DISHUBPAR KOMINFO

6

1	25	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian informasi nasional dengan berbagai media	Keg.	2	12	544	12	549	12	555	12	560	12	566	60	2.775	DISHUBPAR KOMINFO
				Cakupan layanan informasi publik	%	25	5		5		5		5		5		50		
1	25	19	Program Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Database Bidang Komunikasi dan Informatika	%	0	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan penyelesaian kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika	%	80	100	250	100	253	100	255	100	258	100	260	100	1.275	DISHUBPAR KOMINFO
2			URUSAN PILIHAN																
2	01		PERTANIAN					23.259		23.622		23.996		24.384		24.786		120.047	
2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase kelompok tani yang dibina	%	20	10		15		20		25		30		35		
				Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	5,58	5,61	355	5,64	373	5,66	391	5,69	411	5,72	432	5,72	1.962	DISHUTBUN
2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB	%	57,25	56,23	689	55,50	696	54,15	703	53,20	710	52,30	717	52,30	3.515	DISTANNAK
				Tingkat ketersediaan pangan daerah	%	100	100	235	100	242	100	249	100	256	100	264	100	1.246	BPKP
2	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (PSDH/DR)	%	5,58	5,61	50	5,64	51	5,66	51	5,69	52	5,72	52	5,72	206	DISHUTBUN
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat	Tersedianya Demlot Percontohan Tanaman Pangan	%	20	10	12	15	13	20	15	25	16	30	18	30	73	BPKP

Guna			Pertanian															
			Adanya Demplot Tanaman Hortikultura bagi Masyarakat	%	0	1	50	2	51	3	51	4	52	5	52	5	255	BPKP
2	01	18	Terciptanya petani yang handal untuk pengolahan hasil pertanian /perkebunan dan kelautan	%	0	5	50	10	53	15	55	20	58	25	61	25	276	BPKP
			Panjang Jalan Usaha Tani yang Dibangun/ Direhab	Km	36	5		5,5		6,0		6,5		7,0		66		DISTANNAK
			Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik	Km	101,4	7,75	8.190	8	8.272	8,5	8.355	9	8.438	9,5	8.523	144,15	41.777	DISTANNAK
			Jumlah Embung Yang Dibangun/ Direhab	Unit	4	2		3		3		3		3		18		DISTANNAK
			Tingkat Penurunan Serangan OPT Perkebunan	%	60	55	1.339	50	1.352	45	1.366	40	1.380	35	1.393	35	6.830	DISHUTBUN
			Prosentase peningkatan produktifitas padi	Ton/Ha	7,89	7,90	1.600	7,92	1.680	7,95	1.764	7,97	1.852	8,00	1.945	8,00	8.841	BPKP/ DISTANNAK/ DISHUTBUN
2	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Kg/Ha	658,9	724,8	8.478	797,8	8.563	877	8.648	964,7	8.735	1.061,2	8.822	1.061,2	43.246	DISHUTBUN
			Panjang Jalan Produksi yang dibangun	Km	224	30		30		30		30		30		374		DISHUTBUN
2	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	%	60	10	490	20	539	30	593	40	652	50	717	50	2.991	BPKP
2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dosis	100.000	120.000	650	120.000	657	120.000	663	120.000	670	120.000	676	120.000	3.316	DISTANNAK
2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Unit	8	3	891	3	900	3	909	3	918	3	927	15	4.545	DISTANNAK

				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Agribisnis Peternakan	%	10	10	5	5	5	5	5	5	35					
2	01	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya Ekspo Ternak	Keg.	3	1	80	1	81	1	82	1	83	8	408	DISTANNAK		
2	01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya Sarana dan prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna	Unit	15	3	150	3	152	3	153	3	155	3	156	30	765	DISTANNAK
2	02		KEHUTANAN					2.878		2.907		2.936		2.965		2.995		14.681	
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Prosentase pemanfaatan hutan rakyat	Ha	306	40	171	40	172,71	40	174,4	40	176,2	40	178	506	872	DISHUTBUN
2	02	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Laban	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	510	170	1.807	170	1.825	170	1.843	170	1.862	170	1.880	1.360	9.218	DISHUTBUN
2	02	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luas hutan dan lahan kritis yang dilindungi	Ha	510	170	698	170	705	170	712	170	719	170	726	1.360	3.561	DISHUTBUN
2	02	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	%	0,03	0,04	152	0,05	154	0,06	155	0,07	157	0,08	158	0,09	775	DISHUTBUN
2	03		ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL					64		65		65		66		67		326	
2	03	17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrik	Tingkat ketersediaan listrik daerah dengan pembangunan PLTMH	MW	0	2	64	2	65	3	65	2	66	0	67	9	326	SEKDAKAB
2	04		PARIWISATA					1.560		1.576		1.592		1.608		1.623		7.957	
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Orang/Tahun	3.000	2.000	30	8.000	30	2.000	31	2.000	31	2.000	31	13.000	153	DISHUBPAR KOMINFO

2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tempat Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan (Objek Wisata Alam, Sejarah dan Religius)	Lokasi	2	2	1.150	2	1.162	3	1.173	3	1.185	4	1.197	4	5.866	DISHUBPAR KOMINFO
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Aparatur dan Stakeholder bidang Pariwisata	%	25	40	380	50	384	60	388	70	392	80	395	80	1.938	DISHUBPAR KOMINFO
					Cakupan Fasilitas Kelompok Masyarakat Ekonomi Kreatif	Klp	0												
2	05		KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.040		10.140		10.242		10.344		10.448		51.214	
2	05	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi garam rakyat	Ton/ Tahun	1.743	1.800	130	1.850	150	1.900	200	1.950	200	2.000	200	2.000	880	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
2	05	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Cakupan Patroli Pengawasan Illegal Unreported and unregulated (IUU) Fishing	Patroli/ Tahun	3	3	130	4	150	6	200	6	200	6	200	6	880	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
2	05	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	942,61	961	3.000	980	3.030	1.000	3.060	1.020	3.091	1.040	3.122	1.040	15.303	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
2	05	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	10.681	10.800	6.500	10.900	6.565	11.000	6.631	11.100	6.697	11.200	6.764	11.200	33.157	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
2	05	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan	Ton/ Tahun	1.748	1.800	280	1.900	283	1.950	286	2.000	288	2.100	291	2.100	1.428	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
2	06		PERDAGANGAN					5.244		5.296		5.349		5.403		5.457		26.750	

2	06	15	Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan pengawasan kepada pedagang barang dan jasa	%	6,06	2,42	15	2,42	15	2,42	15	2,42	154	2,42	15	18,18	77	DINAS PERINDAG KOPERASI
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat ketersediaan pasar, toko, dan kios	%	37,24	7,81	5.154	11	5.206	9	5.258	8	5.310	7	5.363	80,73	26.291	DINAS PERINDAG KOPERASI
2	06	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan pedagang kaki lima yang difasilitasi	%	12,74	4	75	4	76	4	77	4	77	4	78	32,05	383	DINAS PERINDAG KOPERASI
2	07		INDUSTRI					3.562		3.598		3.634		3.670		3.707		18.170	
2	07	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan industri kecil dan menengah yang difasilitasi	%	13	4	85	4	86	4	87	4	88	4	88	31,19	434	DINAS PERINDAG KOPERASI
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Industri Kecil yang difasilitasi	%	18	5	3.382	5	3.416	5	3.450	5	3.484	5	3.519	45,26	17.252	DINAS PERINDAG KOPERASI
2	07	20	Program Promosi Hasil Industri Kecil dan Menengah	Cakupan IKM yang difasilitasi promosi produk	%	1,31	0,65	95	0,65	96	0,65	97	0,65	98	0,65	99	4,58	485	DINAS PERINDAG KOPERASI
2	08		KETRANS MIGRASIAN					376		380		384		387		391		1.918	
2	08	16	Program Transmigrasi Lokal	Cakupan transmigran lokal yang dibina	%	100	100	376	100	380	100	384	100	387	100	391	100	1.918	DINSOS NAKERTRAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMK dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan /pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan parameter "Peningkatan Kualitas Manusia" dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Penetapan indikator kinerja Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dapat dilihat dalam Tabel 9.1 sebagai berikut:

Tabel 9.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019

No	Misi, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2019
				2015	2016	2017	2018	2019	
MISI I: Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa.									
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan non teknis								
1.1	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan (LAKIP)	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86	87	87	87	88	88
1.3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Indeks Kinerja aparatur pelayanan publik	%	60	63	67	70	75	80	80
1.5	Jumlah Aparatur Yang dilakukan pembinaan (Prajabatan, PIM, SPM, Tata Naskah, Lakip, Tapkin, SOP, pengelolaan Pustaka)	Orang	200	300	300	300	300	300	300
1.6	Tingkat penyelesaian PROLEGDA setiap tahun	%	44	70	73	76	78	79	80
1.7	Persentase jumlah peningkatan SDM di bidang pemeriksaan dan pengawasan (auditor)	Orang	2	2	3	4	5	4	20

2 Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)									
2.1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (E-Planning)	%	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya	Buku/Dok	8	10	10	10	10	10	10
2.3	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	73	80	87	90	95	95	95
2.4	Rasio bayi berakte kelahiran	%	60	63	65	70	78	85	90
2.5	Rasio pasangan berakte nikah	%	70	75	85	90	93	95	95
2.6	Tingkat ketersediaan data PLKB dan keluarga berencana	%	50	55	60	65	70	75	75
3 Terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme									
3.1	Tingkat efektifitas Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada 8 kecamatan	%	25	50	50	75	100	100	100
3.2	Tingkat ketersediaan sarana prasarana pusat perkantoran pemerintahan kabupaten	%	30	35	40	45	50	60	60
3.3	Tingkat ketersediaan kantor mukim dan kantor keuchik	%	8	10	12	14	16	20	20
3.4	Tingkat layanan LPSE	%	100	100	100	100	100	100	100
3.5	Prosentase pelayanan pelelangan pengadaan barang dan jasa (ULP)	%	100	100	100	100	100	100	100
3.6	Tingkat penyelesaian perijinan sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100	100	100	100
3.7	Tingkat ketersediaan LHP setiap tahun	%	0	20	20	20	20	20	100

	3.8	Jumlah penurunan angka penemuan kasus	Kasus	200	180	165	157	138	111	100
	3.9	Tingkat penyelesaian hasil temuan pengawasan tindak lanjut sejumlah TLHP	%	0	30	15	15	15	15	90
	3.10	Tingkat capaian laporan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian (WTP)	%	0	0	100	100	100	100	100
II	MISI II: Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha.									
	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya								
	1.1	Pertumbuhan PDRB per tahun	%	5-6	5-6	5-6	6-7	6-7	6-7	6-7
	1.2	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (jutaan)	Rp	5,17	5,17	5,32	5,47	5,62	5,77	5,77
	1.3	Laju Inflasi Prov/Kab/Kota	%	3,05	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
	2	Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Pidie Jaya								
	2.1	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	24,35	23,55	23,10	22,05	21	19,95	19,95
	2.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	7
	2.3	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,32	0,3	0,25	0,21	0,18	0,18
	2.4	Indeks Ketimpangan Regional (williamson)	Indeks	0,130	0,130	0,123	0,120	0,118	0,110	0,110
	3	Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang diiringi dengan meningkatnya kualitas sumberdaya petani, nelayan dan sumberdaya kelompok usaha sektor rill.								

3.1	Prosentase penyuluh yang memiliki sertifikasi	%	2	5	7	10	13	15	15
3.2	Jumlah objek wisata yg sudah dikembangkan	Tempat	2	2	2	2	2	2	2
3.3	Produksi garam rakyat (ton pertahun)	Ton	1.743	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
3.4	Produksi olahan hasil perikanan (ton per tahun)	Ton	1,748	1.800	1.900	1.950	2.000	2.100	2.100
3.5	Prosentase lahan tambak rakyat yang dikembangkan	%	40	45	55	70	70	75	75
4	Meningkatnya efektifitas penggunaan lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah								
4.1	Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	510	170	170	170	170	170	1360
4.2	Luas pemanfaatan hutan rakyat (Ha)	Ha	306	40	40	40	40	40	506
4.3	Jumlah kegiatan agribisnis yang dikembangkan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	5
4.4	Luas pemanfaatan areal perkebunan	Ha	10.202	340	340	340	340	340	11.903
5	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat								
5.1	Tingkat Produksi padi rata-rata (ton/tahun)	Ton/ha	7,89	7,90	7,92	7,95	7,97	8,00	8,00
5.2	Produktivitas rata-rata tanaman perkebunan utama (Kg/Ha)	Kg	658,90	724,79	797,79	877,00	964,70	1.061,17	1.061,17
5.3	Ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Km	99,23	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	138,0

5.4	Ketersediaan jalan usaha tani yang direhab	Km	36	5	5,5	6	6,5	7	66
5.5	Ketersediaan jalan produksi	Km	224,27	30	30	30	30	30	375
5.6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	58.05	58.02	57.99	57.57	57.66	57.25	57.25
5.7	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
5.8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,85	1,85	1,95	2,10	2,25	2,43	2,43
5.9	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	3,49	3,49	3,66	3,85	4,04	4,24	4,24
5.10	Produksi Perikanan Tangkap (ton per tahun)	Ton	10.681	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200	11.200
5.11	Produksi Perikanan Budidaya (ton per tahun)	Ton	942,61	961	980	1.000	1.020	1.040	1.040
5.12	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	3,88	3,90	3,92	3,94	3,96	3,99	3,99
5.13	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,49	9,51	9,53	9,55	9,57	9,59	9,59
5.14	Kontribusi tanaman perkebunan terhadap PDRB	%	5,58	5,61	5,64	5,66	5,69	5,72	5,72
6	Meningkatnya aktifitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah								
6.1	Persentase Koperasi Aktif	%	28	9	9	9	9	9	63
6.2	Persentase UKM yang difasilitasi	%	34	1	1	1	1	1	40
6.3	Cakupan pengawasan kepada pedagang barang dan jasa	%	6	2	2	2	2	2	16

6.4	Tingkat ketersediaan pasar, toko, dan kios	%	37	8	11	9	8	7	74
6.5	Cakupan pedagang kaki lima yang difasilitasi	%	13	4	4	4	4	4	28
6.6	Cakupan Industri Kecil yang difasilitasi	%	18	5	5	5	5	5	40
6.7	Cakupan industri kecil dan menengah yang difasilitasi	%	13	4	4	4	4	4	27
6.8	Cakupan IKM yang difasilitasi promosi produk	%	1	1	1	1	1	1	4
7 Meningkatkan Angka Investasi Daerah baik investasi dalam negeri maupun Investasi luar negeri									
7.1	Jumlah investasi yang masuk (investor)	Investor	3	2	2	2	2	2	13
7.2	Nilai investasi yang masuk (rupiah)	Milyar	3	20	20	20	20	20	103
III MISI III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan									
1 Terwujudnya Pemerataan Akses Pendidikan Formal maupun Non Formal pada setiap jenjang pendidikan									
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	39,22	43	46	50	53	56	56
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 3- 6 tahun	%	61	64	68	71	75	78	78
1.3	Persentase Gampong/Desa yang terlayani PAUD	%	63	66	70	73	77	80	80

1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	104	104	106	106	107	108	108
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	99	99	101	102	102	103	103
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	90	90	92	92	93	94	94
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	73	73	74	75	76	76	76
1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7 - 12 tahun	%	99	99	100	101	101	102	102
1.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13 - 15 tahun	%	98	98	99	100	101	101	101
1.10	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
1.13	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	100	100	100	100	100	100	100
1.14	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.69	7.42	8.71	8.73	8.75	8.79	8.79
1.15	Angka melek huruf	%	95,48	96,25	96,78	97,18	97,48	97,68	97,68
2	<i>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Profesional, Berkualitas, Merata dan Terjangkau</i>								

			Tipe	Non Tipe	Tipe C	-	-	-	-	Tipe C
2.1	Tersedianya Rumah Sakit Daerah Bertipe		Tipe	Non Tipe	Tipe C	-	-	-	-	Tipe C
2.2	Angka kematian bayi/1000 kelahiran	%		1,15	1,15	1,25	1,05	1,01	0,85	0,85
2.3	Angka kematian ibu/1000 kelahiran	%		11,5	11,5	8,63	6,47	4,85	3,64	3,6
2.5	Angka usia harapan hidup	%		69,36	69,40	69,42	69,44	69,47	69,52	69,52
2.6	Persentase balita gizi buruk (per 1.000)	%		3,49	3,49	2,62	1,96	1,28	0,96	0,96
2.7	Rasio posyandu persatuan balita	Rasio		1:79	1:79	1:85	1:95	1:98	1:100	1:100
2.8	Rasio posyandu persatuan penduduk	Rasio		1:662	1:662	1:672	1:695	1:710	1:725	1:725
2.9	Rasio Puskesmas dan pustu per satuan penduduk	Rasio		1:4.900	1:4.900	1:4.974	1:5.070	1:5.121	1:5.162	1:5.162
2.10	Rasio rumah sakit per satuan penduduk penduduk	Rasio		1:146.964	1:146.964	1:132.956	1:134.352	1:135.748	1:135.748	1:135.748
2.11	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio		1:8.645	1:8.645	1:8.779	1:8.150	1:7.981	1:7.500	1:7.500
2.12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio		1:373	1:373	1:378	1:359	1:340	1:331	1:331
2.13	Jumlah tenaga medis	Orang		394	394	394	394	394	394	394
2.14	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet (Fe3)	%		31	31	27	42	47	50	50

2.15	Persentase ibu nifas yang mendapatkan kapsul vitamin A	%	92	92	84	95	96	97	97
2.16	Persentase bayi 0-5 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	2,12	2,12	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50
2.17	Persentase pemberian Vitamin A pada Bayi dan Balita	%	88	88	70	92	93	95	95
2.18	Persentase pasien jiwa yang terdeteksi	%	21,57	21,57	24,60	25,20	26,60	27,60	27,6
2.19	Persentase air bersih	%	33,57	33,57	50,09	39,09	45,09	50,09	50,09
2.20	Persentase rumah sehat	%	44,96	44,96	63,99	46,96	47,96	48,96	48,96
2.21	Persentase Jamban Keluarga	%	42,26	42,26	50,28	46,26	48,26	50,26	50,26
2.22	Persentase Imunisasi	%	61	61	64	70	75	80	80
2.23	Persentase desa UCI	%	21	21	29	26	28	30	30
2.24	Kasus malaria	Orang	20	20	16	13	10	5	5
2.25	Jumlah kasus DBD	Orang	55	55	60	42	35	30	30
2.26	Jumlah kasus TB	Orang	184	184	229	200	190	170	170
2.27	Jumlah kasus AFP	Orang	2	2	2	2	2	1	1

2.28	Jumlah kasus diare	Orang	3.878	3.878	4.431	4.200	4.000	3.750	3.750
2.29	Jumlah penderita kusta	Orang	27	27	18	15	10	5	5
2.30	Jumlah desa siaga	Desa	40	40	58	65	70	75	75
2.31	PHBS rumah tangga	KK	1.890	1.890	1.890	1.925	1.950	2.000	2.000
2.32	Poskestren	Unit	4	4	4	5	7	9	9
2.33	PHBS sekolah	Unit	4	4	4	6	10	15	15
2.34	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	90	90	84	85	90	95	95
2.35	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kebidanan	%	99	99	99	99	99	100	100
2.36	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	100	100	100
2.37	Cakupan kunjungan bayi	%	74	85	90	100	100	100	100
2.38	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	%	95	95	100	100	100	100	100
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani	%	3	3	4	100	100	100	100
2.40	Cakupan peserta KB aktif	%	70	70	75	100	100	100	100

	2.41	Cakupan K4	%	90	90	84	100	100	100	100
	2.42	Cakupan TTI	%	40	40	52	80	95	95	95
	2.43	Cakupan TT2	%	40	40	40	70	85	95	95
	2.44	Cakupan TT5	%	30	30	30	50	65	85	85
	2.45	Cakupan Fe1&Fe 3	%	50	50	77	100	100	100	100
	2.46	Cakupan deteksi resti oleh nakes	%	50	50	55	100	100	100	100
IV	MISI IV: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Pendukung Layanan Dasar dan Perekonomian Secara Terintegrasi dan Terpadu									
	1	<i>Meningkatnya Kualitas sarana jalan dan jembatan yang menjadi pendukung utama layanan dasar dan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah</i>								
	1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	39	2	2	2	2	2	49,67
	1.2	Panjang Jalan Kabupaten yang direhab	Km	425	10	10	10	10	10	475
	1.3	Jumlah Jembatan yang direhab	Unit	110	10	10	10	10	10	160
	1.4	Prosentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	34,5	9	9	9	9	9	46

1.5	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui Roda 4)	%	55	4	4	4	4	4	75
2	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman.								
2.1	Rasio Jaringan Irigasi	%	40	10	10	10	10	10	90
2.2	Prosentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	60	5	5	5	5	5	85
2.3	Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	58	2	2	2	2	2	68
2.4	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	29	4	4	4	4	4	51
2.5	Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,16	99,18	99,21	99,23	99,25	99,27	99,27
2.7	Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	986	99	99	99	99	99	493
2.8	Prosentase Rumah Layak Huni	%	56	2	2	2	2	2	66
2.9	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	%	1:500	1:500	1:500	1:500	1:500	1:500	1:500
2.10	Persentase Rumah tinggal bersantitas	%	56	3	3	3	3	2	70
2.11	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	%	20	5	5	5	5	5	45
2.13	Prosentase Permukiman Layak Huni	%	55,73	3	3	3	3	3	71

MISI V : Mewujudkan Kehidupan Berbasis PEMBERDAYAAN dan PERLINDUNGAN Sosial yang Berlandaskan Nilai-Nilai Syariah Islam									
1	<i>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelaksanaan Syariah Islam</i>								
1.3	Jumlah majelis taklim yang dibina	Buah	222	222	222	222	222	222	222
1.4	Persentase Taman Pengajian Alquran (TPA) yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase Imam meunasah dan Imum Mesjid yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
2	<i>Meningkatnya upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.</i>								
2.1	Jumlah kelompok PKK yang dibina	Kelompok	40	8	8	8	8	8	72
2.2	Persentase Peningkatan jumlah kelompok UEPG	Kelompok	20	20	20	20	20	20	120
2.3	Persentase Peningkatan jumlah kelompok PEPG	Kelompok	8	8	8	8	8	8	48
2.4	Persentase Peningkatan jumlah kelompok EUG-SP	Kelompok	2	2	2	2	2	2	2
2.5	Tingkat ketersediaan kantor kechik	%	8	15	25	35	45	60	75
2.6	Tingkat ketersediaan kantor mukim	%	38	45	50	55	60	65	75

2.7	Tingkat Cakupan Pelayanan dukungan Barang Bantuan Usaha KUBE-FM	Kelompok	0	15	16	16	16	16	79
3 Terwujudnya pola perlindungan sosial terhadap masyarakat									
3.1	Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitat)	Unit	5	5	5	5	5	5	5
3.2	Persentase Penurunan angka PMKS	%	50	5	5	5	5	5	25
3.3	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	10	10	10	10	10	10	50
3.4	Tingkat Kecakapan Hidup penyandang cacat dan Trauma	Orang	25	5	5	5	5	5	5
3.5	Tersedianya Bantuan Kebutuhan Hidup Bagi Lansia	Orang	200	60	60	60	60	60	60
3.6	Tingkat cakupan pelayanan dukungan barang untuk WRSE	Orang	220	50	50	50	50	50	470
4 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam									
4.1	Prosentase peningkatan kapasitas imum meunasah, imum mesjid, guru TPA/TPQ	%	65	10	5	5	5	5	95
4.2	Prasentase ketersediaan informasi tentang Syariat Islam di seluruh wilayah Pidie Jaya	%	40	45	50	55	60	65	65
4.3	Besaran ketersediaan sarana (mesjid, Meunasah, TPA, MCK) dan prasarana (Hambal, Kitab-kitab, soundsystem) ibadah	%	10	20	30	40	50	60	60

4.4	Prosentase remaja yang mendapat pembinaan	%	50	60	70	80	90	100	100
4.5	Persentase Taman Pengajian Alquran (TPA) yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Tingkat pembinaan majelis taklim disetiap gampong	%	100	100	100	100	100	100	100
4.7	Tingkat Terlaksananya Kegiatan LPTQ dan MTQ Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”*** maka disusul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Rencana Anggaran dan Belanja Kabupaten (RAPBK) setiap tahunnya serta menjadi dasar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK guna menjabarkan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.

10.1 Pedoman Transisi

Pada masa transisi, RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dapat menjadi dasar pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah pada masa berakhirnya Bupati yaitu tahun 2019. Lebih jelas bahwa dokumen RKPK dan RAPBK masa periode Bupati terpilih, pada awal Tahun 2019 dapat mempedomani RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Hal tersebut dimaksud untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dalam penyusunan RKPK setelah RPJMK berakhir. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai periode berakhirnya RPJMK Pidie Jaya tahun 2019 nanti, akan menjadi permasalahan-permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2019 (masa transisi) akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024 nanti.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun oleh SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPK) dan menjadi Pedoman Pemerintah dalam menyusun RKPK Pidie Jaya setiap tahunnya. Di samping itu RPJMK juga menjadi pedoman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

dunia usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan Pidie Jaya. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPK, LSM, dunia usaha dan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya berkewajiban untuk berpedoman pada program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMK Pidie Jaya sebaik-baiknya.
2. SKPK berkewajiban menyusun Renstra SKPK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPK dan berpedoman pada RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPK) Tahunan.
3. Dalam pelaksanaannya RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program serta target indikator yang telah ditetapkan. Bila dirasakan ada perubahan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai maka dilakukan evaluasi paruh waktu untuk penyesuaian atau revisi terhadap program-program dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Hasil revisi tersebut menjadi dasar SKPK dalam menyesuaikan kembali Renstra SKPK dan menjamin konsistensi antara RPJMK dengan Renstra SKPK.
4. Bappeda berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 sebagai tolok ukur penilaian kinerja pemerintahan tahunan dan lima tahunan Bupati dan Wakil Bupati, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi RPJMK dapat dijadikan indikator penting dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah Pidie Jaya.

BAB XI PENUTUP

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya ke depan sangat ditentukan oleh sebuah sistem perencanaan pembangunan yang baik yang didukung dengan keseriusan dan semangat serta kemauan aparaturnya pemerintah bersama masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Dukungan tersebut merupakan tantangan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 dapat tercapai yaitu. *“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya Yang Aman, Sejahtera, dan Madiri Dengan Berlandaskan UUPA.”*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum daerah, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Disamping itu RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMK diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah kabupaten. Partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) maupun Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana dan penyesuaian program yang tercantum dalam agenda provinsi dan nasional.

RPJMK ini merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBK.

Harapan kami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 ini dapat menjadi dokumen perencanaan daerah yang sedikit banyaknya mampu mengakomodir berbagai permasalahan daerah, sehingga dapat memberikan sesuatu yang bermakna dalam masa pemerintahan kami, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

BUPATI PIDIE JAYA,

dto

AIYUB ABBAS